

**IDENTIFIKASI *POWER PROJECTION* INDONESIA
DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN
PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana



Disusun Oleh:

Nurul Azizah Isnaeni

155120407121041

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

IDENTIFIKASI *POWER PROJECTION* INDONESIA
DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN
PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Nurul Azizah Isnaeni
NIM. 155120407121041

Telah disetujui oleh dosen pembimbing,

Pembimbing Utama,

Vishnu Mahendra Wiswayana, S.IP., M.Si
NIK. 2017108906281001

Pembimbing Pendamping,

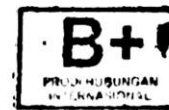
Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si
NIK. 2013098602142001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswita Azzahra, S.IP., M.DevSt
NIP. 19780220201121001





LEMBAR PENGESAHAN

**IDENTIFIKASI POWER PROJECTION INDONESIA
DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN
PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Nurul Azizah Isnaeni
NIM. 155120407121041**

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana Strata 1 pada tanggal

7 Januari 2020

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji

Yustika Citra Mahendra, S.Sos., MA
NIP. 198408232015041001

Sekretaris Majelis Penguji,

Muhammad Riza Hanafi, S.IP., M.IA
NIK. 2011028002071001

Anggota Majelis Penguji I,

Wishnu Mahendra Wiswayana, S.IP., M.Si
NIK. 2017108906281001

Anggota Majelis Penguji II,

Firstvarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si
NIK. 2013098602142001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Prof. Dr. Enti Ludigdo, SE., M.Si., Ak
NIK. 196508141994021001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertandatangan dibawah ini, Saya:

Nama : Nurul Azizah Isnaeni

NIM : 155120407121041

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul

IDENTIFIKASI *POWER PROJECTION* INDONESIA DI KAWASAN

LAUT TIONGKOK SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO

WIDODO adalah benar hasil karya penulis. Hal – hal yang tidak ditulis oleh

penulis telah diberi catatan kaki dan daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti

bahwa pernyataan yang penulis nyatakan ini tidak benar, maka penulis bersedia

menerima sanksi akademik yaitu pencabutan gelar sarjana yang telah didapatkan

penulis melalui skripsi ini.

Malang, 10 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,

Nurul Azizah Isnaeni

NIM. 155120407121041

ABSTRAK

Konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan salah satu konflik regional yang mengalami dinamika serius dan masih belum ada solusi. Konflik ini muncul tahun 1947, dimana Tiongkok mengeluarkan peta Laut Tiongkok Selatan dengan *nine dashed-lines* – 9 (9 DL) garis putus-putus dan menyatakan bahwa wilayah yang ada di dalam garis putus-putus tersebut merupakan wilayah teritorial Tiongkok yang sebenarnya 9 DL tersebut berhimpitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang biasanya digunakan para nelayan Indonesia untuk mencari ikan. Sehingga, 9 DL Tiongkok menyebabkan sengketa antar Tiongkok dengan negara-negara yang ZEE-nya tumpang tindih dengan 9 DL tersebut, termasuk Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Sesuai strategi *power projection* yang penulis gunakan dalam penelitian, penulis akan meneliti apakah strategi *power projection* Indonesia akan cenderung mengarah dalam *soft military power projection* atau *hard military power projection* dengan menggunakan konsep proyeksi kekuatan (*power projection*) menurut Walter Ladwig. Menurut konsep proyeksi kekuatan (*power projection*) Walter Ladwig, hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia pada masa Kepemimpinan Joko Widodo lebih banyak menggunakan *hard military power projection*. Akan tetapi, kecenderungan strategi *power projection* Indonesia apabila dilihat melalui intensitasnya sesuai dengan konsep yang sama, Indonesia lebih condong menggunakan *soft military power projection*. Hal diatas dibuktikan dengan Implementasi Indonesia yang lebih banyak dalam identifikasi *Securing Sea Lanes of Communication* (SLOC) yang ada di dalam *soft military power projection*, sedangkan pada *hard military power projection*, Indonesia hanya melakukan tiga dari lima strategi yang ada dalam teori Ladwig.

Kata Kunci: Laut Tiongkok Selatan, *Power Projection*, Indonesia

ABSTRACT

The South China Sea Conflict (LTS) is one of the regional conflicts that is experiencing serious dynamics and there is still no solution. This conflict arose in 1947, where China issued a map of the South China Sea with nine dashed-lines - 9 (9 DL) dotted lines and stated that the area within the dotted line is the territorial area of China which is actually 9 DL coincide with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ), which is usually used by Indonesian fishermen to fish. Thus, 9 DL China caused disputes between China and countries whose EEZ overlapped with the 9 DLs, including Indonesia, Malaysia, Vietnam and the Philippines. In accordance with the power projection strategy concept that the author uses in the study, the writer will examine whether the Indonesia's power projection strategy will tend to lead to soft military power projection or hard military power projection by using the power projection concept according to Walter Ladwig. According to Walter Ladwig's concept of power projection, the results of the analysis show that Indonesia during Joko Widodo's leadership used more hard military power projection. However, the tendency of Indonesia's power projection strategy when viewed through its intensity in accordance with the same concept, Indonesia is more inclined to use soft military power projection. The above is evidenced by Indonesia's greater implementation of the identification of Securing Sea Lanes of Communication (SLOC) in soft military power projection, whereas in hard military power projection, Indonesia only carries out three of the five strategies in Ladwig theory.

Keywords: South China Sea, Power Projection, Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACTS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penulisan.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1. Manfaat Keilmuan.....	16
1.4.2. Manfaat Praktis.....	16
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	17
2.1. Studi Terdahulu.....	17
2.2. Konsep <i>Power Projection</i> Walter Ladwig.....	21
2.3. Definisi Konseptual.....	22
2.3.1. Sembilan Jenis <i>Military Power Projection</i>	23



2.4.	Operasionalisasi Konsep	25
2.5.	Alur Pemikiran	35
2.6.	Argumen Utama	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		37
3.1.	Jenis Penelitian	37
3.2.	Ruang Lingkup Penelitian.....	37
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4.	Teknik Analisis Data	38
3.5.	Sistematika Penulisan	39
BAB IV GAMBARAN UMUM <i>POWER PROJECTION</i> INDONESIA.....		41
4.1.	<i>Power Projection</i> Indonesia	41
4.1.1.	Respon Indonesia Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan	44
4.2.	Sejarah <i>Power Projection</i> Indonesia di Kawasan LTS di Berbagai Era Kepresidenan.....	47
4.2.1	Presiden Soekarno.....	47
4.2.2	Presiden Soeharto.....	48
4.2.3	Presiden BJ Habibie	49
4.2.4	Presiden Abdurrahman Wahid.....	50
4.2.5	Presiden Megawati.....	51
4.2.6	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.....	52
4.3.	Arti Strategis Kawasan Laut Tiongkok Selatan	54
4.3.1.	Sejarah, Budaya, dan Hubungan Bilateral antara Indonesia dan negara-negara di kawasan LTS	54



4.3.2. Kekuatan Ekonomi Kawasan LTS 63

4.3.3. Kekuatan Militer Kawasan LTS 67

4.3.4. Arti Strategis Kawasan LTS bagi Indonesia 77

BAB V IDENTIFIKASI POWER PROJECTION INDONESIA DI

KAWASAN LAUT TIONGGOK SELATAN PADA MASA

PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO 85

5.1. *Soft Military Power Projection* 86

5.1.1. *Securing Sea Lanes of Communication* 87

5.1.1.1. *Sea Security Partnership* 88

5.1.1.2. *Naval Military Joint Exercise* 94

5.1.1.3. *External Threats in SLOC* 104

5.1.2. *Non Combatan Evacuation Operation* 110

5.1.3. *Humanitarian Relief* 112

5.1.4. *Peacekeeping* 114

5.2. *Hard Military Power Projection* 116

5.2.1. *Showing The Flag* 117

5.2.2. *Compellence and Deterrence* 124

5.2.3. *Punishment* 128

5.2.4. *Armed Intervention* 133

5.2.5. *Conquest* 133

BAB VI PENUTUP 136

6.1. Kesimpulan 136

6.2. Saran 138

DAFTAR PUSTAKA 139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan 2

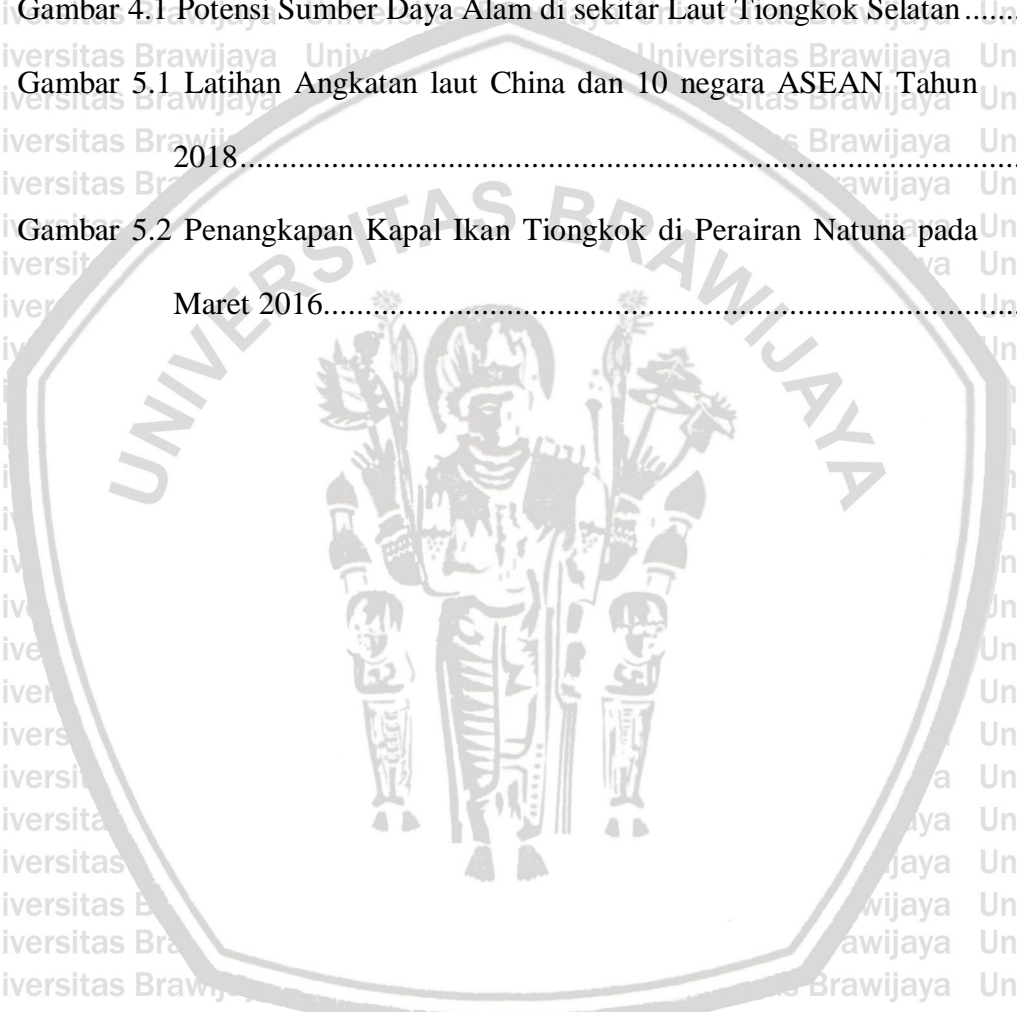
Gambar 1.2 Peta NKRI sebelum diperbaharui Tahun 2017..... 13

Gambar 1.3 Peta NKRI sesudah diperbaharui Tahun 2017 13

Gambar 4.1 Potensi Sumber Daya Alam di sekitar Laut Tiongkok Selatan 64

Gambar 5.1 Latihan Angkatan laut China dan 10 negara ASEAN Tahun
2018..... 96

Gambar 5.2 Penangkapan Kapal Ikan Tiongkok di Perairan Natuna pada
Maret 2016..... 131



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep *Military Power Projection*..... 31



DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan Darat
AL	: Angkatan Laut
ALKI	: Alur Laut Kepulauan Indonesia
APRA	: Angkatan Perang Ratu Adil
ARF	: ASEAN Regional Forum
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASG	: Abu Sayyaf Group
ASPI	: <i>Australian Strategic Policy Institute</i>
BAKAMLA	: Badan Keamanan Laut
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
CADEK	: Catur Dharma Eka Karma
CARAT	: <i>The Cooperation Afloat Readiness and Training</i>
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DIRJENHUB	: Direktorat Jenderal Perhubungan
DL	: <i>Dashed Lines</i>
DOC	: <i>Declaration on the Conduct</i>
DOD	: <i>Department of Defence</i>
DWIKORA	: Dwi (Dua) Komando Rakyat
EEZ	: <i>Exclusive Economic Zone</i>
EIA	: <i>Environmental Impact Assessment</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HUKLA	: Hukum Laut
IHO	: <i>International Hydrographical Organization</i>
IMB	: <i>International Maritime Bureau</i>
IMO	: <i>International Maritime Organization</i>



INDOMALPHIN : Indonesia, Malaysia, and *Phillipines*

INTERPOL : *International Police*

IORA : *The Indian Ocean Rim Association*

IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

IUU Fishing : *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*

JMSU : *Joint Marine Seismec Undertaking*

KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan

KRI : Kapal Republik Indonesia

KTT : Konferensi Tingkat Tinggi

LIPI : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoensia

LK : Landas Kontinen

LNU : Laut Natuna Utara

LTS : Laut Tiongkok Selatan

MILF : *Moro Islamic Liberation Front*

MNLF : *Moro National Liberation Front*

MOU : *Memorandum of Understanding*

NATO : *The North Atlantic Treaty Organization*

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

NTT : Nusa Tenggara Timur

PBB : Persatuan Bangsa Bangsa

PERMESTA : Perjuangan Semesta

PERPRES : Peraturan Presiden

PM : Perdana Menteri

PNG : *Papua New Guinea*

POLHUKAM : Politik Hukum dan HAM

POLRI : Polisi Republik Indonesia

PPRC : Pasukan Pemukul Reaksi Cepat

PSO : *Public Service Obligation*

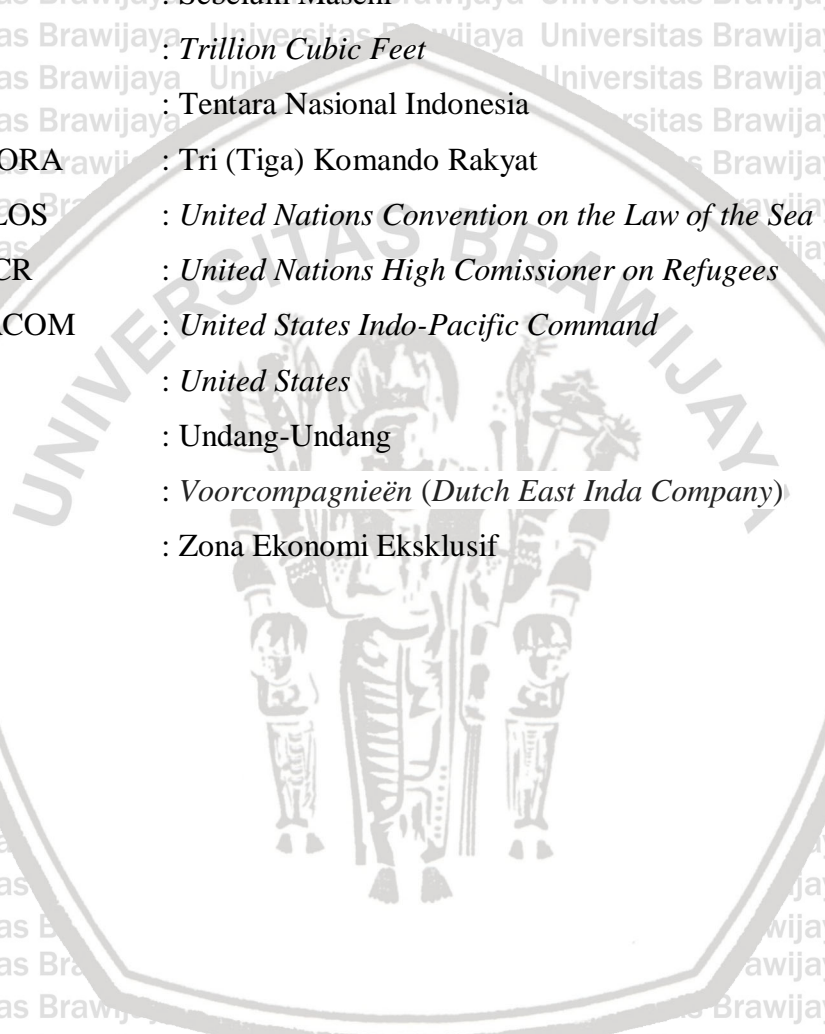
RI : Republik Indonesia

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPOA : *The Regional Plan of Action*

RRT : Republik Rakyat Tiongkok

SATGAS	: Satuan Tugas
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SDM	: Sumber Daya Manusia
SETKAB	: Sekretariat Kabinet
SLOC	: <i>Sea Lines of Communication</i>
SLOT	: <i>Sea Lines of Trade</i>
SM	: Sebelum Masehi
TCF	: <i>Trillion Cubic Feet</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRIKORA	: Tri (Tiga) Komando Rakyat
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner on Refugees</i>
USPACOM	: <i>United States Indo-Pacific Command</i>
US	: <i>United States</i>
UU	: Undang-Undang
VOC	: <i>Voorcompagnieën (Dutch East Inda Company)</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan salah satu konflik regional yang mengalami dinamika serius dan masih belum ada solusi. Konflik ini menjadi masalah, terutama bagi beberapa negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan tentu saja dengan Tiongkok yang mengklaim mayoritas kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari wilayahnya. Konflik ini bermula atas klaim sepihak Tiongkok terhadap kepemilikan mayoritas wilayah LTS. Diawali di tahun 1947, Tiongkok saat itu mengeluarkan peta Laut Tiongkok Selatan dengan *nine dashed-lines* – 9 garis putus-putus dan menyatakan bahwa wilayah yang ada di dalam garis putus-putus tersebut merupakan wilayah teritorial Tiongkok.

Sengketa ini memperebutkan kedaulatan atas laut dan wilayah di Kepulauan Paracel dan Spartly. Keduanya merupakan rangkaian kepulauan yang diklaim oleh sejumlah negara, seperti Filipina, Malaysia, dan Tiongkok. Kepulauan Paracel dan Spartly diperkirakan memiliki cadangan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, meskipun hal ini masih berdasarkan asumsi yang didasarkan pada SDA mineral di area Kepulauan Paracel dan Spartly. Tiongkok sendiri memperkirakan cadangan minyak disana sebesar 213 miliar barel atau setidaknya 10 kali lebih banyak dari cadangan milik Amerika Serikat. Namun hal ini bantah oleh ilmuwan Amerika Serikat yang memperkirakan jumlah cadangan minyak di kawasan LTS hanya sebesar 28 miliar barel. Sedangkan menurut

Energi Amerika Serikat (EIA), cadangan terbesar di kawasan Kepulauan Paracel dan Spratly adalah cadangan gas alam yang mencapai 900 triliun kaki kubik.¹ Selain memiliki SDA yang melimpah, kawasan ini juga merupakan rute utama jalur perkapalan, baik di sektor perdagangan maupun pariwisata internasional. Kawasan ini juga tempat pencarian ikan bagi ribuan penduduk di sekitar wilayah yang diperebutkan.

Gambar 1.1 Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan



Sumber: South China Sea (2011)

¹BBC. "Sengketa kepemilikan Laut Tiongkok Selatan". 21 Juli 2011. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict diakses tanggal 30 Mei 2018.



Tiongkok selalu menegaskan akan klaim *9 dash line* di kawasan LTS yang sebagian besar merupakan wilayah teritorial negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Meskipun klaim Tiongkok tidak menjorok ke laut teritorial Indonesia, namun *9 dash line* yang diklaim Tiongkok berhimpitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang biasanya digunakan para nelayan Indonesia untuk mencari ikan. Sembilan garis putus-putus ini menimbulkan sengketa antar Tiongkok dan negara-negara lain, seperti Kepulauan Spratly dan Paracel yang disengketakan oleh Vietnam, kemudian *Scarborough Reef* yang disengketakan dengan Filipina, dan di dalamnya juga ada Laut Natuna milik Indonesia.² Beijing juga menyatakan bahwa ada setidaknya 50 ribu kilometer persegi wilayah lautan yang tumpang tindih, antara laut yang diklaim Tiongkok dan Laut Natuna milik Indonesia.³ Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dengan tegas dan secara konsisten tidak mengakui adanya klaim Tiongkok di kawasan LTS yang 20% diantaranya merupakan wilayah laut Indonesia. Sebelumnya, Indonesia hanya menanggapi melalui wadah organisasi ASEAN untuk menegaskan bahwa Indonesia menolak adanya *9 dash lines* yang diklaim Tiongkok. Selama itu juga tidak terjadi adanya pelanggaran secara langsung yang dilakukan oleh Tiongkok, baik pemerintah atau rakyatnya di dalam teritorial NKRI.

Apabila ditinjau dari keberhasilan negara negara di dunia, salah satu kriteria yang menjadikan negara berada dalam posisi yang tepat menuju gelar negara ‘maju’ adalah dengan memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki oleh negaranya. Jika negara tersebut memiliki keunikan dalam budaya, maka

² Batamnews, “Mengenal 9 Garis Putus-putus Tiongkok dan Klaim Laut Tiongkok Selatan”, 22 Juni 2016, *Batamnews*, <https://www.batamnews.co.id/berita-14168-mengenal-9-garis-putusputus-tiongkok-dan-klaim-laut-china-selatan.html>, diakses tanggal 6 Desember 2018.

³ Ibid.

dapat mengambil langkah persebaran budaya yang berbentuk *soft power*, jika suatu negara memiliki sains dan teknologi yang tinggi, maka mereka dapat mengambil jalur industrialisasi dan menjadi komoditas eksportir barang berteknologi tinggi, jika negara memiliki sumber daya alam seperti minyak, maka negara tersebut dapat menjualnya ke negara lain dan menjadikan cadangan devisa negaranya, dan yang terakhir, jika suatu negara memiliki wilayah lautan yang luas, maka negara tersebut dapat mengambil jalur pembentukan dan peningkatan kekuatan angkatan laut seperti yang dialami oleh Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo, terutama ditambahnya dengan adanya klaim Tiongkok di kawasan Indonesia.

Laut merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Negara yang memiliki dan berbatasan langsung dengan laut tentunya memiliki kelebihan dibandingkan negara yang tidak memiliki dan tidak berbatasan langsung dengan laut. Hal ini dikarenakan di laut terdapat berbagai macam sumber daya alam baik dalam bentuk fauna seperti ikan yang dapat dikonsumsi dan dijual oleh negara, hingga kemungkinan terdapatnya minyak bumi yang ada di laut yang dapat diolah dan dijual kembali. Oleh sebab itu, laut harus dimaksimalkan potensinya oleh setiap negara, khususnya negara kepulauan seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang berada diantara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan benua Asia dan Australia. Masalah perbatasan darat dan laut yang selama ini belum tuntas juga mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi sulit berkembang. Selama ini, orientasi pembangunan nasional merupakan orientasi *land based development* sehingga laut hanya sebagai tempat eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam,

pembuangan limbah dan kegiatan ilegal seperti penyeludupan. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pembangunan kelautan yang dilakukan secara parsial dan tidak komprehensif. Masing-masing kementerian dan lembaga menjalankan program pembangunannya secara parsial, belum terintegrasi dan belum terkonsentrasi dalam pembangunan kelautan. Oleh sebab itu, pada masa kepemimpinan presiden Jokowi, beliau mendeklarasikan strateginya dalam mengatur dan meningkatkan aset maritim yang dimiliki oleh Indonesia dengan strateginya yang bernama *Power Projection Indonesia*.⁴

Sebelum membahas mengenai *Power Projection Indonesia* lebih dalam, penulis akan meninjau kebijakan dan strategi yang diambil oleh pemimpin terdahulu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Selama masa jabatan SBY sepanjang 10 tahun dari (20 oktober 2004 – 20 oktober 2014) SBY mempunyai strategi politik luar negeri yang unik dan khas pada masa kepemimpinannya yaitu *Millions Friends, Zero Enemies*. Kebijakan *Millions Friends, Zero Enemies* merupakan strategi yang berfokus kepada meningkatkan kerjasama Indonesia dengan negara negara yang ada melalui institusi internasional.⁵ Melalui kebijakan ini juga SBY telah membuat Indonesia lebih aktif dalam kancan internasional melalui organisasi dan institusi seperti ASEAN⁶. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pergantian kepemimpinan maka kebijakan dan fokus negara akan berubah dan bahkan bisa berubah 180 derajat dari fokus awal negara. Hal ini yang dirasakan oleh Indonesia pada saat ini, meskipun tidak berubah secara

⁴ Kartika, S.D. "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum". Jurnal Negara Hukum 5 No. 2 (2014): 1-19.

⁵ Ted Piccone dan Bimo Yusman, "Indonesian Foreign Policy : 'A Million Friends and Zero Enemies,'" *The Diplomat*, Februari 14 2014, Diakses 2 Mei 2018, <https://thediplomat.com/2014/02/indonesian-foreign-policy-a-million-friends-and-zero-enemies/>

⁶ Ibid.

keseluruhan atau total, namun kebijakan yang di implementasikan Jokowi lebih berfokus kepada penguatan infrastruktur dan domestik yaitu melalui *Power Projection* Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan serta dihimpit oleh dua Samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Sebagai negara yang dikelilingi lautan yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia, melalui perkataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, menyampaikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan akan berorientasi pada sektor kelautan. Sejak Presiden Joko Widodo, yang dikenal dengan panggilan Jokowi duduk pada tahta kepresidenan pada tahun 2014, beliau melihat sudah saatnya bagi Indonesia untuk memfokuskan pandangannya pada sektor kelautan. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Myanmar pada tahun 2015, Presiden Jokowi menunjukkan tekadnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Gagasan tersebut didasari atas pandangan beliau yang memandang bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mampu mewujudkan tekadnya untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan strategi *Power Projection* Indonesia. Pada forum tersebut Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa KTT berperan penting dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ekonomi serta kemakmuran pada kawasan.⁷

Presiden Jokowi juga merancang lima pilar yang harus dilaksanakan demi mewujudkan cita-citanya. Pilar pertama menjelaskan mengenai pembangunan kembali budaya maritim Indonesia yang sudah mulai pudar di masyarakat. Pilar kedua membahas mengenai komitmen dalam menjaga serta mengelola sumber

⁷Presiden RI, "Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," 1 Mei 2018, <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>, diakses tanggal 1 Mei 2018.

daya laut dimana prioritas utama terletak pada kesejahteraan nelayan. Pilar ketiga membicarakan mengenai komitmen dalam mengembangkan infrastruktur laut serta membangun konektivitas melalui pembangunan-pembangunan seperti tol dan pelabuhan laut. Pada pilar ini juga menggambarkan pentingnya pariwisata laut di Indonesia. Pilar keempat kemudian menjelaskan terkait *blue diplomacy* atau diplomasi maritim yang akan dilakukan bersama mitra-mitra dari Indonesia itu sendiri. Pada pilar terakhir, memfokuskan pada pertahanan maritim yang harus diperkuat.⁸

Pada 2017, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa terdapat tujuh pilar yang menjadi dasar kebijakan lautan Indonesia. Pilar pertama membahas mengenai pengelolaan sumberdaya kelautan dan pengembangan sumberdaya manusia. Pilar kedua memfokuskan pada pertahanan, keamanan, penegakkan hukum dan keselamatan dilaut. Pilar ketiga membahas terkait tata kelola dan kelembagaan kelautan. Pilar keempat menjelaskan masalah ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. Pilar kelima membahas mengenai pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut. Pilar keenam menjelaskan mengenai budaya bahari serta pilar ketujuh mengenai diplomasi maritim.⁹ PerPres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi seakan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan *Power Projection* Indonesia.. Dapat dilihat juga bahwa tujuh pilar tersebut juga kurang

⁸Kementrian Komunikasi an Informatika Republik Indonesia “Menuju Poros Maritim Dunia,” 1 Mei 2018, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses tanggal 1 Mei 2018.

⁹ Presiden RI “Indonesia Poros Maritim Dunia, 1 Mei 2018, <http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/20171018-Kemenko-Maritim-3th-Jokowi-JK-cetak.pdf>, diakses tanggal 1 Mei 2018.

lebih sama dengan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Jokowi pada KTT Asia Timur pada tahun 2015.

Cita-cita Presiden Jokowi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang memiliki strategi *Power Projection* Indonesia yang didukung oleh beberapa rancangan lainnya, menunjukkan arah geopolitik pemerintahan Presiden Jokowi yang melihat pentingnya pemanfaatan serta pengelolaan *seapower*. Beliau tidak secara spesifik berbicara akan hal tersebut, namun dari tujuh pilar yang kemudian dikeluarkan melalui PerPres-nya menunjukkan aksi nyata dari Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi yang mewakili Indonesia dalam berbagai forum Regional maupun Internasional kemudian menyampaikan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan *Power Projection* Indonesia yang beliau ingin wujudkan. Salah satu hal yang menarik terjadi pada KTT-ASEAN India pada pertengahan Januari 2018, dimana Presiden Jokowi membahas mengenai konsep Indo-Pasifik. Konsep Indo-Pasifik memang bukanlah konsep baru, namun Presiden Jokowi sebagai pemimpin dari Indonesia, yang kemudian meletakkan konsep tersebut kedalam agenda politiknya dalam forum regional merupakan hal yang baru. Hal tersebut juga menunjukkan bagaimana Indonesia yang pada akhirnya menggunakan *the term of Indo-Pacific* pada ranah Internasional.¹⁰

Pembentukan strategi *Power Projection* Indonesia ini juga dapat dinilai sebagai upaya Indonesia untuk mempertahankan wilayah kedaulatan di kawasan.

Dalam tahun-tahun terakhir, Indonesia memiliki ketegangan mengenai perbatasan wilayah dengan beberapa negara. Salah satu ketegangan yang terjadi adalah antara

¹⁰Natalia Santi, "Jokowi Perkenalkan Konsep Indo-Pasifik di KTT ASEAN-India," *CNN Indonesia*, 1 Mei 2018, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180126074522-113-271697/jokowi-perkenalkan-konsep-indo-pasifik-di-ktt-asean-india>, diakses tanggal 1 Mei 2018.

Indonesia dan Tiongkok yang terjadi di tahun 2016, dimana kapal *Kway Fey* yang berbendera Tiongkok memasuki wilayah perairan Indonesia yang sesuai dengan ZEE dan diduga melakukan *illegal fishing*, namun ketika KRI ingin melakukan penangkapan, kapal pengawas Tiongkok muncul dan mulai ikut campur akan konflik antara nelayan Tiongkok dengan polisi laut Indonesia.¹¹

Tiga bulan selang kejadian tersebut, tepatnya pada Juni 2016, 12 kapal asing diketahui telah memasuki wilayah perairan Natuna, NKRI. Kejadian ini mengakibatkan pengejaran kedua belas kapal asing tersebut oleh KRI Perang TNI AL Imam Bonjol-383, namun saat diperintah untuk menyerahkan diri, kedua belas kapal asing tersebut kabur sehingga memaksa polisi laut Indonesia untuk melakukan tembakan peringatan yang ternyata mengenai salah satu dari kapal Tiongkok. Kejadian ini mengakibatkan kecaman yang cukup keras dari Tiongkok terhadap Indonesia yang mengakibatkan hubungan kedua negara kembali memanas. Alasan Pemerintah Tiongkok memperbolehkan kapal dan nelayannya untuk mencari ikan atau sumber daya di perairan Natuna tidak lain adalah didasari adanya *traditional fishing ground* yang dipercaya Tiongkok mencakup sebagian besar wilayah LTS, yang ternyata juga tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengemukakan bahwa kepemilikan serta hak atas pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di wilayah kepulauan dan perairan Natuna, Indonesia tidak dapat diganggu gugat. Indonesia telah terlebih dahulu menyatakan wilayah perbatasannya dalam Deklarasi Juanda 1957 dan juga telah didaftarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun

¹¹ Anggi Kusumadewi, "Perairan Natuna, 'Medan Tempur' Indonesia-China," *CNN Indonesia*, 30 Mei 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620170157-20-139564/perairan-natuna-medan-tempur-indonesia-china>. Diakses tanggal 30 Mei 2018

2009 sesuai Konvensi Hukum Laut 1982. Semenjak kedua kejadian tersebut dengan Tiongkok terkait wilayah perairan Natuna, Indonesia kemudian mengerahkan armada keamanan laut yang dimiliki untuk mengamankan perairan Natuna. Setidaknya 14 kapal perang Indonesia dipersiapkan di wilayah perairan Natuna untuk mengawasi daerah perbatasan.¹²

Laut Natuna terletak di sebelah Utara perairan Indonesia, lebih tepatnya berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dan Malaysia. Laut Natuna ini dianggap sangat penting perannya dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tidak hanya kaya akan sumber daya ikan, namun juga kaya akan *natural resources* seperti gas alam, minyak dan sebagainya. Cadangan minyak bumi pada Laut Natuna mencapai angka 298,81 juta barel minyak, sedangkan cadangan gas bumi mencapai 55,3 triliun kaki kubik. Cadangan minyak dan gas bumi tersebut juga diperkirakan bisa mencapai 50-100 tahun. Hal tersebut membuat Natuna menjadi daerah yang memiliki cadangan gas dan minyak terbesar yang pernah ditemukan oleh Indonesia. Kabupaten Natuna memiliki 154 Pulau dan beberapa pulau memiliki potensi yang sangat fenomenal. Potensi yang paling besar berada pada ladang gas Blok D-Alpha dengan mencapai 222 triliun kaki kubik, membuat Natuna menjadi salah satu sumber migas terbesar di Kawasan Asia.¹³

Letaknya yang bersebelahan dengan Laut Tiongkok Selatan membuat Laut Natuna berada di wilayah yang rawan akan konflik perbatasan, melihat posisi Laut Natuna juga sebagai batas perairan terluar dari Indonesia. Pemerintah

¹² Tulika Bhatnagar, "Mengapa Indonesia menambah kekuatan militer di Natuna?", *BBC News*, 30 Mei 2018, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230_dunia_indonesia_natunadiakses tanggal 30 Mei 2018

¹³ Anugerah Perkasa, "Laut Natuna Jadi Sumber Migas Asia", *CNN Indonesia*, 4 Januari 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623134311-20-140387/laut-natuna-jadi-sumber-migas-asia> diakses tanggal 4 Januari 2019.

Tiongkok bahkan pernah menyampaikan bahwa Laut Natuna masih berada pada wilayah LTS. Hal tersebut menuai kontroversi dari kedua belah pihak. Memang hanya sekitar 20% dari Laut Natuna yang diklaim sebagai bagian dari Laut Tiongkok Selatan, tidak sebanyak Laut Brunei yang mencapai angka 90%, tetap saja hal tersebut menandakan adanya klaim atas wilayah Indonesia yang berdaulat. Permasalahannya terletak pada dua hal yaitu klaim atas Laut Natuna pada 2014 dan masuknya 12 kapal ikan Tiongkok ke perairan Indonesia pada 2016.¹⁴

Pada Juli tahun 2017, Penamaan laut ini lebih tepatnya berada pada utara dari Kepulauan Riau. Perubahan nama *Laut Natuna Utara (LNU)* ke PBB menuai protes dari Tiongkok yang merasa Natuna Utara sebagai bagian dari Laut Tiongkok Selatan. Penamaan Laut Natuna Utara ini diawali oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang merilis peta pembaruan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 14 Juli 2017. Lewat Peta baru ini ada sejumlah perubahan terkait dengan batas wilayah NKRI. Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab), Pemerintah melalui koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim akhirnya telah menyelesaikan pembaharuan Peta NKRI yang pembahasannya telah dilakukan sejak bulan Oktober 2016.¹⁵ Perubahan Peta NKRI 2017 terdapat pada beberapa titik, salah satunya berada di Kawasan Perairan Natuna. Dalam Peta NKRI 2017,

zona bagian utara Laut Natuna kini bernama *Laut Natuna Utara*. Di peta lama,

¹⁴ Anggi Kusumadewi, "Perairan Natuna, 'Medan Tempur' Indonesia-China," *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620170157-20-139564/perairan-natuna-medan-tempur-indonesia-china> diakses tanggal 4 Januari 2019.

¹⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Tegaskan Batas Wilayah NKRI, Pemerintah Terbitkan Peta Mutakhir", 14 Juli 2017, <http://setkab.go.id/tegasan-batas-wilayah-nkri-pemerintah-terbitkan-peta-mutakhir/>, diakses tanggal 9 Januari 2018.

laut Natuna diberikan untuk garis laut teritorial dan laut kepulauan saja. Padahal, selama ini telah terdapat sejumlah kegiatan eksplorasi migas di laut tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Berikut merupakan perbandingan antara Peta NKRI sebelum diperbarui dan Peta NKRI yang telah diperbarui. Dibawah terdapat gambar 1.2 yang merupakan Peta NKRI sebelum diperbarui di kawasan Natuna dan gambar 1.3 merupakan Peta NKRI yang telah diperbarui di tahun 2017.

Gambar 1.2 Peta NKRI sebelum diperbaharui Tahun 2017



Sumber: Badan Informasi Geospasial (2017)

Gambar 1.3 Peta NKRI sesudah diperbaharui Tahun 2017



Sumber: Badan Informasi Geospasial (2017)

Peta NKRI 2017 telah ditanda-tangani oleh pejabat dari 21 kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemenko Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan.

Ada juga pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, TNI-AL, Pusat Hidrografi & Oseanografi TNI-AL, POLRI, Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).¹⁶

Indonesia memiliki empat faktor yang mendasari pembaharuan Peta NKRI Tahun 2017. Faktor-faktor yang mendasari adanya perubahan peta diantaranya adalah:

1. Adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yaitu antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur.
2. Adanya perjanjian batas ZEE antara Indonesia dan Filipina yang sudah di sepakati bersama dan sudah diratifikasi.
3. Adanya keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang kecil yang berada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Oleh karena itu beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia hanya diberikan batas 12 mil laut.

¹⁶ Oknusantara, "Perbedaan Peta Lama dengan Peta Baru", <http://oknusantara.com/perbedaan-peta-lama-dengan-peta-baru-indonesia-detail-52762.html> diakses tanggal 17 Januari 2019.

4. Inginnya pemerintah RI mempertegas klaim di Selat Malaka, dengan simplifikasi klaim garis batas sehingga dapat mempermudah penegakan hukum.¹⁷

Atas berubahnya nama perairan Indonesia bagian utara menjadi Laut Natuna Utara, Pemerintah Tiongkok melakukan protes. Meskipun Indonesia dan Tiongkok mengalami konflik atas kasus Laut Natuna Utara, Tiongkok dan Indonesia juga memiliki hubungan yang baik di bidang ekonomi. Di Indonesia sendiri, Tiongkok memiliki pengaruh di bidang ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki Indonesia dengan Amerika Serikat. Saat pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami penurunan pada tahun 2016, ekonomi Indonesia juga mengalami perlambatan sebesar 0,72%.¹⁸ Hal ini membuktikan bahwa Tiongkok merupakan salah satu partner Indonesia di bidang ekonomi yang penting dan berpengaruh.

Pembahasan mengenai strategi *Power Projection* Indonesia ini menjadi sangat menarik, karena merupakan kebijakan Indonesia yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang sebelumnya sudah pernah diterapkan sebelum era kemerdekaan dalam bentuk hubungan kerja sama antar negara dalam hal ini berbentuk hubungan perdagangan. Dalam strategi *power projection* yang akan penulis gunakan dalam penelitian, penulis akan meneliti apakah strategi *power projection* akan cenderung mengarah dalam *soft military power projection* atau *hard military power projection*. Untuk saat ini, belum dapat menyimpulkan apakah Indonesia memiliki kecenderungan untuk menggunakan *soft military*

¹⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Tegaskan Batas Wilayah NKRI, Pemerintah Terbitkan Peta Mutakhir". 14 Juli 2017. <http://setkab.go.id/tegaskan-batas-wilayah-nkri-pemerintah-terbitkan-peta-mutakhir/> diakses tanggal 9 Januari 2018.

¹⁸ Estu Suryowati, "Pengaruh China terhadap Perekonomian RI Lebih Besar Ketimbang AS," *Kompas*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/15/162639526/pengaruh.china.terhadap.perekonomian.ri.lebih.besar.ketimbang.as> diakses tanggal 4 Januari 2019.

power projection atau *hard military power projection*. Penulis akan menjabarkan lebih lanjut mengenai *soft military power projection* dan *hard military power projection* dalam operasionalisasi konsep penelitian yang merupakan klasifikasi dari konsep *military power projection*.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penjabaran latar belakang diatas adalah:

Bagaimana identifikasi *Power Projection* Indonesia di kawasan Laut Tiongkok Selatan pada masa pemerintahan Joko Widodo?

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui identifikasi proyeksi kekuatan Indonesia di Kawasan Laut Tiongkok Selatan.
- b. Mengetahui proses dan pembentukan kerjasama serta pendekatan yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang juga memiliki konflik terkait Laut Tiongkok Selatan.
- c. Mengetahui peluang dan ancaman yang akan diperoleh Indonesia dalam menanamkan pengaruhnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat keilmuan dan manfaat praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Keilmuan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk referensi kajian ilmu sosial dan ilmu politik, terutama dalam kajian ilmu hubungan internasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai pokok permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama memberikan wawasan yang preposisi bagi para peneliti dan akademisi khususnya di bidang ilmu hubungan internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih penelitian melalui sudut pandang baru dalam pengayaan ilmu hubungan internasional.
- b. Diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan fenomena yang terjadi.
- c. Dapat mengetahui dinamika hubungan antar negara yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain dalam pembuatan kebijakan hingga implementasinya di masing-masing negara.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Studi Terdahulu

Penulis menggunakan dua artikel dalam jurnal sebagai rujukan studi terdahulu. Dengan memanfaatkan referensi yang penulis gunakan, penulis berharap kedua studi terdahulu yang penulis gunakan akan membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian penulis. Kemiripan dalam hal pembahasa, tema, penggunaan teori hingga jawaban dari kedua referensi akan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pertama, penulis menggunakan jurnal penelitian “*Australia as a Southern Hemisphere Power*”, yang merupakan tulisan dari Benjamin Reilly dan telah dipublikasikan oleh *Australian Strategic Policy Institute (ASPI)*. Tulisan ini menjelaskan mengenai proyeksi kekuatan Australia di sektor ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri yang lebih berfokus di Kawasan Asia, Eropa, dan Amerika Utara saat ini telah berubah, dimana fokus dari kekuatan ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri Australia lebih diarahkan pada *Southern Hemisphere* yaitu Afrika, Amerika Selatan, Indonesia, Antartika, dan Barat Daya Pasifik. Bentuk dari proyeksi kekuatan Australia juga berubah dari yang bersifat *Hard Power* menjadi *Soft Power* dimana Australia menekankan implementasi kekuatan dalam bentuk bantuan (*aid*), perdagangan (*trade*), ilmu pengetahuan (*science*), Olahraga (*sport*), dan pendidikan (*education*).¹⁹

¹⁹ Benjamin Reilly, *Australia as a Southern Hemisphere Power*, ASPI Australian Strategic Policy Intitute, (2013) : 1-3.

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi Australia merubah proyeksi kekuatannya pada kawasan *Southern Hemisphere*. Pertama, Paska perang dunia II, Australia tidak lagi negara dominan dalam hal ekonomi dan keamanan. Terlebih negara-negara kawasan Asia yang berdekatan dengan Australia semakin maju dalam hal ekonomi dan keamanan. Seperti Indonesia yang merupakan negara tetangga Australia yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan militer yang pesat dan menyaingi Australia. Sedangkan Amerika Serikat sebagai aliansi utama Australia tidak lagi menonjolkan militer dan mengalami penurunan dalam hal ekonomi. Kedua, di Kawasan Pasifik, hanya Selandia Baru yang termasuk dalam *Top 10 Trade Partnership* dengan Australia sehingga dengan melihat hal tersebut, Australia mencari kesempatan dimana Australia dapat menanamkan dominasi dan pengaruhnya di Kawasan *Southern Hemisphere*.²⁰

Tulisan ini juga telah diberikan beberapa data pendukung yang menunjukkan perubahan proyeksi *Soft Power* Australia di Kawasan *Southern Hemisphere*. Hal ini terbukti dari distribusi bantuan luar negeri Australia yang sebagian besar mengarah pada Kawasan Amerika Latin dan Afrika. Selain itu, Australia juga memiliki hubungan dan kerjasama perdagangan yang semakin baik dengan kawasan itu. Satu tahun hubungan perdagangan Australia dengan negara-negara tersebut menghasilkan keuntungan hingga US \$ 6 miliar, dengan pertumbuhan 12% hingga satu tahun. Bentuk *Soft power* lainnya adalah pengerahan pasukan *peacekeeping* di bawah PBB yang dilakukan Australia di Kawasan *Southern Pacific*. Jenis lain *soft power projection* dari Australia lainnya adalah kerjasama keilmuan dalam bidang antariksa dengan Afrika Selatan,

²⁰Ibid hal 4.

kemudian memperluas koneksi antar *people to people* melalui bantuan pendidikan (*scholarships*) serta memperluas *non commercial air services* dari Sydney ke negara Kawasan *Southern Hemisphere* lainnya.²¹

Research position penulis pada studi terdahulu ini terletak pada persamaan dalam pengambilan konsep analisa yaitu konsep *power projection*. Perbedaan terletak pada jenis *power* yang digunakan, dimana dalam tulisan ini menggunakan *soft power projection* yang sebagian besar tidak menggunakan kekuatan militernya. Meskipun jenis proyeksinya berbeda, namun penulisan ini dapat memberikan gambaran baru bagi penulis dalam menyajikan operasionalisasi konsep, dimana mencantumkan perbandingan data dari tahun dan negara yang berbeda. Sehingga penulis mampu melihat tingkat urgensi dari wilayah tersebut sebagai target dan jenis proyeksi apa saja yang digunakan.

Selain itu, sebagai *output* dari tulisan ini, penulis juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Australia, terkait proyeksi kekuatannya di Australia. Hal ini memberikan penulis gambaran untuk menganalisa kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan Indonesia dalam mengimplementasikan strategi *power projection* terhadap Tiongkok. Terlebih kebijakan Jokowi mengarah kepada Tiongkok, serta bagaimana Jokowi mengatasi klaim Laut Tiongkok Selatan yang setidaknya mengambil sebagian wilayah Indonesia.

Studi terdahulu yang kedua ditulis oleh Aaron L. Connelly. Artikel dalam jurnal ini berjudul *Indonesia di Laut Tiongkok Selatan: Berjalan sendiri*.²² Tulisan

²¹Ibid hal 5-7

²²Aaron Connelly, "Indonesia di Laut Tiongkok Selatan: Berjalan sendiri.", (2017), <https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Indonesia%20di%20Laut%20Cina%20Selatan.pdf>, diakses tanggal 8 September 2018

ini merupakan sebuah penelitian yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan Joko Widodo terkait Laut Tiongkok Selatan. Pemilihan studi terdahulu kedua ini dikarenakan adanya kesamaan konteks, namun dengan pembahasan yang berbeda. Aktor dari penelitian ini adalah Presiden Joko Widodo dengan kebijakan-kebijakan yang telah diambil serta diimplementasikan terkait klaim Tiongkok di Kawasan Laut Tiongkok Selatan.²³

Pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada kebijakan Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi dalam memperkuat posisi Indonesia di Kepulauan Natuna yang selama ini dijalankan secara unilateral. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai kontesasi Indonesia di kawasan sebelum dan saat pemerintahan Jokowi. Hasilnya, Jokowi dinilai belum menjalankan peran kepemimpinan yang efektif dalam organisasi ASEAN terkait isu Laut Tiongkok Selatan.²⁴ Jurnal ini juga menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa Jokowi belum dapat mengoptimalkan peran kepemimpinan di ASEAN, diantaranya adalah (1) Sikap tidakberpihakan Indonesia terhadap negara-negara adikuasa yang telah lama menjadikan Indonesia menjadi negara skeptis, (2) Jokowi sendiri merasa skeptis akan manfaat dari pertemuan diplomasi tingkat tinggi (*summitdiplomacy*), dan (3) Jokowi ingin mempertahankan hubungan baik dengan Tiongkok karena Tiongkok merupakan sasaran target investasi-investasi proyek infrastrukturnya.²⁵

Fokus dari studi terdahulu ini adalah analisis kebijakan Jokowi terhadap Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan yang diciptakan secara unilateral dan *interest* Jokowi sendiri untuk memajukan investasi dan infrastruktur. Berdasarkan penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai

²³ Ibid.

²⁴ Ibid. hal 15.

²⁵ Ibid.

pembuatan kebijakan luar negeri beserta alasan-alasan dikeluarkannya sebuah kebijakan luar negeri hingga perannya terhadap isu tertentu. Sesuai dengan studi kasus yang diangkat dalam studi terdahulu, sebuah kebijakan luar negeri merupakan sebuah kebijakan yang diangkat dengan melalui analisis yang kompleks, mempertimbangkan aspek orientasi politik pembuat kebijakan, ekonomi, budaya, dan kondisi masyarakat.

Research Position penulis dari studi terdahulu kedua adalah dengan melihat dari sisi Indonesia, terutama kebijakan yang mengacu pada Kawasan Laut Tiongkok Selatan yang memiliki kesamaan aktor dengan kasus yang berkaitan. Strategi-strategi kebijakan yang telah dijabarkan dalam studi terdahulu ini membantu penulis, karena berkaitan dengan topik yang penulis ambil, yaitu Strategi Indonesia dengan penamaan Laut Natuna Utara di Kawasan Laut Tiongkok Selatan melalui *Power Projection*. Selain itu karena memiliki konteks yang sama, dalam studi terdahulu ini sebenarnya dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan konsep yang sedang penulis pakai, yaitu *Power Projection*.

2.2. Konsep Proyeksi Kekuatan (*Power Projection*) menurut Walter Ladwig

Power Projection atau Proyeksi Kekuatan dapat diartikan sebagai kemampuan dari sebuah negara untuk menggunakan semua atau sebagian elemen kekuatan nasionalnya, baik dalam bentuk politik, ekonomi, maupun militer yang dimana secara efektif dapat menyebarkan dan mempertahankan kekuatan di suatu wilayah (*pivot point*) yang menjadi sasaran negara tersebut. Pengaruh yang diberikan melalui strategi *Power Projection* ini dapat dilakukan dengan menggunakan ancaman, seperti halnya dengan menggunakan kekuatan militer.

Pengaruh yang digunakan merupakan jangkauan yang dicapai oleh sebuah negara dalam memproyeksikan kekuatan militernya.

The U.S. Department of Defense (DoD) dalam tulisan Walter Ladwig mendefinisikan *power projection* secara lebih luas, yaitu sebagai kemampuan sebuah negara dalam menjalankan beberapa elemen dari kekuatan nasionalnya, baik di bidang politik, ekonomi, informasi, ataupun militer. Negara tersebut secara cepat dan efektif akan menyebarkan serta mempertahankan pasukan di beberapa lokasi sebagai bentuk respon dari krisis yang terjadi. Sehingga dengan *power projection* dapat mencegah krisis dan meningkatkan stabilitas regional.²⁶

2.3. Definisi Konseptual

Dalam tulisan *India and Military Power Projection* dari Walter C. Ladwig, *power projection* dibedakan menjadi dua jenis menurut dari caranya, yaitu *soft power projection* dan *hard power projection*. Dalam pembahasannya, ada sembilan yang merupakan *soft power projection* dan *hard power projection*. Jenis *soft power projection*, diantaranya adalah (1) *Securing Sea Lanes of Communication*, (2) *Non-Combatant Evacuation Operations*, (3) *Humanitarian Responses*, dan (4) *Peacekeeping*. Sedangkan untuk kategori *hard power projection* terdiri dari (1) *Showing The Flag*, (2) *Compellence/Deterrence*, (3) *Punishment*, (4) *Intervention*, dan (5) *Conquest*.²⁷ Hal ini dijadikan penulis sebagai alasan yang kuat, sehingga penulis menggunakan konsep *power projection* yang dikemukakan

oleh Walter Ladwig. Karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Indonesia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2016,

²⁶ Walter C. Ladwig, "India and Military Power Projection". (2008), www.walterladwig.com/Articles/India%20Power%20Projection.pdf diakses tanggal 7 Januari 2019.

²⁷ Ibid.

2017, dan 2018 dalam menerapkan kebijakan dan strategi di kawasan Laut Tiongkok Selatan melalui kekuatan militernya dengan fokus keamanan.

2.3.1 Sembilan Jenis *Military Power Projection* menurut Walter Ladwig

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing jenis *power projection*.

Sebagai negara yang memiliki strategi *power projection* negara tersebut harus menunjukkan seluruh jenis untuk dapat menghasilkan *power projection* yang optimal. Hal tersebut sesuai pendapat Walter C. Ladwig dalam tulisan yang berjudul *India and Military Power Projection*:

1) *Securing Sea Lanes Communication.*

Perdagangan merupakan hal yang paling kritis dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara., sehingga hal ini menjadikan jalur laut sebagai salah satu klasifikasi yang sangat strategis. Munculnya kasus pembajakan laut menjadikan keamanan laut atau *sea lanes* sebagai salah satu aspek yang harus diprioritaskan. Jalur laut yang dilindungi tidak hanya untuk suatu negara, namun seluruh negara yang memanfaatkan laut sebagai jalur perdagangan maupun sebagai tujuan transit antar negara. *Securing Sea Lanes Communication* merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi wilayah kelautannya.

2) *Non-Combatant Evacuation Operations.*

Merupakan sebuah operasi militer, yang dilakukan untuk mengevakuasi para pengungsi dari negara lain yang sedang mengalami perang antar negara.

3) *Humanitarian Response.*

Kekuatan sebuah militer yang digunakan sebagai bentuk dari kemanusiaan. Kasus yang paling sering terjadi adalah bencana alam. Dalam *humanitarian response*, sebuah negara akan membantu negara lain dalam mengevakuasi dan penyediaan kebutuhan hidup utama seperti halnya air bersih.

4) *Peacekeeping.*

Merupakan sebuah operasi militer yang dilakukan untuk mendukung supaya diplomasi, agar tercipta kondisi politik yang aman dan kondusif antar negara.

5) *Showing the flag.*

Merupakan bentuk simbol dari penempatan kekuatan militer di sebuah wilayah dengan tujuan untuk kepentingan politik, memberikan solusi terkait sebuah permasalahan negara, dan keinginan untuk menunjukkan aksi nyata dari kekuatan militernya.

Dengan menjalankan *showing the flag* ini, akan berhasil memberikan tanda-tanda dari ketertarikan suatu negara terhadap suatu wilayah.

6) *Compellence/Deterrence.*

Merupakan penggunaan kekuatan militer sebagai sebuah ancaman bagi negara lain, baik dalam keadaan siap melawan maupun menghalang kekuatan lawan. Dalam bentuk ini, *power projection* bertindak sebagai alat diplomasi, yang bertujuan untuk merubah atau mempengaruhi pembuatan keputusan oleh aktor internasionala.

Diplomasi yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai *coercive diplomacy*.

7) *Punishment*.

Merupakan penggunaan kekuatan dengan cara memberikan hukuman kepada pihak lawan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Misalnya sebuah negara yang melewati batas negara lain tanpa izin, maka negara pemilik wilayah berhak untuk memberikan hukuman (*punishment*) sesuai dengan kebijakan yang berlaku di negara tersebut.

8) *Intervention*

Merupakan penggerakan kekuatan militer ke dalam wilayah negara lain, dengan tujuan untuk mempengaruhi kondisi internal dari negara tersebut, dengan kata lain adalah penaklukan secara langsung dari dalam negara tersebut.

9) *Conquest*.

Merupakan penggunaan aset-aset militer dengan tujuan untuk mengambil alih wilayah yang telah diakui atau dikuasai oleh negara lain secara paksa.

2.4. Operasionalisasi Konsep

Power Projection dalam konsep geopolitik menjadi sebuah strategi yang digunakan atau diarahkan terhadap suatu regional tertentu. Bermula dari konsep ini, Indonesia juga memiliki strategi untuk mengatasi beberapa wilayah yang diakui oleh Tiongkok dengan kerjasama dengan negara-negara lain di Kawasan

Asia Tenggara, khususnya di bidang militer dan keamanan. Dengan adanya kebijakan tersebut, Indonesia secara tidak langsung diharuskan untuk melindungi wilayah kelautannya di kawasan tersebut, berikut dengan sumber daya laut yang ada di dalamnya.

Strategi yang dilakukan Indonesia berfokus pada proyeksi kekuatan militer Indonesia di Kawasan Laut Natuna Utara. Proyeksi kekuatan ini merupakan cara Indonesia untuk menolak klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan, terutama yang bertindihan dengan wilayah Indonesia. Sebagai negara yang konvensional, Indonesia lebih sering menempatkan kekuatan militernya untuk misi kemanusiaan ataupun kerjasama antar militer. Dalam proyeksi kekuatan militer, menurut Walter Ladwig, seperti yang telah dijelaskan diatas dibagi menjadi dua jenis klasifikasi, yaitu *soft military power projection* dan *hard military power projection*.

Klasifikasi pertama merupakan *Soft military power projection* yang didalamnya terdapat empat identifikasi yang masing-masing identifikasi juga memiliki definisi.

1. *Securing Sea Lanes Communication*.

Identifikasi pertama merupakan *Securing Sea lanes communication*.

Definisi dalam identifikasi ini diantaranya adalah *Sea Security*

Partnership, Naval Military Joint Exercise, dan External threat in Sea

Lines Communication (SLOC). Operasionalisasi penelitian penulis

dalam identifikasi ini, penulis menggunakan definisi-definisi yang

dinilai sesuai dengan identifikasi-identifikasi yang ada. Diantaranya

adalah bagaimana operasi keamanan Indonesia di wilayah laut,

kususnya di wilayah Laut Natuna Utara, adanya militer gabungan angkatan laut Indonesia dengan negara lain yang berada dalam sengketa LTS, dan Ancaman-ancaman apa sajakah yang didapat dari asing.

2. *Non-Combatant Evacuation Operations.*

Identifikasi kedua dalam klasifikasi *soft military power projection* adalah *non-combatant evacuation operations* yang memiliki definisi *Military operations for evacuating civilians in foreign country.*

Sedangkan operasionalisasi konsep yang akan penulis gunakan adalah adanya Perang saudara yang terjadi kawasan sengketa serta operasi militer Indonesia yang mengevakuasi korban perang saudara di kawasan LTS. Dalam *humanitarian response*, sebuah negara akan membantu negara lain dalam mengevakuasi dan penyediaan kebutuhan hidup utama seperti halnya air bersih.

3. *Humanitarian Relief.*

Identifikasi ketiga dalam klasifikasi ini merupakan *Humanitarian Relief* dengan definisi *Military assistance for natural disaster.*

Sedangkan operasionalisasi konsep yang penulis gunakan adalah Jumlah militer Indonesia yang dikirim untuk menyediakan bantuan darurat di negara-negara yang terletak di kawasan LTS serta banyaknya bencana alam yang terjadi dan jumlah pasukan Indonesia yang telah dikirim untuk membantu.

4. *Peacekeeping.*

Merupakan Identifikasi terakhir dalam konsep ini adalah *Peacekeeping* yang memiliki definisi *an military operation to support diplomatic efforts*. Sedangkan operasionalisasi yang penulis gunakan dalam identifikasi dan definisi ini adalah pengerahan tentara Indonesia untuk membantu masalah-masalah diplomatik di negara-negara yang terletak di Kawasan LTS dan keterlibatan militer Indonesia dalam hal diplomatik dengan negara-negara di Kawasan LTS.

Klasifikasi kedua yang ditawarkan oleh Ladwig dalam *Military power projection*nya adalah *hard military power projection* yang didalamnya terdapat lima identifikasi yang juga terdapat definisi-definisinya.

1. *Showing The Flag*

Identifikasi pertama dalam konsep *hard military power projection* adalah *Showing the Flag*. Definisi dari identifikasi ini adalah *Military deployment in disputed region*, sehingga penulis menggunakan operasionalisasi konsep penempatan militer Indonesia di kawasan yang disengketakan dan adanya simbol-simbol militer yang ditempatkan Indonesia untuk mengeklaim suatu wilayah di kawasan.

2. *Compellence and Deterrence*

Identifikasi kedua dalam klasifikasi ini adalah *Compellence and Deterrence* dengan definisi *used military for coercive diplomacy to influence the decision making*. Penulis dalam identifikasi dan definisi ini mengoperasionalkan Pengerahan militer Indonesia untuk mengancam pembuatan kebijakan Tiongkok dalam perdebatan wilayah LTS.

3. *Punishment.*

Identifikasi ketiga dalam *hard military power projection* adalah

Punishment dengan definisi *punishment given to another country who*

breaks the rule inside the territory. Penulis menggunakan

operasionalisasi konsep hukuman-hukuman apa saja yang telah

diberikan Indonesia terhadap negara lain apabila ada pihak yang

melanggar di wilayah kedaulatan Indonesia serta ada atau tidaknya

negara asing yang melanggar aturan domestik Indonesia.

4. *Armed Intervention.*

Identifikasi keempat dalam klasifikasi ini adalah *Armed Intervention*

dengan definisi *Military deployment inside territory of another state to*

influence other state's internal affairs, dengan operasionalisasi konsep

pengerahan militer Indonesia di dalam wilayah negara lain sehingga

mempengaruhi urusan internalnya.

5. *Conquest.*

Identifikasi terakhir dalam klasifikasi ini adalah *Conquest* dengan

definisi *an offensive military to occupy claimed territory by another*

state. Operasionalisasi yang akan penulis gunakan dalam definisi ini

adalah pengerahan aset-aset militer Indonesia untuk menduduki secara

paksa wilayah yang diklaim negara lain sehingga wilayah tersebut

menjadi milik Indonesia.

Agar lebih mudah untuk dipahami, berikut merupakan tabel penjelasan dari operasionalisasi konsep yang akan penulis gunakan untuk membantu proses penelitian upaya dan pola Indonesia dalam mengarahkan *power projection* ke negara-negara Kawasan Laut Tiongkok Selatan dan Tiongkok melalui penamaan Laut Natuna Utara.



Tabel 2.1: Operasionalisasi Konsep *Military Power Projection*

Klasifikasi	Identifikasi	Bentuk	Operasionalisasi
Soft Military Power Projection	<i>Securing Sea Lanes of Communication</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sea Security Partnership</i> • <i>Naval Military Joint Exercise</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Operasi keamanan Indonesia di Laut Indonesia, terutama di Laut Natuna Utara. • Militer gabungan angkatan laut Indonesia dengan negara lain di wilayah Laut Tiongkok Selatan.
	<i>Non-Combatant Evacuation Operations</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>External threat in SLOC (Sea Lines of Communication)</i> • <i>Military operations for evacuating civilians in foreign country</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman asing di SLOC Indonesia (Laut Indonesia). • Operasi militer Indonesia di negara-negara yang terletak di sengketa Laut Tiongkok Selatan yang mengeyakuasi korban perang saudara.
	<i>Humanitarian Relief</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Military assistance for natural disaster</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah militer Indonesia yang dikirim



		<p><i>abroad</i></p>	<p>untuk menyediakan pertolongan darurat di negara-negara yang berada dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.</p>
	<p><i>Peacekeeping</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>A military operation to support diplomatic efforts</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengerahan tentara Indonesia untuk membantu masalah-masalah diplomatik di negara-negara yang berada dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.
<p>Hard Military Power Projection</p>	<p><i>Showing The Flag</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Military deployment in conflicted region</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasukan militer Indonesia dikerahkan di Laut Tiongkok Selatan konflik wilayah sebagai simbol militer.
	<p><i>Compellence and Deterrence</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Used military for coercive diplomacy to influence the decision making</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengerahan militer Indonesia untuk mengancam pembuatan kebijakan Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.



<p><i>Punishment</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Punishment given to another country who breaks the rule inside the territory</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman yang diberikan kepada negara lain sebagai respons atas pelanggaran di wilayah Indonesia.
<p><i>Armed Intervention</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Military deployment inside territory of another state to influence other state's internal affairs</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengerahan militer Indonesia di dalam wilayah negara lain yang memengaruhi urusan dalam negeri.
<p><i>Conquest</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>An offensive military to occupy claimed territory by another state.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi aset militer Indonesia untuk secara paksa menduduki wilayah yang diklaim oleh negara lain sehingga teritori itu milik Indonesia.

Sumber: “India Military Power Projection”, oleh Walter Ladwig

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kesembilan identifikasi yang berbeda dan yang telah dibedakan menjadi dua jenis klasifikasi yaitu *soft power projection* dan *hard power projection*. Seluruh definisi yang menjadi turunan dari identifikasi ini akan menjadi bahan acuan penulis dalam melakukan



penelitian. Hal ini disebabkan definisi-definisi yang disediakan dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan jawaban mengenai bagaimana implementasi dan pola Indonesia dalam melakukan *power projection* melalui kebijakan penamaan Laut Natuna Utara di Kawasan Laut Tiongkok Selatan. Pola yang dimaksudkan penulis disini adalah apakah dalam implementasinya, Indonesia akan lebih cenderung menggunakan *soft military power projection* atau *hard military power projection*.



2.5. Alur Pemikiran

LBM: Ancaman eksternal dari Tiongkok atas klaim Laut Tiongkok Selatan yang di dalamnya terdapat sebagian wilayah dari Indonesia serta melihat adanya potensi kerja sama dengan negara-negara kawasan lain yang bersengketa.

Bagaimana identifikasi *Power Projection* Indonesia di kawasan Laut Tiongkok Selatan pada masa pemerintahan Joko Widodo?

Power Projection
(Oleh Walter Ladwig)

Soft Power Projection

Hard Power Projection

- Securing Sea Lanes of Communication
- Non Combatant Evacuation
- Humanitarian Relief
- Peacekeeping

- Showing The Flag
- Compellence and Deterrence
- Punishment
- Armed Intervention
- Conquest

Implementasi *Power Projection* yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya atas claim Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok dengan penamaan Laut Natuna Utara dapat dibagi menjadi dua strategi. Pertama adalah *Soft military power projection* dan yang kedua adalah *Hard military power projection*. Kesembilan aktifitas tersebut merupakan pola implementasi dari *power projection* yang kemungkinan akan dilakukan oleh Indonesia.

2.6. Argumen Utama

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengajukan argumen utama sebagai berikut:

Indonesia dapat mengimplementasikan klasifikasi-klasifikasi yang ada dalam *soft military power projection* dan *hard military power projection*, dalam strateginya mempertahankan kawasan atas klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Dalam mengimplementasikan strategi *Power Projection*, Indonesia lebih condong menggunakan *Soft Military Power Projection*. Hal ini didasari lebih banyaknya strategi-strategi yang digunakan Indonesia lebih banyak menggunakan *soft military power projection*, sesuai dengan Konsep *Power Projection* milik Walter Ladwig.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan, menjabarkan, menerangkan, dan memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan fenomena atau objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini akan mengkomparasikan antara klasifikasi-klasifikasi dalam konsep dan melihat kecenderungan Strategi Indonesia terhadap salah satu klasifikasi yang disediakan. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal bukan dari pihak pertama, melainkan sumber kedua. Data dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen seperti internet, jurnal, buku, majalah, dan koran. Kemudian, data yang diambil memiliki rentang waktu pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2016 hingga tahun 2018.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tentu saja perlu dibatasi sehingga tidak terlalu luas. Hal ini menjadikan perlu adanya ruang lingkup penelitian yang membatasi objek dan waktu penelitian. Tujuan dari pembatasan kurun waktu ini agar penulis dapat lebih fokus dan dapat memahami kesesuaian penelitian dengan tujuan pembahasan yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk melihat pengaruh tersebut, perlu ditelaah lebih mendalam lagi namun tetap dalam lingkup waktu penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini penulis membatasi waktu

penelitian berdasarkan waktu di dalam periode kepemimpinan, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Hal ini dianggap relevan karena pada kurun waktu 2016 hingga 2018 merupakan masa Presiden Joko Widodo mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ketahanan nasional Indonesia atas klaim Laut Tiongkok Selatan yang dilakukan oleh Tiongkok.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tulisan-tulisan ilmiah tentang upaya Indonesia memproyeksikan kekuatannya untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya, yang termasuk dalam strategi *power projection*. Sumber penulisan yang digunakan dapat berasal dari dokumen-dokumen negara, buku-buku teks yang berkaitan dengan topik pembahasan, jurnal-jurnal ilmiah, artikel dari hasil analisa, dan sumber-sumber lain yang didapat dari media masa seperti koran, majalah, internet, dan opini dari beberapa ahli. Sumber-sumber yang penulis gunakan merupakan sumber sekunder yang diperoleh dari interpretasi atau pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3.4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif memiliki dua tahapan.

Pertama adalah mereduksi data yaitu memilah data kemudian disusun kembali menjadi beberapa kategori kemudian data-data tersebut dirangkum dan dijadikan

susunan yang lebih sederhana. Kedua merupakan interpretasi yaitu menganalisis data dengan cara memahami kata-kata dari riset yang ditemukan dengan dimunculkan konsep guna menjelaskan temuan yang ada. Dalam penelitian Deskriptif-kualitatif ini, teknik analisis data digunakan setelah terkumpul kemudian proses selanjutnya adalah data tersebut disederhanakan dan dibuat kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti guna mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. *Level of Analysis* dalam penelitian ini menggunakan level negara. Dalam menganalisisnya menggunakan perspektir negara untuk menemukan jawaban dari masalah yang telah diangkat.

3.5. Sistematika Penulisan

Bagian pertama dalam tulisan ini adalah BAB I yang merupakan pendahuluan. Berisi latar belakang mengapa penulis mengambil fenomena strategi proyeksi kekuatan Indonesia melalui kebijakan penamaan Laut Natuna Utara untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya terhadap negara-negara kawasan Laut Tiongkok Selatan lainnya sebagai penelitian. Rumusan masalah berfungsi untuk memperjelas pertanyaan atas permasalahan yang akan dianalisa, kemudian disertakan tujuan dan manfaat penulisan ini.

Bagian kedua adalah BAB II yang memaparkan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisa data yang akan ditemukan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua studi terdahulu, yang pertama berjudul "*Australia as a Southern Hemisphere Power*" yang merupakan artikel dalam jurnal tulisan dari Benjamin Reilly. Studi terdahulu ini menjelaskan mengenai suatu masalah yang diselesaikan dengan proyeksi kekuatan. Studi

terdahulu penulis berikutnya berjudul “Indonesia di Laut Tiongkok Selatan:

Berjalan sendiri” tulisan dari Aaron L. Connelly. Studi terdahulu yang kedua menggunakan studi terdahulu yang serupa dengan penelitian penulis, yaitu kebijakan dan alasan Presiden Joko Widodo terkait kasus Laut Tiongkok Selatan.

Bagian ketiga yaitu BAB III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan, berisi tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan, serta sistematika penulisan yang mencakup uraian ringkasan yang dibahas pada setiap bab.

Bagian keempat yaitu BAB IV. Dalam bagian ini akan lebih membahas mengenai gambaran umum dari kasus yang penulis angkat, lokasi, aktor, serta alasan dan faktor yang menyebabkan kasus ini muncul. Dengan adanya bagian ini, pembaca akan lebih memahami kasus secara mendalam sebelum masuk pada bagian pembahasan.

Bagian kelima merupakan BAB V, terdiri dari pembahasan yang berkaitan dengan implementasi konsep yang digunakan kedalam kasus yang sedang diteliti.

Dalam bab ini akan dijelaskan identifikasi dari proyeksi kekuatan Indonesia di Kawasan Laut Tiongkok Selatan pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Bagian keenam merupakan BAB VI. Bagian ini merupakan bagian serta bab terakhir dari tulisan ini. Bab ini membahas mengenai hasil dan kesimpulan dari penelitian yang merujuk pada rumusan masalah dan hipotesis hasil penelitian.

Bab ini juga berisi saran yang dapat menjelaskan tentang kekurangan penelitian yang dilakukan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM *POWER PROJECTION* INDONESIA

4.1. *Power Projection* Indonesia

Walter C. Ladwig mendefinisikan *power projection* dengan merujuk definisi dari *Department of Defense (D.O.D)* dalam definisi tersebut, menjelaskan bahwa *power projection* secara luas adalah kemampuan dari sebuah negara dalam menerapkan elemen-elemen kekuatan nasionalnya, yang terdiri dari politik, ekonomi, informasi, dan militer. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kekuatannya di suatu wilayah atau lokasi yang sedang mengalami krisis secara efektif, sehingga akan meningkatkan ketahanan negaranya.²⁸

Strategi *power projection* Indonesia selama ini lebih menitikberatkan pada kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan hingga militer. Strategi *power projection* Indonesia memfokuskan bagaimana Indonesia melihat berbagai kesempatan yang ada di luar wilayahnya, yaitu kawasan regional Asia Tenggara, dimana Indonesia fokus dalam menjalin hubungan baik di luar negaranya.²⁹

Senada dengan sejarah terbentuknya Indonesia, *power projection* yang ada di Indonesia telah dimulai sejak Indonesia masih menjadi negara nusantara dimana Indonesia terdiri dari banyak pulau yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran. Fakta bahwa nusantara merupakan gabungan antara berbagai kerajaan, tidak dipungkiri bahwa masing-masing kerajaan memiliki hubungan

²⁸ Walter C. Ladwig, "Delhi's Pacific ambition: Naval Power, "Look East". And India's emerging Influence in Asia Pacific," *Forthcoming in Asian Security* 5, no.2 (2009): 2.

²⁹ Ishaq Rahman, "Benua Maritim dan Arah Baru Kajian Studi Hubungan Internasional Berperspektif Indonesia", Universitas Hasanuddin, Makassar, 23-24 November 2016, Volume 7, (2016).

politik yang baik agar terhindar dari peperangan. Namun, kemungkinan perang tetap ada.

Selanjutnya adalah *power projection* Indonesia di masa kolonial, dimana Indonesia telah dijajah selama tiga abad oleh Belanda. Awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk mengembangkan perdagangan rempah-rempah yang kemudian hasilnya akan dijual kembali di Eropa. Namun pada saat nusantara kedatangan armada pasukan dari Portugis, mulailah terjadi konflik antara penduduk pribumi dengan para bangsa kolonial. Hal ini terjadi karena pedagang Eropa melakukan monopoli perdagangan rempah sehingga pedagang dari negara lain kesulitan untuk memperoleh rempah-rempah. Belanda yang ikut mengeksploitasi rempah yang ada di nusantara, merasa bahwa banyaknya pasokan rempah akan berdampak negatif terhadap harga pasar rempah di Eropa, sehingga Belanda memimpin negara Eropa lain untuk membentuk Serikat Dagang Hindia Timur atau lebih dikenal dengan VOC (*Voorcompagnieën*). Negara yang tergabung dalam VOC memiliki kekuasaan berdaulat yang besar untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah.

Sejalan dengan negara Belanda yang menjadi pemimpin VOC, Belanda menyingkirkan pesainnya dan memindahkan kantor pusat ke Jayakarta (yang sekarang dikenal dengan Jakarta). Pemindahan kantor pusat ke Jayakarta adalah karena masyarakat pribumi memusuhi Belanda, serta karena letak Jayakarta sangat strategis untuk perdagangan yaitu berada di dekat Selat Sunda dan Selat Malaka. Dengan berkuasanya Belanda atas kota Jayapura, membuat Sultan Agung dari kerajaan Mataram menghentikan dominasi politik daerah pesisir Utara pulau Jawa dan mengirim pasukannya untuk menaklukkan pemerintahan Belanda

sebanyak dua kali. Namun, sangat disayangkan, usaha Sultan Agung tersebut tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, setelah wafatnya Sultan Agung, Belanda berhasil menaklukkan kerajaan Mataram dan berhasil memiliki kekuasaan yang cukup kuat di pulau Jawa.³⁰

Berdasarkan pemaparan tersebut, sebelum era kemerdekaan, Indonesia telah melakukan tindakan *power projection* untuk melindungi wilayahnya dari bangsa lain yang dianggap mengancam. Indonesia, yang masih dikenal sebagai nusantara melakukan *power projection* dalam bentuk hubungan kerja sama antar negara dalam hal ini berbentuk hubungan perdagangan. Selain melakukan hubungan kerja sama, nusantara juga melakukan *power projection* dalam bentuk penaklukan seperti yang dilakukan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang berhasil menaklukkan hampir seluruh kerajaan yang ada di nusantara. Namun kenyataan yang terjadi setelahnya adalah kerajaan Mataram yang tidak dapat menaklukkan Belanda yang berkuasa di daerah Jawa.

Keadaan semakin membaik seiring dengan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia atas Belanda yang telah menjajah selama kurang lebih tiga abad lamanya. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia telah memiliki sebuah kesepakatan dengan Belanda yang berupa *Ordonasi Hindia Belanda*. Pada tahun 1939, Indonesia merasa bahwa kesepakatan tersebut sangat merugikan, sehingga pada tanggal 13 Desember 1957, Ir. Djuanda yang pada saat itu termasuk sebagai pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*). Kemudian tanggal

³⁰ Indonesia investments, "Sejarah Prakolonial Indonesia", <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-prakolonial/item123>, diakses tanggal 20 Mei 2019.

13 Desember 1957 menjadi tonggak sejarah kelautan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Wawasan nusantara.³¹ Selanjutnya pada tahun 1960, deklarasi ini diratifikasi melalui Undang-Undang No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

³² Selanjutnya, Deklarasi Djuanda ini menjadi dasar dalam Hukum Laut Internasional yang diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan kemudian disebut Hukum Laut (HUKLA) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985.³³

4.1.1. Respon Indonesia Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan

Sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, terjadi berbagai konflik di perbatasan utara Indonesia, khususnya yang berada di kawasan kepulauan Natuna. Konflik pertama yang terjadi adalah Konfrontasi Indonesia – Malaysia, dimana Malaysia menyatakan bahwa kepulauan Natuna termasuk dalam kawasannya. Konfrontasi tersebut terjadi pada tahun 1962-1966 dan berakhir dengan Malaysia yang berhenti menggugat status kepulauan Natuna karena sebelumnya, yaitu pada tahun 1956, pemerintah Indonesia telah resmi mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada Juli tahun 2017, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan perubahan nama laut menjadi *Laut Natuna Utara (LNU)* ke PBB dan juga Organisasi Hidrografik Internasional. Peresmian nama Laut Natuna

³¹Butje Tampi, “Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis),” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no.10, (2017): 1-16.

³²Joenil Kahar, “Penyelesaian Batas Naritim NKRI dalam Pikiran Rakyat Cyber Media, 3 Januari (2004): 1.

³³Ibid.

Utara tersebut sudah dinyatakan sah dan sedang dalam proses. Penamaan laut ini lebih tepatnya berada pada utara dari Kepulauan Riau. Perubahan nama *Laut Natuna Utara(LNU)* ke PBB menuai protes dari Tiongkok yang merasa Natuna Utara sebagai bagian dari Laut Tiongkok Selatan. Indonesia memiliki argument yang kuat karena berdasarkan landasan kontinen. Kegiatan penambangan yang dilakukan pada Natuna Utara dan Natuna Selatan juga menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia, yang menaungi Laut Natuna itu sendiri.³⁴

Konflik baru muncul pada tahun 2009 dimana pemerintah Tiongkok secara sepihak menggambar Sembilan Titik yang ditarik dari pulau Sparty di tengah Laut Tiongkok Selatan dan kemudian diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Tiongkok. Hal tersebut diprotes oleh Presiden Yudhoyono melalui Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tidak hanya berkonflik dengan Indonesia, karena penggambaran Sembilan Titik secara sepihak tersebut, Tiongkok juga bersengketa dengan Vietnam dan Filipina karena wilayah laut kedua negara tersebut juga masuk dalam Sembilan Titik tersebut.

Karena Presiden Yudoyono menerapkan strategi militer *zero enemy million friends*, PBB belum bersikap atas protes dari pemerintah Indonesia akan penggambaran Sembilan Titik secara sepihak tersebut.

Karena cadangan Gas terbesar di Asia berada di perairan Natuna, sebenarnya pemerintah Indonesia melalui TNI sudah turun tangan untuk menjaga kawasan perairan tersebut untuk menghindari kemungkinan konflik di daerah perairan tersebut. Kejadian menarik terjadi di era pemerintahan Joko Widodo, dimana Presiden Indonesia ini dengan lantang menegaskan bahwa dalam kisruh

³⁴ Riva Dessthania Suastha, "Diprotes China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB," *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170720172204-106-229239/diprotes-china-ri-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-pbb> diakses tanggal 4 Januari 2019.

Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok perlu hati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya karena Sembilan Titik baru tersebut sekilas terkesan mengklaim bahwa kepulauan Natuna termasuk dalam wilayah kedaulatan Tiongkok. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak terima akan pengklaiman sepihak Tiongkok karena wilayah kepulauan Natuna terlalu jauh dari wilayah Tiongkok sehingga tidak masuk akal jika kepulauan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Tiongkok.

Kenyataannya, sampai saat ini belum ada perundingan khusus untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Tiongkok dengan Indonesia di perairan Natuna. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan antara Negara-Negara ASEAN lainnya yang mengklaim kedaulatan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Menanggapi hal tersebut, tindakan pencegahan potensi konflik dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan upaya Diplomatik dengan pemerintah Tiongkok agar sengketa Laut Tiongkok Selatan tidak meluas sampai ke wilayah kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna. Hasil upaya diplomatic tersebut adalah disepakatinya *Declaration on the Conduct of Parties in the South Tiongkok Sea* (DOC) pada tahun 2002 dimana kedua belah pihak yaitu Indonesia dengan Tiongkok sepakat untuk membangun rasa saling percaya, meningkatkan kerja sama, serta memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan.

Selain mengadakan kesepakatan bersama, sebenarnya TNI AL dibawah pemerintahan Indonesia juga melakukan beberapa strategi untuk mempertahankan kedaulatan Negara, khususnya di wilayah perbatasan perairan misalnya wilayah perairan Natuna dengan melakukan patrol keamanan laut dengan tujuan untuk

memberi tahu dunia bahwa Indonesia telah menunjukkan kesungguhannya dalam mempertahankan wilayahnya. Strategi pertahanan tersebut dalam terminology kekuatan laut dikenal dengan sebutan *show of flag* karena dengan jelas Indonesia melakukan patrol di wilayah terluarnya agar pihak asing mengerti bahwa wilayah patrol tersebut adalah termasuk dalam lingkup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

4.2. Sejarah *Power Projection* Indonesia di Kawasan LTS di Berbagai Era

Kepresidenan

4.2.1. Era Presiden Soekarno

Pada era kepemimpinan Soekarno (1945-1966), Indonesia dikenal sebagai negara terkuat di bumi bagian selatan serta memiliki efek *deterrence* yang kuat dari sisi politik. Kekuatan militer pada masa kebijakan politik Soekarno terkait akan harga diri, kehormatan martabat, pertahanan dan keamanan bangsa, serta didukung oleh ketangguhan pasukan militer mencapai kekuatan pertahanan mencapai 29% dari PDB. Presiden Soekarno sadar bahwa salah satu upaya agar negara mampu mengamankan jalur laut nusantara dan sumber daya laut adalah memiliki kekuatan AL yang mampu menempati 12 lautan yang dimiliki negeri ini, menguasai titik-titik strategis penting pulau-pulau, *choke points* Malaka, dan 39 selat lainnya yang baik langsung ataupun tidak merupakan jalur utama pendukung kepentingan perdagangan, pergerakan sumber daya energi dan supply makanan (*Sea Lanes of Trade/SLOT*) serta merupakan jalur utama strategis militer (*Sea Lanes of Communications/SLOC*).³⁵

³⁵ Hendra Manurung, "Menuju Poros Maritim Dunia: Masa Depan Indonesia", (2018), <https://www.researchgate.net/publication/323369195>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

4.2.2. Era Presiden Soeharto

Era Orde Baru, Presiden Soeharto mampu menjadi penjaga harmoni dari realisme politik di kawasan. Ada pengakuan eksplisit dari negara-negara anggota ASEAN bahwa Indonesia yang digambarkan dalam diri Presiden Soeharto dihormati sebagai “saudara tua”. Bagi para realis, seperti Presiden Soeharto, Perdana Menteri Malaysia (1981-2003) Mahathir Mohamad, dan Perdana Menteri Singapura (1959-1990) Lee Kuan Yew, negara-negara Asia Tenggara yang sebetulnya beraneka ragam secara politik harus bersatu mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan. Harmoni para realis ini terbukti mampu meredam potensi konflik yang mungkin timbul dari persoalan perbatasan, terutama di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Sayangnya, bandul realisme politik di Asia Tenggara sedikit demi sedikit bergeser sepeeninggal para pemimpin senior mereka. Struktur politik di negara-negara ASEAN makin terdesentralisasi seiring iklim politik yang semakin terbuka.

Bagi Presiden Soeharto masalah dalam negeri suatu negara hanya dapat diselesaikan oleh negara itu sendiri sesuai dengan politik luar negeri Indonesia “Bebas Aktif” dimana bersifat “*non interference*” (tidak campur tangan) bukan berarti “*non involvement*” (tidak ikut serta). senioritas mantan presiden Indonesia tersebut merupakan faktor yang membuat Indonesia dihormati di wilayah Asia Tenggara.

Terkait kemelut di Asia Tenggara dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, Indonesia giat “*urun rembug*” dalam mengatasi konflik tersebut dengan mensponsori Workshop tahunan tentang masalah tersebut sejak tahun 1990-an.

Tujuan diadakan giat “urun rembug” untuk mencari jalan keluar dengan Indonesia yang memainkan peran menonjol.³⁶

4.2.3. Era Presiden BJ Habibie

Terkait Konflik Laut Tiongkok Selatan, pada masa Presiden Habibie Indonesia tidak terlalu banyak berperan. Dalam konteks konflik LTS, peran Indonesia tidak terlalu menonjol setelah lengsernya Soeharto. *ASEAN Regional Forum (ARF)* yang selalu di pakai Soeharto dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di kawasan sekitarnya. Konflik Philipina-Tiongkok adalah salah satu persoalan yang memperkuat asumsi tentang kelemahan ARF dalam menemukan jalan keluar atas konflik yang berkembang di kawasan ASEAN. Misalnya, segera sesudah ARF terbentuk sebuah insiden malah terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Awal tahun 1995 seorang nelayan Filipina menyatakan melihat sebuah bangunan yang dilengkapi alat komunikasi yang didirikan di Mischief Reef yang jauh memasuki kawasan yang telah diklaim Filipina.

Insiden ini mendorong pemerintah Filipina untuk membicarakan agresifitas Tiongkok dalam forum ARF. Meskipun demikian sampai tahun 1998 tak ada sinyal bahwa ARF akan mengambil keputusan efektif untuk menghentikan langkah-langkah Tiongkok yang dianggap Philipina telah mengancam keamanan nasionalnya. Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN tahun 1995 dan 1996 hanya mengingatkan anggota ARF agar menahan diri dan mengutamakan jalan damai sesuai dengan Deklarasi ASEAN tentang Laut Tiongkok Selatan (DoC) tahun 1992.

³⁶ Hasyim Djalal, “Preventif Diplomacy in Southeast Asia: Lesson learned”, *The Habibie Center*, Jakarta, (2002), hal 45.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia pada bulan yang sama ke Tiongkok untuk menandatangani kerjasama bilateral tentang penerapan cara-cara damai dalam penyelesaian ketegangan memperkuat dugaan Philipina tentang adanya koalisi kedua negara yang merugikan pemerintah Philipina.³⁷

4.2.4. Era Presiden Abdurrahman Wahid

Tahun 1999- 2001, terjadi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan yaitu antara:(1).Tahun 1999 Tiongkok-Filipina : Kapal perang Tiongkok dituduh melecehkan angkatan laut Filipina dekat kepulauan Sparty. (2)Tahun 1999 Filipina- Vietnam : Bulan Oktober tentara Vietnam menembaki pesawat angkatan udara Filipina dalam patrolinya di Spratly. (3)Tahun 1999 Malaysia-Filipina: Bulan Oktober sumber pertahanan Filipina melaporkan 2 pesawat tempur Malaysia dan dua pesawat Filipina mengintai di Spratly. (4)Tahun 2000 Tiongkok - Filipina: Bulan Mei pasukan Filipina adu tembak dengan nelayan Cina 1 meninggal, 7 ditahan. (5)Tahun 2001 Tiongkok-Filipina: Selama 3 bulan pertama, angkatan laut Filipina mengusir 14 kapal berbendera Tiongkok dari Spratly.. (6)Tahun 2001 Tiongkok-Filipina : Filipina mengirimkan perahu bersenjata ke laut dangkal Scarborough untuk membatasi Tiongkok meningkatkan struktur bebatuan.

Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan saat dimana Tiongkok mendapat kedudukan istimewa dalam politik luar negeri Indonesia, selain itu laju peningkatan hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok berkembang pesat. Gus Dur mengusulkan pembentukan poros Jakarta-Beijing-New Delhi menunjukkan pandangannya akan nilai strategis

³⁷ Collective Defence Treaty terdiri dari AS, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, dan Philipina. Aliansi militer ini sering juga disebut juga pakta Manila.

Tiongkok dalam mandala diplomasi Indonesia. Terkait konflik Laut Tiongkok Selatan, pemerintah Indonesia di masa Gus Dur, tidak terlalu aktif dalam upaya penyelesaian konflik, tetapi menguatkan organisasi ASEAN melalui beberapa pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN,³⁸ mengingat pada tahun 2000-an terjadi sengketa antara negara yang mengklaim memiliki kepulauan di Laut Tiongkok Selatan. Gus Dur tidak terlalu melihat konflik ini karena fokus Gus Dur adalah melakukan pendekatan ke beberapa negara dengan mengadakan lawatan keluar negeri.

4.2.5. Era Presiden Megawati

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok terus berkembang dengan ditandatanganinya MoU untuk pembentukan forum energi kedua negara pada Maret 2002. Melalui kerjasama tersebut menjadi payung investasi Tiongkok di Indonesia dalam bidang energi³⁹ Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai persoalan-persoalan global dan regional mendapatkan berbagai apresiasi baik di dalam maupun di luar negeri.

Salah satu bukti nyata keberhasilan Indonesia adalah dengan terciptanya *Declaration on The Conduct of The Parties in the South Tiongkok Sea* pada tahun 2002.

Negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok menandatangani dokumen DOC pada November 2002 di Kamboja setelah melalui negosiasi berkepanjangan

³⁸ Hartati, Ana Yulia, "Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Jokowi)", *Jurnal Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang*, (2016).

³⁹ Christin, Sinaga, "Memaknai Tahun Persahabatan Indonesia-Tiongkok", www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politikinternasional/324-memaknai-tahun-persahabatan-indonesia-tiongkok, (2010), diakses 09 Januari 2020.

yang memakan waktu beberapa tahun.⁴⁰ Di dalam pandangan banyak analis, dokumen DOC pada dasarnya tidak lebih dari satu bentuk kompromi di antara dua posisi: tidak melakukan apapun atau membentuk perjanjian resmi yang mengikat secara hukum. Isi dari dokumen DOC dengan jelas menyebutkan tiga tujuan: mempromosikan upaya-upaya untuk membangun rasa saling percaya di antara para pihak, melibatkan diri di dalam kerjasama maritim, dan menyediakan dasar diskusi dan penyusunan suatu dokumen *Code of Conduct* (COC) yang formal dan dengan kekuatan hukum yang mengikat.⁴¹

4.2.6. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada bulan Desember 2004, pertemuan SOM (*Senior Official's Meeting*) tentang DOC yang pertama diadakan di Kuala Lumpur, dan dalam pertemuan tersebut mereka memutuskan untuk membentuk grup kerjasama guna membahas pelaksanaan DOC. Mereka juga menyusun sebuah dokumen yang menjelaskan susunan, fungsi dan tanggung jawab dari grup kerjasama tersebut. Grup kerjasama tersebut bertugas untuk mempelajari dan menyediakan gagasan berkaitan dengan kebijakan pengimplementasian DOC, juga untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang mungkin dapat menyebabkan konflik Laut Tiongkok Selatan bertambah parah.

Sejak akhir 2011 sampai pertengahan 2012, pejabat-pejabat senior ASEAN bekerja dalam menyusun kerangka sebuah dokumen yang menggambarkan garis-garis besar bagi dokumen COC. Karena negara-negara ASEAN melakukan hal tersebut tanpa partisipasi langsung dari Tiongkok,

⁴⁰Kyoto Review, "Mengelola Isu Keamanan Di Laut Tiongkok Selatan", <http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-Tiongkok-selatan-dari-doc-ke-coc/>, diakses tanggal 09 Januari 2020.

⁴¹Hartati, Ana Yulia, "Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Jokowi)".

Tiongkok merasa tidak senang, tetapi tidak memprotes secara langsung wujud nyata dari solidaritas ASEAN tersebut. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Phnom Penh pada Juli 2012, ketika ASEAN mengajukan kepada Tiongkok dokumen yang mengandung unsur-unsur utama dokumen COC itu, Tiongkok masih menunjukkan niat untuk bekerjasama dengan ASEAN dalam proses penyusunan COC.⁴²

“Doktrin Natalegawa” (*Dynamic Equilibrium*) atau keseimbangan doktrin tersebut merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat dimungkinkan dikembangkan suatu tatanan internasional yang baru yang bersifat *win-win* dan bukan *zero-sum*. Perspektif *dynamic equilibrium* memiliki dua termin penting. *Dynamic* merujuk pada dinamisme politik global. Dengan doktrin tersebut, maka persoalan-persoalan politik dan keamanan global yang dihadapi oleh Indonesia akan dihadapi dengan tujuan keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama dengan mekanisme kerjasama.

Indonesia sebagai negara penengah yang ditunjuk untuk menangani konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan juga memiliki latar belakang tersendiri. Keterlibatan Indonesia bukan tanpa alasan yang sifatnya strategis. Indonesia diharuskan untuk turut terlibat demi mencapai kepentingan ekonomi nasional. Lebih lanjut, apabila kawasan di Laut Tiongkok Selatan dapat kembali tertib dan bebas dari segala ancaman, maka aktivitas perdagangan dan eksplorasi alam Indonesia di kawasan ini pun dapat berjalan lancar.

⁴² Ana Yulia Hartati, “Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Jokowi)”.

Oleh karena itu, peran Indonesia ditunjukkan melalui sejumlah perundingan yang dibentuk diantara negara-negara yang bertikai. Salah satu wujud upaya Indonesia adalah dengan melaksanakan *South Tiongkok Sea Informal Meetings* yang diadakan hampir setiap tahun. Signifikansi pertemuan ini menghasikan sebuah kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara yang bertikai untuk mendirikan sebuah wilayah politik guna melancarkan hubungan diplomatik dan kerjasama satu sama lain. Selain itu, usaha untuk meningkatkan *confidence building measures* menjadi bagian penting disetiap agenda pertemuan.

Selain *South Tiongkok Sea Informal Meetings*, upaya Indonesia juga diwujudkan dalam sejumlah perundingan damai lainnya, seperti *Technical Working Groups* (TWGs), *Groups of Experts* (GEs) dan *Study Groups* (SGs).⁴³

4.3. Arti Strategis Kawasan Laut Tiongkok Selatan

4.3.1. Sejarah, Budaya, dan Hubungan bilateral antara Indonesia dan Negara-Negara di kawasan Laut Tiongkok

Hubungan internasional dapat diartikan sebagai interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi banyak negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan substansial (kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara) seperti birokrasi dan pemerintah domestik, serta individu-individu. Dalam hubungan internasional sendiri terdapat berbagai pola hubungan antar bangsa, seperti pola panjajahan, pola hubungan ketergantungan, dan pola hubungan sama derajat antar bangsa.

Sebuah ketentuan yang dibentuk secara internasional mengakibatkan negara yang bersangkutan untuk menjalani kepastian hukum pada perjanjian internasional,

⁴³ Hartati, Ana Yulia, "Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Jokowi)".

diantaranya adalah hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antar subjek-subjek hukum internasional.

Dalam menjalankan hubungan internasionalnya, Indonesia menjalin hubungan dengan bangsa lain dengan menggunakan politik luar negeri bebas dan aktif, yang dipraktekkan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif ini, Indonesia pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan juga membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa Negara Asia Afrika lainnya.

Secara umum, faktor yang mendasari dibentuknya hubungan internasional adalah untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, kebudayaan dan ideology negara. Politik bebas aktif yang digunakan Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain memiliki arti “Bebas” yaitu tidak terikat oleh suatu ideology atau politik negara asing atau blok negara-negara tertentu, atau negara-negara *super power* yang ada. Sedangkan “Aktif” memiliki arti bahwa Indonesia giat dalam mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.

Pada periode awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1961, Malaya membentuk suatu organisasi budaya dan ekonomi yang dikenal sebagai Asosiasi Asia Tenggara (ASA – *Association of South East Asia*) dengan dukungan dari Filipinan dan Thailand. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi dan budaya antar negara di Asia Tenggara. Tuanku Abdul Rahman dari Malaya mengundang negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk bergabung, namun tidak ada satupun negara Asia Tenggara lainnya yang ingin bergabung. Bahkan presiden Soekarno pun menaruh kecurigaan pada ASA dan

melihat organisasi ini sebagai pelayan dari kepentingan imperialis Barat.

Sehingga, ASA tidak berkembang. Puncaknya adalah tahun 1962, dimana Filipina mengaku memiliki Sabah yang akhirnya memamatkan cikal bakal ASA.

Selanjutnya, setahun kemudian didirikan Maphilindo yaitu asosiasi antara

Malaysia-Filipina-Indonesia dibentuk. Namun Maphilindo tidak bertahan lama

karena Indonesia melancarkan konfrontasi dengan Malaysia.⁴⁴ Akibat dari

konfrontasi ini terciptanya ketegangan-ketegangan regional antara negara-negara

tetangga. Ketika Soekarno masih berkuasa, hubungan antara Jakarta dengan Kuala

Lumpur jauh dari hangat, hal ini disebabkan karena Indonesia bersikap

antikolonialisme dan anti imperialisme yang berbeda dengan sikap Malaysia.

Residu dari berakhirnya Perang Dingin adalah munculnya kecurigaan dan

konflik-konflik regional.⁴⁵ Konflik regional mempunyai otonomi yang lebih besar

untuk berkembang menjadi eskalasi konflik yang lebih serius dan mengancam

kawasan. Sampai saat ini saling curiga tetap berlangsung di Asia Tenggara akibat

warisan pola politik masa lalu. Persepsi ancaman diantara mereka sangat

kompleks. Indonesia, Malaysia dan Vietnam tetap khawatir terhadap Tiongkok,

Thailand, Vietnam dan negara IndonTiongkok lainnya tetap masih memandang

satu sama lain sebagai ancaman potensial. Persepsi ancaman dan saling curiga ini

juga diperumit oleh masalah klaim kedaulatan dan konflik-konflik teritorial,

seperti antara Indonesia dan Malaysia mengenai Sipadan dan Ligitan; Malaysia

Singapura mengenai pulau Batu Puteh (Pedra Branca) di selat Johor; Filipina

Malaysia mengenai Sabah; Malaysia-Thailand atas perbatasan darat bersama

⁴⁴J. A. C. Mackie, "Konfrontasi: Indonesia's Dispute againts Malaysia" (Kuala Lumpur: Oxford University Perss, 1974), hlm. 165- 170. Dikutip dalam Leo Suryadinata, Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Soeharto. 1998: 85.

⁴⁵Ibid.

mereka; Malaysia-Brunei atas teritori Limbang di Serawak, maupun perbatasan laut antara Indonesia-Vietnam, Indonesia-Filipina, Thailand-Kamboja-Vietnam, Thailand-Malaysia; dan Vietnam-Tiongkok Sabah; Malaysia-Thailand atas perbatasan darat bersama mereka; Malaysia-Brunei atas teritori Limbang di Serawak, maupun perbatasan laut antara Indonesia-Vietnam, Indonesia-Filipina, Thailand Kamboja-Vietnam, Thailand-Malaysia; dan Vietnam-Tiongkok mengenai pulau Paracel. Serta yang lebih mengawatirkan adalah sengketa klaim tumpang tindih atas Kepulauan Spratly tepat berada di wilayah Asia Tenggara di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei.⁴⁶

Kerjasama yang dilakukan Tiongkok dengan Indonesia pada saat itu adalah dibidang ekonomi. Bantuan ekonomi Beijing ke Jakarta mengalir deras, pada tahun 1961 Menteri Luar negeri Tiongkok, Chen Yi memberikan bantuan kredit sebesar US\$50 juta, setelah itu tiga tahun kemudian tahun 1964 ketika menjamu Soekarno di Shanghai, Perdana Menteri Chou En-Lai menyetujui tambahan bantuan US\$30 juta untuk pabrik-pabrik tekstil di Indonesia. Bahkan Wakil Perdana Menteri Subandrio pernah menyebut bantuan dari Tiongkok akan bertambah, nilainya sekitar US\$100 juta.⁴⁷

Selanjutnya adalah hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam.

Negara Vietnam mempunyai hubungan baik dengan Indonesia, karena Indonesia dan Vietnam memiliki pengalaman yang sama, yakni memperoleh kemerdekaannya melalui revolusi. Indonesia memiliki hubungan informal dengan

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Renne R. A. Kawilarang, "G30S dan Masa Suram Hubungan Ri-RRC," *VIVAnews*, Oktober 9, 2008, <https://www.viva.co.id/arsip/1912-g30s-dan-masa-suram-hubungan-ri-rrc>, diakses tanggal 21 Mei 2019.

Vietnam sejak tahun 1940-an. Hubungan diplomatik antara Jakarta dan Hanoi diperkokohkan setelah Konferensia Asia-Afrika di Bandung. Jakarta membuka konsulat Jenderal Hanoi pada bulan Desember 1955. Namun, selama periode Soekarno, politik bilateral ini sempat ditinggalkan ketika semangat revolusioner sedang bangkit dan politik Indonesia lebih condong ke arah kiri.⁴⁸

Karena sebelumnya telah memiliki hubungan yang baik, ketika perang Vietnam meletus, banyak anggota elit Indonesia yang terlibat dalam gerakan anti kolonial, yang selanjutnya memberikan simpati pada masyarakat Vietnam Utara karena beranggapan bahwa Vietnam Selatan merupakan negara boneka Amerika Serikat. Puncak kerjasama bilateral ini terjadi pada tanggal 10 Agustus 1964, dimana presiden Soekarno akhirnya memutuskan untuk meninggalkan hubungan diplomatik dengan Hanoi dari tingkat konsulat menjadi duta besar. Setelah itu, Indonesia memutuskan untuk mengakui *Front Pembebasan Nasional Vietnam Utara* (NLSFV – *National Liberation Front of South Vietnam*) dan menizinkan membuka kantor perwakilannya di Jakarta. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Komunis, termasuk Vietnam Utara, menjadi sangat erat. Bersama dengan RRC mereka membentuk apa yang dikenal sebagai poros Jakarta-Hanoi-Phnom Penh-Beijing-Pyongyang.⁴⁹ Inilah yang dikenal sebagai periode “bulan Madu”, tidak hanya hubungan antara Indonesia dengan RRC saja tetapi juga hubungan dengan Vietnam Utara.

⁴⁸ Lihat pidato Soekarno yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1965, “Menemukan Kembali Revolusi Kita”, di kutip dalam “Dua Puluh Lima Tahun Dapertemen Luar Negeri”, hal. 249. Untuk suatu diskusi mengenai hal ini, lihat Peter Christian Hauswedell, *The Anti-Imperialist International United Front in Chinese and Indonesia Foreign Policy 1963-1965 : A Study of anti-Status Quo Politics*”, (tesis PH. D, Cornell University, 1976), terutama hal. 242-249. Ibid, hal. 156

⁴⁹Ibid.

Jatuhnya Soekarno setelah kudeta 1965 dan naiknya pemerintahan Soeharto yang anti komunis dengan segera mengakhiri bulan madu tersebut. Politik luar negeri Indonesia disesuaikan. Hubungan diplomatik antara Jakarta dan Hanoi dipertahankan selama era Soeharto, sedangkan hubungan antara Jakarta dengan Saigon tidak pernah dilaksanakan.⁵⁰

Hubungan bilateral Indonesia-Vietnam tetap dipertahankan dengan alasan seperti:

- 1) Vietnam Utara tidak memainkan peranan yang menentukan dalam kudeta 1965, meskipun mereka merupakan sekutu dari RRC. Tidak ada juga pengaruh dari “masyarakat Vietnam dirantau” (*Overseas Vietnameses Community*) dibandingkan dengan etnis Tiongkok di Indonesia.
- 2) Adam Malik dengan persetujuan Soeharto ingin menciptakan citra politik luar negeri non blok dibawah orde baru.
- 3) para pemimpin Indonesia kagum atas perjuangan kemerdekaan Vietnam Utara melawan kekuatan-kekuatan adidaya Barat.⁵¹

Meskipun demikian, selama orde baru, sikap Indonesia terhadap Vietnam Utara terpecah. Kalangan nasionalis, seperti Adam Malik dan Ruslan Abdulgani bersimpati terhadap Vietnam Utara. Mereka menganggap bahwa negara ini sebagai negara nasionalis daripada negara komunis, dalam perjuangan mereka melawan dominasi asing, yaitu kekaisaran Tiongkok, Perancis dan Amerika Serikat.

⁵⁰ Peter Christian Hauswedell, “The Anti-Imperialist International United Front in Chinese and Indonesia Foreign Policy 1963-1965 : A Study of anti-Status Quo Politics”, (tesis PH. D, Cornell University, 1976): 157.

⁵¹Ibid. hal. 158

Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia kembali mengadakan hubungan kerjasama bilateral dengan Vietnam dibidang Ekonomi dan Perdagangan. Secara garis besar kerjasama perdagangan antara Indonesia-Vietnam didominasi oleh Indonesia melakukan ekspor produk industri, seperti bahan kimia yang terdiri atas obat-obatan, tekstil, otomotif, kertas dan produk dari kertas, Minyak nabati, peralatan elektronik, dan sebagainya. Sedangkan Vietnam melakukan ekspor beras ke Indonesia karena Indonesia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, khususnya beras. Selain itu, Vietnam juga mengekspor bahan mentah yang nantinya diolah oleh Indonesia kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Dengan kata lain, keuntungan dari bekerjasama dengan Vietnam adalah Indonesia dapat meningkatkan produksi dan mutu komoditi ekspornya.⁵²

Hubungan bilateral lain yang dilakukan Indonesia di kawasan Laut Tiongkok Selatan adalah hubungan bilateral antara Indonesia dengan Filipina.

Hubungan bilateral ini muncul karena kekhawatiran Indonesia dan Filipina akan dampak yang dapat merusak lingkungan laut dan merugikan perekonomian masing-masing negara. Sehingga, pada tahun 1981, Indonesia mengadakan kerjasama internasional dengan Filipina dalam *MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network 1981*. Selain mengadakan perjanjian tersebut, Indonesia bersama dengan Filipina mengupayakan kesiapan dan kesiagaannya dalam menghadapi tumpahan minyak yaitu Regional Marpolex.⁵³ Selanjutnya, secara multilateral melalui RPOA-IUU yang terdiri dari 11 negara yang memiliki

⁵² Ibid.

⁵³ Astrid Sabrina Permatasari, "Regional Marine Pollution Exercise (MARPOLEX) Sebagai Upaya Menghadapi Potensi Pencemaran Laut 'Akibat Minyak'", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang), (2018).

kesepahaman yang sama dalam menangani kasus IUU *Fishing*, menjaga keamanan maritime, dan melakukan patrol bersama, khususnya di daerah laut Sulawesi.⁵⁴

Selain kekhawatiran akan tercemarnya air laut akan limbah minyak, Indonesia juga melakukan kerjasama trilateral antara Indonesia-Filipina-Malaysia dengan tujuan untuk meningkatkan dan menjaga keamanan maritim. Kerjasama ini muncul didasarkan pada munculnya konflik di Filipina, khususnya Filipina bagian Selatan dimana beberapa kelompok pemberontak seperti MRLF (*Moro National Liberation Front*), MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), dan *Abu Sayyaf Group* (ASG) mulai muncul dan meresahkan keamanan kawasan perairan Filipina. Permasalahan ini meluas menjadi kasus pembajakan yang disertai penyanderaan di perairan Sulu. Akhirnya, hubungan yang telah dijalin oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina selama ini, menghasilkan sebuah kerjasama trilateral untuk menjaga keamanan maritim di perairan Sulu dari tindakan pembajakan. Kerjasama ini dibentuk sebagai respon ketiga negara ketika ASEAN tidak dapat mengatasi permasalahan keamanan di kawasan tersebut. Kerjasama yang dilakukan ketiga negara bisa dikatakan sudah sangat baik dari segi gagasan ataupun konsep, akan tetapi belum bisa dikatakan cukup berhasil dikarenakan dalam kesepakatan yang dilakukan ketiga negara tersebut masih terus berlanjut permasalahan pembajakan yang berujung pada kasus penyanderaan.

Hubungan bilateral antara Indonesia-Singapura pada era Soekarno sebenarnya tidak begitu erat. Karena Indonesia memandang bahwa Singapura adalah tempat bagi kekuatan-kekuatan asing dan para pemberontak Indonesia

⁵⁴Excellano Ramadhan Uno, "Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU-Fishing di Perbatasan Kedua Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016," (Skripsi, Universitas Diponegoro), (2017).

sebagai batu loncatan untuk bersembunyi dan menyusun rencana. Singapura juga dianggap sebagai tempat tinggal bagi para penyelundup-penyelundup asal Indonesia dan sumber jalur peredaran narkoba. Dahulu memang Pulau Tumasik atau sekarang disebut dengan Singapura merupakan markas bagi para perompak laut yang merompak para pedagang yang berlayar di selat malaka. Selama konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura merupakan bagian integral dari Malaysia, di bawah serangan langsung. Pasukan rahasia dikirim ke Singapura untuk melakukan kegiatan *subversive*.

Pada bulan Agustus 1965, Singapura lepas dari Malaysia dan merdeka. Kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan dengan Indonesia. Namun, pada tahun 1968 hubungan antara kedua Negara tersebut memburuk karena tindakan dua marinir Indonesia yang dikirim pada era Soekarno dalam konfrontasi dengan Singapura meledakkan bom di Orchard Road. Kedua anggota militer tersebut langsung dihukum mati oleh pengadilan Singapura. Pihak Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Soeharto dan Adam Malik berusaha mengusahakan keringanan hukuman dengan meminta merubah hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Namun, permintaan tersebut ditolak. Akibatnya terjadi kerusuhan di Jakarta dan Surabaya dengan merusak kedubes Singapura dan tindakan unjuk rasa anti-Tiongkok karena para pengunjung rasa yakin bahwa etnis Tiongkok Indonesia menaruh simpati terhadap etnis Tiongkok Singapura yang menjadi mayoritas penduduk negara tersebut.

Lain negara, lain pula hubungan kemitraan. Indonesia menjalin hubungan baru dengan Tiongkok dengan ditandatanganinya perjanjian kemitraan strategis pada tahun 2005, dan kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013.

Penandatanganan tersebut dimaksudkan agar terjalin kerjasama yang baik antara Indonesia dengan Tiongkok sehingga pembangunan infrastruktur di kedua negara dapat mendorong peningkatan arus modal kerjasama.

4.3.2. Kekuatan Ekonomi Kawasan LTS

Lingkungan strategis Asia Pasifik telah bertransformasi menjadi kawasan penting dalam percaturan politik global. Kekuatan utama di kawasan ini akan menjadi persaingan strategis berbagai kerja sama baik ekonomi maupun keamanan. Aktifnya Tiongkok dalam kerja sama strategis dengan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir dan kebijakan *One Belt One Road* yang ‘mempersatukan’ kawasan Eurasia merupakan bukti nyata transformasi ini. Di sisi lain, Amerika Serikat juga terus meningkatkan kehadiran dan pengaruhnya di kawasan ini melalui kebijakan Poros Pasifik pada masa Barack Obama dan kini pada masa Donald Trump, Amerika Serikat juga selalu melakukan berbagai kunjungan strategis dan kerja sama berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.⁵⁵

Pemahaman Presiden Jokowi terhadap posisi geostrategis dan geoekonomi Indonesia tersebut diwujudkan dalam kebijakan Poros Maritim yang merupakan langkah penting dalam upaya melakukan sinergitas strategi untuk meningkatkan ekonomi dan disisi yang lain jugasecara langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia telah bergeser dari Barat ke Timur, sehingga perlu bagi Jokowi untuk menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi Poros Maritim dunia sekaligus sebagai bangsa

⁵⁵ Gindarsah, I., “Politics, Security and Defence in Indonesia: Interactions and Interdependencies,” *National Security College Issue Brief*, Mei 4, (2014): 25-32

bahari yang sejahtera dan berwibawa. Kawasan maritim akan menjadi wilayah vital bagi kehidupan ekonomi global dan proyeksi kekuatan nasional kedepan.

Potensi ekonomi yang ada di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) yaitu kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam tersebut dimulai dari sektor perikanan, gas bumi dan minyak.

Gambar 4.1 Potensi Sumber Daya Alam di Sekitar Laut Tiongkok Selatan



Sumber: Dirjenhub Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017)

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa Malaysia merupakan negara dengan produksi minyak tertinggi diantara negara-negara lain di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Malaysia mampu memproduksi minyak sebanyak 5 miliar barel setiap tahunnya, kemudian disusul Taiwan yang mampu memproduksi 3 miliar barel, Tiongkok 1,3 barel, Indonesia (khususnya Natuna) dapat memproduksi minyak sebesar 0,3 miliar barel, dan terakhir adalah Filipina yang memiliki kekuatan produksi minyak sebesar 0,2 miliar barel per tahunnya. Selain minyak, masing-masing negara tersebut memiliki cadangan gas alam yang cukup besar, dimulai dari Malaysia yaitu memiliki cadangan gas alam sebesar 89 Tcf, Indonesia 50 Tcf, Taiwan 20 Tcf, dan Tiongkok 15 Tcf, sedangkan Filipina mampu memproduksi 4 Tcf gas alam dalam satu tahun. Fakta bahwa Laut



Tingkok Selatan merupakan jalur perdagangan dengan nilai US\$5 triliun atau senilai dengan 5x GDP Indonesia, kemudian 50% lalu lintas kapal tanker minyak dunia juga melalui jalur Laut Tiongkok Selatan dimana muatan kapal tanker minyak tersebut 3x lebih besar dari jumlah muatan yang melewati Terusan Suez dan 15x lebih besar dari jumlah yang transit di Terusan Panama. Dengan kata lain, selain setiap negara memiliki cadangan kekayaan alam yang melimpah, wilayah Laut Tiongkok Selatan juga merupakan rute transport laut yang sangat penting sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi di negara-negara sekitar Laut Tiongkok Selatan.

Dengan masing-masing negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah, timbul lah aksi saing klaim di wilayah perairan Natuna. Misalnya saja aksi Tiongkok yang membuat 9 *Dash Lines* (DL) di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan secara sepihak kemudian mengklaim bahwa area di dalam 9 DL tersebut adalah wilayah ZEE Tiongkok. Aksi pembuatan 9 DL ini memicu negara sekitar LTS mengancam Tiongkok, karena 9 DL tersebut masuk kedalam territorial atau wilayah ZEE negaranya, seperti yang terjadi di Kepulauan Spratley dimana kepulauan ini menjadi sengketa antara Tiongkok, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam karena batas ZEE masing-masing negara saling bertumpukan dan mencakup daerah kepulauan Spratly. Hal yang sama juga terjadi di Kepulauan Paracel yang menjadi sengketa antara Tiongkok, Taiwan dan Vietnam.

Indonesia yang dengan jelas mendoktrinkan Poros Maritim Dunia, secara tidak langsung mempromosikan peran ekonomi maritime dan sinergi pembangunan kelautan nasional dengan target pembangunan ekonomi yang

implementasinya termuat dalam pembangunan tol laut. Tol laut sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menciptakan konektivitas laut yang efektif yang diwujudkan dengan adanya kapal yang berlayar secara rutin di wilayah barat hingga timur Indonesia. Sehingga keberadaan tol laut ini dapat menghubungkan koneksi antar pulau dan membantu akses niaga serta industrialisasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat ekonomi negara. Ide ini juga merupakan suatu konsep untuk memperkuat jalur pelayaran yang difokuskan pada Indonesia bagian Timur. Upaya untuk mengkoneksikan jalur pelayaran tersebut akan mempermudah akses niaga tidak hanya bagi daerah kawasan timur Indonesia saja tetapi pada akhirnya juga membuka akses regional dari negara-negara Pasifik bagian selatan menuju negara-negara Asia di bagian timur. Realisasi ide tersebut dimulai dengan pembaharuan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Indonesia berada di peringkat 53, dibelakang Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam dalam hal kinerja logistik dan pengiriman barang internasional negara-negara di dunia. Pembaharuan infrastruktur pelabuhan yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan usaha untuk mengakomodir dan menyediakan sistem dan layanan kepelabuhan internasional, sehingga Indonesia bisa mengambil keuntungan ekonomi dalam distribusi logistik internasional.

Transportasi laut saat ini digunakan oleh sekitar 90% perdagangan domestik dan internasional sehingga pengembangan kapasitas dan konektivitas dari pelabuhan sangat penting untuk penurunan biaya logistik dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan, perkembangannya diversikan dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan, terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sementara itu, strategi pembangunan kelautan dibagi empat perspektif yaitu; *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, learning & growth perspective*. Terdapat 9 strategi pendayagunaan potensi ekonomi kelautan, yakni pengembangan wawasan dan budaya bahari; penguatan SDM dan Iptek; tata kelola laut; pengembangan ekonomi kelautan melalui industri dan jasa kelautan; peningkatan kemampuan pengawasan pemanfaatan sumber daya; mitigasi bencana dan penanggulangan pencemaran laut; konservasi; peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan kawasan.

4.3.3. Kekuatan Militer Kawasan LTS

Sejarah kemaritiman Indonesia membuktikan bahwa NKRI merupakan legasi dari negara-bangsa maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit yang hidup pada abad ke-5 hingga pertengahan abad ke-14. Kesuksesan dari Sriwijaya dalam membangun hubports terkemuka di kawasan Asia Tenggara dan Majapahit dengan lima armada kapal perang terkuat pada zamannya menjadi sebuah titik balik sejarah akan kejayaan Indonesia di masa lampau akan strategi kemaritiman yang kaya. Sekaligus menunjukkan bahwa khayalak masih belum mengeksplorasi 100% tentang wawasan kebahariannya.^{56,57} Kedua hal ini yang menjadi citra diri

⁵⁶ Susilo, I. Basis (ed.), "Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia," Surabaya: CSGS, 2015.

nasional positif di era jauh sebelum PMD diluncurkan sebagai wacana publik yang mengundang perhatian. Sedangkan pengalaman kelam di era penjajahan Belanda dengan pembatasan masyarakat terhadap laut dengan salah satunya menganggap nelayan sebagai kasta terbawah dalam masyarakat.⁵⁸ Dengan demikian trajektori strategi yang akan dicapai adalah mencapai negara bahari sebagaimana Sriwijaya dan Majapahit sebagai kekuatan regional terkemuka. Misalkan pada akhir era Orla, pengadaan KRI Irian menjadi salah satu senjata utama untuk mewujudkan trajektori tersebut.⁵⁹ Sebagaimana di era Orba pada tahun 1980-an mengimpor persenjataan dari negara-negara blok barat yang tergabung NATO seperti Amerika Serikat (AS) dan Jerman Barat. Situasi internasional pada masa itu dapat dikatakan didominasi oleh persaingan antar negara dengan konstelasi Perang Dingin yang berkecamuk antara AS dan Uni Soviet. Sehingga bentrok secara fisik menjadi sebuah hal yang tak terhindarkan.

Negara berperan cukup besar dalam strategi maritim, namun cenderung bersikap inward-looking melihat dari persepsi ancaman pada era pra PMD.

Dibuktikan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi di dalam negeri seperti DI/TII, PRRI/ Permesta, Kahar Muzakar, Andi Azis, Westerling, APRA, dan ancaman-ancaman dari luar untuk membentengi pengaruh ideologi asing.

Ideologi yang dimaksud dalam batasan tertentu juga mengalami pergeseran dari Orba ke Orla, yakni menempatkan kekuatan nekolim seperti AS, Inggris, dan Belanda sebagai ancaman utama pada era Orla dan tak lama berubah menjadi

⁵⁷ Ristian Atriandi Supriyanto, "Developing Indonesia's Maritime Strategy under President Jokowi", *Special Forum*, Februari 22, 2016, , <http://www.theasianforum.org/developing-indonesias-maritime-strategy-underpresident-jokowi-1>, diakses tanggal 21 Mei 2019.

⁵⁸ Pramodya Ananta Toer, "Gadis Pantai, Jakarta, Lentera Dipantara.

⁵⁹ David Miller, "The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present," Wisconsin, Motorbooks International, (2001).

Tiongkok dengan komunismenya. Belum lagi Pembangunan Lima Tahun yang dicanangkan Suharto juga membuat strategi maritim sebagai subordinasi dari strategi daratan pada sebuah administrasi junta militer yang dipimpinnya.⁶⁰ Laut dianggap sebagai parit untuk membentengi ancaman-ancaman tersebut, militer menempatkan AL pada lapisan pertahanan terdepan pada doktrin CADEK dan Tri Ubaya Cakti dengan menempatkan kapal-kapal perang sebagai ‘benteng’ pertama ancaman dari luar yang dimaksud.^{61,62} Karena pada dasarnya di era pra PMD, ada kecenderungan isu-isu kemaritiman seperti yang disinggung Sloggett cenderung pada state-to-state. Contoh lain adalah menghadapi tiga peristiwa besar seperti: (1) Dwikora, konfrontasi dengan Malaysia dan hendak menganeksasi Kalimantan Utara, (2) Trikora, konfrontasi dengan Belanda dan merebut Irian Barat meskipun diselesaikan dengan diplomasi, dan (3) Integrasi Timor Timur melalui Operasi Seroja.

Oleh karena itu, presiden Jokowi melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, berupaya memerangi kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia.

Dalam hal ini, tentu peran pemerintah dibutuhkan untuk bisa menjaga dan mempertahankan serta mengolah kekayaan dan potensi maritim di Indonesia.

Untuk mengolah sumber daya alam laut, diperlukan modernisasi teknologi dan pendanaan yang berkesinambungan dari negara agar bisa memberikan keuntungan

tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga keamanan maritim. Kegiatan memerangi *illegal fishing* tersebut diwujudkan melalui pembakaran dan penembakan kapal-kapal laut asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

⁶⁰ A Booth, (ed.), “The Oil Boom and After: Indonesian Economic Policy and Performance in the Suharto Era,” 1992, Oxford University Press, Singapore,

⁶¹ Andi Widjajanto, “Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia,” (2005)

⁶² Ristian Atriandi Supriyanto, “Developing Indonesia’s Maritime Strategy under President Jokowi”

Kebijakan penembakan kapal ini merupakan strategi Jokowi dalam memberikan efek jera dan penggetar (*deterrence*) terhadap negara lain. Efek penggetar juga sekaligus menjadi sinyal ancaman yang berfungsi sebagai strategi pencegah untuk meyakinkan target bahwa Indonesia secara serius menegakkan kedaulatan teritorialnya dengan melakukan pembakaran dan penembakan kapal asing sehingga diharapkan memberikan efek jera dalam kegiatan *illegal fishing*.⁶³ Maraknya kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di Indonesia semakin merugikan Indonesia. Kerugian tersebut berdampak pada ancaman mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang.

Negara lain seperti Filipina, dalam mempertahankan wilayahnya yang berada di sekitar Laut Tiongkok Selatan adalah dengan memperkuat pertahanan militernya di daerah konflik Laut Tiongkok Selatan. Filipina bekerja sama untuk meningkatkan kekuatannya dengan Amerika. Hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya latihan militer oleh Filipina dengan Amerika di daerah Laut Tiongkok Selatan.

Pada Januari tahun 2013, Filipina melalui Menteri Luar Negeri Filipina, Albert del Rosario, mengajukan Tiongkok ke pengadilan PBB dengan harapan dapat segera menyelesaikan sengketa wilayah di daerah Laut Tiongkok Selatan.

Hal ini kemudian ditanggapi pihak Tiongkok pada November 2015, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi mengatakan, kasus Filipina terhadap Tiongkok di mahkamah arbitrase terkait saling klaim di Laut Tiongkok Selatan telah membuat genting hubungan Beijing dan Manila.

⁶³ Nugraha M.H.R. dan Sudirman A. "Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia," *Jurnal Wacana Politik*, 1 no.2 (2016): 175-182.

Pengajuan Filipina ke pengadilan PBB dijawab oleh pengadilan arbitrase di Belanda yang memutuskan bahwa pihaknya telah memiliki yurisdiksi untuk mendengar sejumlah klaim teritorial yang telah diajukan oleh Filipina terhadap Tiongkok atas kawasan-kawasan yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan.

Pemerintah Filipina menerima keputusan ini dengan baik. Namun sayangnya, Tiongkok melakukan pemboikotan terhadap proses yang berkaitan dengan apa yang diajukan Filipina dan menolak otoritas pengadilan dalam kasus tersebut.

Sehingga, pada tahun 2013 Manila mengajukan kasus ini kepada pengadilan PBB untuk mendapatkan haknya dalam mengeksploitasi perairan Laut Tiongkok Selatan sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut sebagaimana yang diperbolehkan berdasarkan Konvensi mengenai Hukum Laut PBB (UNCLOS).⁶⁴

Pada 12 Juli 2016, setelah tiga tahun melakukan musyawarah, Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag memberikan putusannya mengenai perselisihan Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Filipina. Pengadilan tersebut menyimpulkan, antara lain, bahwa tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim “hak historis” terhadap sumber daya di dalam wilayah laut yang berada dalam “garis sembilan” (9 Dash Line) dan bahwa kapal-kapal Tiongkok secara tidak sah menciptakan risiko tabrakan yang serius. Dengan secara fisik menghalangi kapal Filipina.

Dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, Filipina adalah salah satu negara yang memiliki kemampuan militer paling lemah, pesenjataan dengan minim dana, pasukan yang tidak minim pelatihan, angkatan udara yang terbang tidak dengan

⁶⁴Erik Purnama Putra, “Saling Klaim Laut Cina Selatan Menlu Cina peringatkan Filipina, November 11, 2015, , http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/_global/15/11/11/nxmttx334-saling-klaim-laut-Tiongkok-selatan-menlu-Tiongkok-peringatkan-Filipina, diakses tanggal 21 Mei 2019.

pesawat tempur, dan angkatan laut yang berlayar dengan kapal yang hampir tidak layak. Dengan besarnya ancaman dari Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, alternatif kebijakan dari pemerintahan Manila adalah memperkuat hubungan pertahanan dengan AS, bantuan yang diberikan AS adalah 30 pangkalan di pantai untuk mencegah penyelundupan, perdagangan narkoba, dan gerakan teroris di perbatasan Mindanao dan Borneo, dan juga kapal bertaraf kelas Hamilton telah dijual kepada Filipina dan telah disepakati sebagai kapal induk, dan meningkatkan kemampuan intelijen Filipina di Laut Tiongkok Selatan dengan berbagi intelijen AS. Sekretaris Luar Negeri Filipina Albert Del Rosario menawarkan ide yaitu daripada barang-barang AS dibeli oleh Filipina alangkah baiknya apabila hanya disewakan saja. Reed Bank di wilayah Filipina yang diklaim Tiongkok dan ZEE 200 mil laut diperebutkan karena melimpahnya gas dan minyak. Filipina dan Amerika Serikat telah melaksanakan latihan yang melibatkan 1500 pasukan AS dan Filipina.

Kemudian Filipina melakukan perjanjian *Joint Marine Seismic Undertaking* dengan Tiongkok dan Vietnam. Latar belakang perjanjian ini, disebabkan banyaknya konflik klaim wilayah yang tumpang tindih di wilayah Laut Tiongkok Selatan, sehingga memberikan ketidakseimbangan dan gangguan keamanan hubungan antar negara di Asia Tenggara dengan Tiongkok. Belum diketahui secara pasti apakah dapat suatu celah bagi negara-negara yang berkonflik dapat menjalin kerjasama. Berdasarkan opini dari para ahli geologis, di bawah Laut Tiongkok Selatan terdapat minyak dan gas yang melimpah sehingga Filipina dan Tiongkok sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian eksplorasi yang disebut *Joint Marine Seismic Undertaking* (JMSU) pada perjanjian versi

pertama tahun 2004. Perjanjian versi kedua diikuti oleh Vietnam pada tahun 2005.

Vietnam masuk sebagai pihak JMSU berdasarkan *Declaration on the Code of Conduct* (DOC) di laut Tiongkok Selatan. Di dalam pembukaan perjanjian dinyatakan, “*Whereas, the Parties’ respective governments have expressed their commitment to pursue peaceful efforts to transform the South Tiongkok Sea into an area of peace, stability, cooperation and development.*”

Pada pembukaan tersebut maka dapat diketahui bahwa latar belakang dari perjanjian JMSU adalah untuk menjaga perdamaian, keseimbangan, kerja sama serta pengembangan atas daerah Laut Tiongkok Selatan. Daerah yang akan dieksplorasi adalah daerah sekitar Palawan yang mana terjadi tumpangtindih klaim di Pulau Paracel. Perjanjian JMSU menghindari membahas mengenai kedaulatan dan hanya menekankan agar tidak merusak posisi yang dimiliki masing-masing Negara dalam isu Laut Tiongkok Selatan. Maka dari itu JMSU hanya dibatasi pada eksplorasi laut saja bukan mengeksploitasi.⁶⁵

Perjanjian JMSU yang ditandatangani pada 14 Maret 2005 oleh para presiden dari perusahaan minyak nasional masing-masing pihak perjanjian yaitu Tiongkok, Filipina dan Vietnam di kota Manila, Filipina ini memiliki dua kesepakatan pokok yang telah disetujui bersama. Kesepakatan pertama, para pihak setuju untuk melakukan survei di dalam dasar laut atas adanya potensi penyimpanan hidrokarbon yang melimpah di daerah yang disepakati kurang lebih seluas 143.000 km².

Dari kesepakatan tersebut, Filipina bisa meredam konflik yang sedang memanas di daerah Laut Tiongkok Selatan. Hal ini terjadi karena keikutsertaan

⁶⁵ International Crisis Group, “Stirring up the South China Sea (IV): Oil in Troubled Waters,” *Asia Report* 275, January 26, (2016), hlm. 16

Filipina dalam kesepakatan JMSU yang dimana dalam kesepakatan tersebut

Filipina bekerjasama dengan beberapa negara dalam bidang energi.

Kemudian Vietnam, yang dalam isu terakhir terlibat konflik mengenai pengkaliman atas wilayah perairan Vietnam oleh pihak Tiongkok di daerah Laut

Tiongkok Selatan sehingga Vietnam merasakan ancaman serius pada sector perekonomiannya khususnya di daerah Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, dalam menghadapi ancaman tersebut, Vietnam melakukan diplomasi dan berbagai

kerjasama pertahanan. National Defense White Paper mengatakan bahwa

kerjasama pertahanan merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk

mencapai tujuan pertahanan Vietnam. Oleh karena itu, Vietnam secara aktif

berpartisipasi dalam kerjasama pertahanan dan keamanan di regional dan

internasional. Pada tingkat bilateral, Vietnam mempromosikan kerjasama militer

dengan beberapa negara. Salah satu kerjasama militer yang dilakukan oleh

Vietnam adalah dengan melakukan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat.

Sebenarnya, Vietnam dengan AS memiliki sejarah konflik pada masa

Perang Dingin, khususnya pada periode (1954-1975).⁶⁶ Pertikaian tersebut

berakhir dengan kemenangan rezim sosialis Vietnam Utara, yang kemudian

menyatukan Vietnam Utara dengan Selatan di bawah pemerintahan sosialis. Sejak

saat itu, hubungan diplomatik Vietnam dengan AS tidak terjalin selama lebih dari

15 tahun, karena AS memberlakukan sanksi ekonomi dan memutuskan hubungan

diplomatik dengan Vietnam.⁶⁷

⁶⁶ Cuong, Nguyen Anh, Trinh Thi Nguyet dan Pham Quoc Thanh, "Vietnam- United States Relations After Normalization," Vietnam National University, (2010).

⁶⁷ Oliver Babson, "Diplomacy of Isolation; United States Unilateral Sanctions Policy and Vietnam 1975-1995". WWS Case Study 4/02 (2002).

Kerjasama militer Vietnam dengan AS dilakukan dalam beberapa tahapan.

Tahapan awal yaitu pada periode 1996-1999 yang berfokus pada tiga jenis kerjasama militer, yaitu: konferensi multilateral dan seminar yang diselenggarakan oleh Komando Pasifik AS; kunjungan militer dan kerjasama dalam bidang pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan yang terakhir mengenai keamanan lingkungan. Tahapan berikutnya dilakukan pada periode tahun 2000-2004, dimana AS mendorong hubungan kerjasama militer ke arah yang lebih strategis, seperti upaya AS untuk memodernisasi militer Vietnam dan upaya untuk melakukan latihan pertahanan bersama.⁶⁸

Secara garis besar, alasan Vietnam melakukan MoU dengan Amerika Serikat adalah karena tiga alasan utama. Pertama, Angkatan Laut AS diharapkan dapat beroperasi di kawasan LTS dalam kegiatan kerjasama dan pelatihan dengan Vietnam, melalui USPACOM dan USCG untuk mengimbangi pengoprasian angkatan laut Tiongkok di kawasan tersebut. Sehingga, perimbangan kekuatan di perairan LTS ini akan menghasilkan ekuilibrium, yaitu upaya Tiongkok untuk memperoleh posisi hegemoni di LTS akan bisa digagalkan oleh kekuatan Vietnam dengan AS. Ini terlihat ketika perilaku Tiongkok sebelum kehadiran AS di LTS, cenderung lebih agresif dan menunjukkan ambisi hegemoni di kawasan tersebut.

Namun paska kehadiran AS di LTS, dan terutama paska melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Vietnam, Tiongkok lebih terdorong untuk mengupayakan negosiasi untuk menghindari ketegangan dengan Vietnam.⁶⁹

Alasan kedua adalah untuk mencegah tindakan patroli Tiongkok yang menghalangi kegiatan eksplorasi minyak, serta survei pada landas kontinen dan

⁶⁸Jordan, William, Lewis M. Stern, Walter Lohman, "U.S.-Vietnam Defense Relations: Investing in Strategic Alignment," *The Heritage Foundation Leadership for America*, No. 2707 (2002).

⁶⁹Ibid.

zona ekonomi eksklusif Vietnam. Sebelum MoU, Tiongkok telah melakukan pemotongan kabel eksplorasi yang dipasang oleh kapal perusahaan minyak Vietnam (PetroVietnam) dan menuntut Vietnam menghentikan kegiatan eksplorasi dikawasan tersebut. Atas perilaku Tiongkok ini, kerjasama militer Vietnam dengan AS diharapkan dapat mengamankan kegiatan eksplorasi minyak dan menjaga asset-aset Vietnam di kawasan LTS dari ancaman-ancaman patroli Tiongkok.

Kemudian alasan ketiga adalah karena terdapatnya dukungan negara-negara Asia Tenggara, yaitu berupa persamaan kepentingan antara AS, Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. AS dan negara-negara Asia Tenggara menyatakan keinginannya dalam menjaga kebebasan navigasi di LTS dan mengupayakan penyelesaian damai terhadap sengketa sesuai dengan hukum internasional. Sehingga, Vietnam berani melakukan MoU dengan AS meskipun di kritik Tiongkok. Setidaknya secara diplomatik, Vietnam tidak menghadapi kritik Tiongkok seorang diri.

Hasil kerjasama bilateral antara Vietnam dengan Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa meningkatnya hubungan antara Vietnam dengan Amerika Serikat melalui MoU 2011 itu bukan hanya semata-mata untuk pengelolaan masalah keamanan maritim biasa, namun juga untuk mengimbangi angkatan laut Tiongkok. Dengan pertimbangan kekuatan, diharapkan dapat mengurangi agresifitas patroli Tiongkok yang mengancam aset-aset Vietnam di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

4.3.4 Arti Strategis Kawasan LTS bagi Indonesia

Laut Tiongkok Selatan memiliki wilayah yang sangat strategis untuk jalur perdagangan atau *Sea Line of Trade* (SLOT) dan jalur komunikasi Internasional atau *Sea Line of Communication* (SLOC). Klaim atas kepemilikan Laut Tiongkok Selatan inilah yang menimbulkan konflik antar negara terjadi. Kawasan yang paling banyak diperebutkan oleh negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan adalah Kepulauan Paracel dan Spratly. Hal ini dikarenakan dua kepulauan ini memiliki cadangan sumber daya alam yang berlimpah.

Tiongkok beranggapan bahwa Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah kedaulatan nya. Tiongkok berpedoman pada latar belakang sejarah Tiongkok Kuno tentang peta wilayah kedaulatan Tiongkok. Menurut Tiongkok, pulau-pulau dan wilayah Laut Tiongkok Selatan ditemukan oleh pendahulu Tiongkok yakni Dinasti Han sejak 2 abad sebelum Masehi yang pada abad 12 sebelum Masehi oleh Dinasti Yuan pulau-pulau dan wilayah laut di Laut Tiongkok Selatan di masukkan kedalam peta teritori Tiongkok kemudian diperkuat dengan Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13 sebelum Masehi. Pada awal abad ke-9 dan abad ke-20 Tiongkok mengemukakan bahwa kepulauan Spratly jaraknya kurang lebih 1.100 km dari pelabuhan Yu Lin (P. Hainan) sebagai bagian dari kepulauan Nansha dan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah utaran kepulauan Spratly, jaraknya kurang lebih 277,8km dari Pulau Hainan sebagai bagian dari provinsi Hainan.⁷⁰

⁷⁰Kolonel Karmin Suharna, S. M., "Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional," hlm. 36

Bagi Indonesia sendiri, perubahan arah diplomasi dalam menanggapi isu konflik Laut Tiongkok Selatan adalah perubahan arah posisi yang sebelumnya memimpin keamanan regional menjadi mempertahankan wilayah maritim dari Tiongkok di daerah kepulauan Natuna dimana ZEE Indonesia tumpang tindih dengan 9 Dash Line Tiongkok.⁷¹

Dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia menganggap dirinya sebagai non-penggugat, hal ini memungkinkannya untuk memainkan peran “perantara yang jujur” dalam pembicaraan dan negosiasi tentang masalah ini dari tahun 1990 hingga 2014.⁷² Namun, pelabelan non-penggugat sengketa harus dipahami dalam arti bahwa Tiongkok dan Indonesia tidak memiliki sengketa kedaulatan atas fitur-fitur darat apa pun tetapi masih memiliki klaim maritim yang bersaing.⁷³ Karena klaim maritim yang tumpang tindih pada umumnya dibungkam oleh pemerintah Indonesia demi memfasilitasi dialog di antara negara-negara penuntut, kebijakan lama Indonesia adalah memimpin mekanisme manajemen sengketa alih-alih menegaskan kepentingannya sendiri di Kepulauan Natuna.^{74,75,76} Tampilan menonjol kepemimpinan Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah ketika menteri luar negeri Marty Natalegawa melakukan diplomasi ulang-alik ke Kamboja, Vietnam, dan Filipina setelah Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN pada bulan Juli 2012 gagal mengeluarkan komunike

⁷¹A. L. Connely, “Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges,” *Contemporary Southeast Asia* 37, no. 1 (2015): 1-28.

⁷²A. L. Connely, “Indonesian in the South China Sea: Going it alone (Analysis),” Lowy Institute for International Policy, Sydney, (2016) hlm. 3

⁷³Ibid., hlm. 4

⁷⁴A. L. Connely, “Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges,”

⁷⁵Ibid., hlm. 1

⁷⁶Roberts, C.B., dan Widyaningsih, I. “Indonesian Leadership in ASEAN: Mediation, Agency and Extra-Regional Diplomacy,” In C.B. Roberts, A.D. Habir & L.C. Sebastian (Eds.), “Indonesia’s Ascent: Power, Leadership, and Regional Order,” (2015): 264-286, Palgrave MacMillan, London.

bersama mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan.⁷⁷ “Prinsip-Prinsip Enam Titik ASEAN tentang Laut Tiongkok Selatan” kemudian disetujui dan diterima oleh semua negara anggota ASEAN melalui masing-masing menteri luar negeri.⁷⁸

Dengan kata lain, Di bawah Presiden Jokowi, telah terjadi pergeseran peran dan pendekatan Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dari mengambil peran kepemimpinan dalam sengketa regional menjadi penegasan kedaulatan di lepas pantai Kepulauan Natuna. Terlepas dari perubahan kebijakan ini, dan serupa dengan posisinya di ASEAN Centrality, Presiden Jokowi tetap konsisten dalam menyuarakan kebutuhan ASEAN untuk bersatu dan bekerja sama dengan Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Konflik Indonesia-Tiongkok diatas perairan Natuna terjadi pada 19 Maret 2016 di mana kapal penangkap ikan Tiongkok yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dipaksa untuk dilepaskan oleh Penjaga Pantai Tiongkok ketika kapal yang sebelumnya mendekati perairan teritorial Indonesia.⁷⁹

Ini terkait erat dengan tindakan keras Presiden Jokowi terhadap penangkapan ikan ilegal dengan secara publik menenggelamkan kapal nelayan asing yang disita sebagai efek jera bagi nelayan ilegal lainnya.⁸⁰ Dua hari setelah insiden itu, Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti membuat pernyataan bahwa keputusan Tiongkok untuk mengganggu penangkapan Indonesia didasarkan pada kekhawatiran bahwa kapal penangkap ikan Tiongkok lainnya mungkin tenggelam

⁷⁷Ibid.

⁷⁸ Emmers, R, “Indonesia’s role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership,” *The Pacific Review* 27, no. 4: 543-562.

⁷⁹A. L. Connely, “Indonesian in the South China Sea: Going it alone (Analysis),” hal. 5

⁸⁰Ibid.

di bawah tindakan penangkapan ikan ilegal Presiden Jokowi.⁸¹ Perlu dicatat bahwa Indonesia telah menenggelamkan satu kapal Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia dekat Kepulauan Natuna pada 20 Mei 2015. Ini menggambarkan bentrokan antara kebijakan dalam negeri Presiden Jokowi tentang urusan maritim dengan peran kepemimpinan Indonesia untuk mengurangi perselisihan regional di Laut Tiongkok Selatan.

Aksi menteri perikanan dan kelautan dalam menanggapi IUU tersebut sudah dapat dikatakan baik, karena memang ditemukan kapal-kapal Tiongkok yang melintasi batas ZEE Indonesia serta melakukan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang harus diselesaikan tidak hanya dalam lingkup internasional, namun juga dalam lingkup nasional.

Salah satu rencana pembangunan dalam menunjang poros ekonomi maritime adalah dengan melakukan pembangunan tol laut. Gagasan ini kemudian dikembangkan menjadi doktrin keamanan maritime, bahwa Indonesia harus berdaulat di perairan lautnya sehingga harus dengan tegas menghukum pelanggaran terhadap kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal dengan cara menenggelamkan kapal asing-ilegal tersebut.

Secara sederhana, konsep tol laut menghubungkan koneksi antar pulau dan membantu akses niaga serta industrialisasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Konsep tol laut diimplementasikan juga sebagai peningkatan kinerja transportasi laut melalui perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional, penurunan dwelling time sebagai penghambat kinerja

⁸¹ Ariyanti, F., "Ini Sebab RI Gagal Tangkap Kapal Pencuri Ikan Tiongkok di Natuna," 2016, <http://bisnis.lip>, diakses tanggal 22 Mei 2019.

pelabuhan nasional, serta peningkatan peran transportasi laut. Dengan subsidi dan pembangunan tol laut diharapkan bisa mengembankan perekonomian, pertahanan dan kesatuan wilayah perairan Indonesia.

Peran transportasi laut melalui tol laut merupakan program pemerintah untuk memberikan kepastian kapal datang dan berangkat sesuai jadwal secara teratur dengan ada atau tidak adanya barang, kapal harus tetap berangkat. Rute yang dikembangkan dalam program tol laut bukanlah rute favorit domestik selama ini, karena feri komersial masih banyak yang belum aktif dalam jalur pelayaran ke daerah timur Indonesia. Operator kapal yakni PT. Pelni tidak akan rugi karena pemerintah telah menyiapkan *Public Service Obligation* (PSO) untuk menutupi biaya operasional jika kapal kargo sepi.⁸² Oleh karena itu, melalui tol laut pusat pertumbuhan daerah tertinggal, serta pembangunan transportasi intrapulau dan antarpulau dapat diperbaiki sehingga menunjang pemerataan ekonomi diseluruh kawasan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mengembalikan sistem jadwal kapal yang teratur (*regular shipping*) ke Indonesia Timur yang sebelumnya sempat dihapuskan. Keteraturan tentang jadwal keberangkatan kapal tidak hanya memudahkan para pengusaha besar untuk menentukan kiriman logistik barang tetapi juga memudahkan pedagang dan petani kecil untuk membawa barangnya keluar daerah. Untuk mewujudkan pemerataan, juga diperlukan pembangunan dengan konsep *ship promote the trade*, dimana pembangunan konektivitas di wilayah timur Indonesia diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangannya. Pengembangan pelayanan transportasi laut sebagai tulang

⁸² Mandi, N.B.R. "Development of Ferry Port as a Complement of "Tol Laut": Case Study on Ferry Port of Ketapang," *International Refereed Journal of Engineering and Science* 6, no.3, (2017): 31-37.

pung-gung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya pemerataan.

Banyaknya pembangunan pelabuhan tersebut kini telah menyebabkan disparitas harga kebutuhan pokok menurun. Berdasarkan data statistik dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, disparitas harga sudah turun lumayan besar, sekitar 30% sampai 40% pada tahun 2016.⁸³ Upaya cepat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tol laut diharapkan bisa terwujud melalui pembangunan pelabuhan. Dalam tempo tiga tahun sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, Pemerintahan Jokowi telah membangun 150 pelabuhan besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah Indonesia Timur. Selain itu, juga terdapat enam rute kapal terjadwal yang melayani 24 simpul pelayaran tol laut. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir proyek tol laut masih ditemukan beberapa kendala dan harus dievaluasi, terutama dalam hal desain rute tol laut, ukuran kapal logistik dan efektifitas pelayaran nasional. Ukuran kapal-kapal yang melayani simpul-simpul tol laut tersebut masih belum sesuai dengan arus logistik dan jumlah penumpang. Selain itu, sebagian rute-rute tersebut melewati jalur yang dilalui perusahaan swasta, sehingga menjadi tidak efisien.⁸⁴

Sebagai upaya evaluasi tersebut, pemerintah telah melakukan pembatasan masuknya kapal-kapal asing kedalam perairan Indonesia dengan menyediakan dua pelabuhan internasional yaitu Kuala Tanjung dan Bitung. Dua pelabuhan

⁸³ Rizal Ramli, "Poros Maritim Jokowi Bukan Mimpi, Sudah Terasa Dampak Positifnya," *Republika*, 2017, diakses tanggal 22 Mei 2019, <http://politik.rmol.co/read/2017/08/27/30460/Rizal-Ramli:-Poros-Maritim-Jokowi-Bukan-Mimpi,-Sudah-Terasa-Dampak-Positifnya>

⁸⁴ Mandi N.B.R., "Development of Ferry Port as a Complement of "Tol Laut": Case Study on Ferry Port of Ketapang,"

internasional tersebut akan menjadi ruang tamu bagi kapal-kapal asing dari berbagai negara. Terbukanya akses regional melalui implementasi konsep tol laut dapat memberikan peluang industri kargo dan logistik nasional untuk berperan dalam distribusi internasional. Dengan posisi pelabuhan internasional di wilayah terdepan Indonesia maka kapal yang melakukan ekspor dan impor barang akan berlabuh di wilayah pinggiran Indonesia. Untuk melanjutkan distribusi logistik ke dalam wilayah akan tetap menggunakan kapal lokal Indonesia. Dengan menyediakan dua pelabuhan internasional, pengawasan kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia juga menjadi mudah untuk diidentifikasi. Dengan pembatasan ini diharapkan bisa menjadi sarana pemudahan kontrol Angkatan Laut dan Bakamla dalam hal pengawasan keamanan laut. Strategi ini juga tidak hanya meminimalisir pergerakan kapal dagang internasional yang saat ini masih sangat banyak didominasi kapal berbendera asing di wilayah dalam Indonesia tetapi juga dapat meminimalisir penetrasi produk asing hingga wilayah dalam Indonesia. Kontrol keamanan yang dilakukan otomatis menjadi lebih mudah. Upaya ini merupakan sinergi antara kebijakan ekonomi sekaligus memuat aspek pertahanan dan keamanan didalamnya.

Selain dua pelabuhan internasional, pemerintah juga menyiapkan enam pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Sorong. Berbagai pembenahan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut juga harus diikuti dengan pembangunan sarana prasarana keamanan dan modernisasi peralatan militer didalamnya (Kadar, 2015). Melalui implementasi yang dikembangkan dalam konsep tol laut, maka akan tercipta keunggulan kompetitif bangsa dan penguatan industri nasional disertai

pemerataan dan disparitas harga yang rendah di seluruh wilayah nusantara.

Selain perbaikan dan perhatian terhadap pengembangan pelabuhan dan transportasi laut, untuk mendorong kegiatan maritim Indonesia menjadi lebih

modern dan mudah digunakan oleh masyarakat diharapkan juga peran pemerintah

dari sisi pertahanan dan penguasaan laut sehingga Indonesia mampu menjamin

penggunaan laut untuk kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan batas

wilayah laut juga menjadi penting untuk diselesaikan agar dapat memberikan

kepastian hukum atas batas wilayah negara.⁸⁵ Menggunakan penyelesaian

masalah pertahanan dan perbatasan diharapkan Indonesia dapat mempererat

hubungan bilateral serta mendorong kerjasama perbatasan antarnegara termasuk

dalam pengelolaan kawasan maritim.

⁸⁵ Hardiana, I. dan Trixie, B., "Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim (Online). Sekretariat Kabinet RI," Oktober 21, 2014, diakses tanggal 22 Mei 2019, <http://setkab.go.id/menju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/>

BAB V

**IDENTIFIKASI *POWER PROJECTION* INDONESIA
DI KAWASAN LAUT TIONGKOK SELATAN
PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO**

Pembahasan mengenai identifikasi *power projection* Indonesia khususnya dalam aspek militer, memiliki dua kategorisasi yang berbeda. Pertama merupakan *Hard Military Power Projection* yang dibagi menjadi lima identifikasi berbedan dan yang kedua merupakan *Soft Military Power Projection* yang dibagi menjadi empat identifikasi berbeda. Kategorisasi ini memberikan kemudahan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan upaya Indonesia dalam menjalankan strategi *power projection*-nya. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan dan membahas mengenai aksi militer apa saja yang dijalankan oleh Indonesia dalam mengoperasikan *power projection*-nya pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Pandangan Jokowi terhadap Laut Tiongkok Selatan, bahwa Indonesia tidak perlu terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan jika manfaat yang didapat dari keikutsertaan tersebut tidak ada. Pada dasarnya sebagai negara terbesar di ASEAN dan paling netral menanggapi kasus ini, peran Indonesia menjadi dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Pernyataan Jokowi menjadi sangat mengejutkan karena ASEAN sendiri telah mengupayakan *Declaration of Conduct (DoC)* dan kemudian *Code of Conduct (CoC)* untuk menekan tensi konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Meski demikian, eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan saat ini memang semakin tinggi. Tensi ketegangan di kawasan Laut Tiongkok Selatan meningkat. Ketegangan ini sudah terjadi sejak lama dan bersifat pasang surut.

Ketegangan di kawasan ini kembali meningkat sejak awal Mei 2014. Peningkatan eskalasi ini dipicu pembangunan kilang minyak Tiongkok His Yang Shi You 981 di wilayah yang dianggap masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental Vietnam.⁸⁶

Berbicara ASEAN, negara anggotanya sendiri memiliki sikap yang berbeda-beda dalam memandang konflik Laut Tiongkok Selatan. Filipina dan Vietnam telah secara terang-terangan menunjukkan ketegasan mereka untuk tidak akan menyerahkan wilayah yang disengketakan. Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai claimant states lainnya tidak menunjukkan sikap apapun karena kepentingan nasional mereka dan wilayah yang disengketakan belum pernah mengalami benturan langsung dengan Tiongkok. Kemudian sikap Laos dan Myanmar justru berpihak kepada Tiongkok karena aktifitas ekonomi mereka sangat bergantung pada Tiongkok. Sedangkan Singapura dan Thailand masih mengamati untung rugi dari keterlibatannya dalam konflik ini.

5.1 *Soft Military Power Projection*

Klasifikasi pertama merupakan *Soft Military Power Projection*, dimana penulis akan menjelaskan mengenai strategi *power projection* yang dilakukan Indonesia dengan cara implementasi yang berbeda, yaitu penulis akan melihat strategi Indonesia dalam menggunakan kekuatan militernya untuk mempengaruhi

⁸⁶Sindo News, "Indonesia di Pusaran Konflik Laut Tiongkok Selatan", <http://nasional.sindonews.com/read/1055705/19/indonesia-di-pusaran-konflik-laut-Tiongkok-selatan-1445604047>, diakses 09 Januari 2020.

negara lain, memperkuat hubungan politik dan diplomasi kekuatan Indonesia.

Dengan begitu, akan terlihat perbedaan yang signifikan antara *soft military power projection* dengan *hard military power projection*. Meski keduanya menggunakan kekuatan militer, namun pengimplementasian strateginya dengan cara yang berbeda.

Klasifikasi *Soft Military Power Projection* ini memiliki beberapa identifikasi yang dapat digunakan untuk memperoleh analisa yang lebih spesifik mengenai implementasi *soft military power projection* ini. Klasifikasi ini memiliki empat identifikasi, diantaranya adalah *Sea Lines of Communication (SLOC)*, *Humanitarian Relief, non-combatan Operation*, dan *Peacekeeping*.⁸⁷ Keempat identifikasi ini memiliki karakter dan cara implementasi yang berbeda-beda sehingga hal ini membantu penulis untuk melakukan analisa mengenai bagaimana strategi implementasi *power projection* Indonesia di Kawasan Laut Tiongkok Selatan

5.1.1 *Securing Sea Lines of Communication*

Identifikasi pertama dalam klasifikasi *Soft Military Power Projection* adalah *securing sea lines of communication (SLOC)*. Pada identifikasi ini, penulis akan menjelaskan mengenai aktifitas perlindungan jalur kapal laut dari semua serangan baik dari negara lain (*hostile state*) atau ancaman yang berasal dari aktor-aktor lain selain negara (*irregular threats*). Perlindungan yang dilakukan negara dalam SLOC menurut Ladwig dibagi menjadi dua, yaitu dengan *sea security partnership* dan *naval military joint exercise*. Hal ini dianggap sangat

⁸⁷ Ibid.

penting karena Indonesia berada di Jalur Maritim Sutera Tiongkok sehingga untuk melindungi wilayahnya yang digunakan dalam jalur internasional tersebut. Alasan mengapa Indonesia berada di Jalur Maritim Sutera Tiongkok adalah karena Indonesia terletak di posisi geostrategi, yaitu diantara dua samudera dan dua benua sehingga membuat Indonesia memiliki akses langsung ke padar terbesar di dunia.

Selain dilewati Jalur Maritim Sutera Tiongkok, wilayah Indonesia juga dilewati oleh jalur *Sea Lanes of Communication (SLOC)* yang menjadi jalur pelayaran *container* global. Wilayah Indonesia yang berada di *SLOC* adalah Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan jalur pelayaran *container global*. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan komoditas strategis maupun komoditas ekspor. Sehingga, dalam usahanya untuk saling terhubung antara satu pulau dengan pulau lainnya, Indonesia memiliki jalur transportasi laut yang memiliki infrastruktur dan kinerja pelabuhan yang efektif dan efisien dengan tujuan untuk memperlancar transportasi barang bermuatan berat.

5.1.1.1 Sea Security Partnership

Sea Security Partnership merupakan definisi pertama dari *Securing Sea Lanes of Communication* dan merupakan upaya kerjasama yang dilakukan suatu negara untuk menciptakan keamanan di area maritim atau perairan negara tersebut. Konsep keamanan maritim ini semakin populer dengan meningkatnya ancaman-ancaman yang terjadi di kawasan maritim suatu negara. Adanya upaya masing-masing negara, khususnya yang memiliki batas wilayah perairan yang sama misalnya pada kawasan Laut Tiongkok Selatan, dalam meningkatkan

kemampuan Angkatan Lautnya membuat masing-masing negara merasakan kekhawatiran akan keamanan *sea lanes of communication* negaranya.

Indonesia sendiri, telah melakukan upaya keamanan di kawasan maritimnya dengan melakukan *Sea Security Partnership*. Kerjasama keamanan maritim diawali Indonesia ketika Indonesia bergabung dan menjadi anggota sekaligus pemimpin di IORA (*Indian Ocean Rim Association*), melakukan promosi diplomasi ekonomi maju melalui kekuatan laut. *Sea Security Partnership*

yang telah dilakukan Indonesia terkait ambisi Indonesia untuk mewujudkan *power projectionnya* yang dalam hal ini merupakan strategi untuk mempertahankan kedaulatan di kawasan Laut Tiongkok Selatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terbagi dalam 3 kategori.

Bagi Presiden Jokowi sendiri, beliau melihat konsep Indo-Pasifik ini sebagai salah satu platform untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian maritim regional. Selain itu, pengembangan konsep Indo-Pasifik ini juga dilihat sebagai sumber ekonomi, pusat perdagangan dan industri dunia. Indonesia sendiri merupakan Ketua Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) pada periode 2015-2017. IORA sendiri sebenarnya telah ada sejak tahun 1995, ketika PM Afrika Selatan Nelson Mandela melaksanakan kunjungan ke India dengan tujuan untuk menginisiasi terbentuknya *Indian Ocean Rim Initiative*. Sejak saat itu Konferensi Tingkat Tinggi mulai dilaksanakan dan kemudian Indonesia menjadi bagian dalam hal tersebut. Pada pertemuan ke-6 yang dilakukan tahun 2016, Indonesia berusaha agar pertemuan tersebut setidaknya mampu menyusun draft dari *IORA Concord*. Dapat dilihat bahwa konsep Indo-Pasifik ini sebenarnya telah

diakui oleh Indonesia dan beberapa negara mitra lainnya, hanya saja tidak banyak *exposure* ke publik.⁸⁸

Pertama, Indonesia dengan aktif melakukan *workshop* dengan tema *Managing Potential Conflicts in the South China Sea* dengan tujuan sebagai bentuk *preventive diplomacy* agar dapat menciptakan kepercayaan di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik sekaligus mencegah konflik yang sudah ada agar tidak terjadi secara berkelanjutan. Dalam menjamin keamanan maritim atas perairannya, Indonesia harus mendiskusikan dan membuat kesepakatan untuk penetapan batas laut dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia terutama disekitar perairan Laut Natuna Utara. Sementara diskusi dan pertemuan serta kesepakatan telah dibuat, namun, masih banyak yang harus dilakukan, terutama penetapan batas laut antara Indonesia dan Malaysia yang terus menimbulkan masalah dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Disamping itu, pemerintah Indonesia ingin membantu meredakan dan memecahkan permasalahan di kawasan Laut Tiongkok Selatan ini secara kolektif dalam artian bahwa seluruh negara-negara anggota ASEAN turut terlibat dalam negosiasi dengan Tiongkok. De-ekskalasi tersebut dilakukan dalam rangka membangun stabilitas dan keamanan pada kawasan secara *multilateral* merupakan sebuah hal yang harus dilakukan agar dapat mencapai *consensus*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas konflik tersebut baik untuk pihak yang terlibat sengketa maupun yang tidak terlibat sengketa. Salah satu bentuk peran aktif pemerintah Indonesia adalah dengan mengajukan diri untuk menjadi mediator dalam perundingan, seperti saat konferensi ASEAN di Kamboja pada tahun 2012

⁸⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) Sepakati Langkah Strategis Penguatan Kerja Sama," <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/IORA-sepakati-langkah-strategis-penguatan-kerja-sama.aspx>, diakses 1 Mei 2018.

lalu. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini pada forum-forum internasional.

Tatkala melakukan *partnership*-nya, hingga saat ini masih dapat dilihat dari Indonesia yang aktif melakukan workshop setiap tahunnya sejak tahun 1990 dengan mengusung tema *Managing Potential Conflicts in the South China Sea* sejak. *Workshop* tersebut diselenggarakan dengan tujuan sebagai bentuk *preventive diplomacy* agar dapat menciptakan kepercayaan di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik sekaligus mencegah konflik yang sudah ada agar tidak terjadi secara berkelanjutan. Disamping itu, tujuan utama dari *workshop* tersebut adalah untuk mengelola potensi konflik melalui kerjasama sengan memajukan *confidence building measures* yaitu untuk meningkatkan rasa saling percaya antar negara-negara yang terlibat sengketa dan mendorong pertukaran pandangan terkait program dan proyek kerjasama pemanfaatan potensi di Laut Tiongkok Selatan. Bersama dengan adanya *Workshop* ini, Indonesia cukup jelas menunjukkan perannya sebagai fasilitator atas berjalannya perdamaian untuk mewujudkan stabilitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Kedua, melakukan perjanjian bilateral dengan Amerika yaitu perjanjian *partnership* strategis pada tahun 2015 dan di tahun yang sama, Indonesia juga melakukan perjanjian bilateral dengan Thailand untuk membentuk kelompok kerja dalam rangka menangani praktik penangkapan ikan secara *illegal* di masing-masing negara, kemudian dengan masalah yang sama, yaitu *illegal fishing*, Indonesia juga melakukan kerjasama regional seperti *ASEAN-US Meeting on Anti-Privacy and Couter-Terrorism*, *ASEAN Maritime Forum*, *ASEAN-Japan*

Maritime Port and Transport Security, dan kerjasama antar kawasan yaitu ASEAN-EU Experts Meeting on Maritime Security.

Perjanjian bilateral juga dilakukan Indonesia untuk mencapai *sea security partnership* baik di kawasan Laut Tiongkok Selatan maupun lainnya. Perjanjian bilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia terkait dengan permasalahan di Laut Tiongkok Selatan salah satunya adalah dengan Vietnam yang dilakukan pada tahun 2013. Pada era kepemimpinan presiden Jokowi, pada tahun 2015, Presiden Jokowi juga menandatangani perjanjian *partnership* strategis dengan Amerika Serikat pada saat kunjungannya ke Washington DC.⁸⁹ Pendekatan kebijakan luar negeri yang berfokus pada membangun perjanjian khusus dengan negara-negara tetangga terdekat adalah bagian dari mempertahankan kebijakan luar negeri Indonesia yang konsentris dan mengamankan keamanan dan kepentingan ekonominya.

Selain melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara diatas, Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral dengan Thailand. Kerjasama bilateral ini dibentuk berdasarkan adanya ancaman *illegal fishing* di kawasan perairan baik Indonesia maupun Thailand. Sehingga pada bulan April 2015, Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Thailand yaitu dengan membentuk kelompok kerja dalam rangka menangani praktik penangkapan ikan secara illegal di kawasan perairan masing-masing negara.⁹⁰ Disamping itu,

⁸⁹ Prameswaran, P., "The New US-Indonesia Strategic Partnership after Jokowi's Visit: Problems and Prospects", *Brooking Institute*, 8 Desember 2015, <http://www.brookings.edu/opinions/the-new-u-u-indonesia-strategic-partnership-after-jokowis-visit-problems-and-prospects/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2019

⁹⁰ M. Najeri Al Syahrin, "Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia, Indonesian Perspective", 2017, https://www.researchgate.net/publication/327477984_Kebijakan_Poros_Maritim_Jokowi_dan_Sinergitas_Strategi_Ekonomi_dan_Keamanan_Laut_Indonesia/link/5b91ba03299bf147391fabda/download 3(1): 1-17, diakses 8 September 2019

Indonesia jugamelakukan kerjasama perikanan yang diagendakan dalam ASEAN untuk mengatasi isu-isu *illegal fishing* tersebut. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan ASEAN adalah melakukan kerjasama keamanan maritime regional seperti *ASEAN-US Meeting on Anti-Privacy and Couter-Terrorism*, *ASEAN Maritime Forum*, *ASEAN-Japan Maritime Port and Transport Security*.

Kerjasama antar kawasan yang telah dilakukan Indonesia adalah ASEAN-EU *Experts Meeting on Maritime Security*.⁹¹ Hal ini merupakan kesempatan untuk mengatasi permasalahan penangkapan ikan illegal sekaligus permasalahan keamanan karena melibatkan organisasi kawasan.

Ketiga, Indonesia melakukan kerjasama berupa *regional initiative*. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan aktifitas perikanan di wilayah perairan sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.

Dengan melakukan *regional initiative*, negara yang tergabung secara tidak langsung bersama-sama berupaya mengedepankan tanggung jawab manajemen kualitas perikanan yang diproduksinya dan selanjutnya dapat melawan *illegal fishing*. Kerjasama ini terdiri dari 9 negara anggota di kawasan Asia Tenggara, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darusslam, Thailand, Filipina, Singapura dan Timur Leste yang kemudian ditambah denan dua negara lain diluar

ASEA yaitu Australia dan New Zealand. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi isu IUU Fishing atau yag dikenal dengan *illegal fishing* di

⁹¹ Junttila, K. & Weatherby, C, "Indonesia's Global Maritime Nexus: Implications for Illegal Fishing", 19 September 2016. tersedia di <https://www.stimson.org/content/indonesias-weatherforcat-hazy-with-a-chance-of-clear-skies>, diakses 30 Mei 2018.

kawasan regional (yaitu Laut Tiongkok Selatan; Laut Suu-Sulawesi dan Laut Arafura).

Kerjasama regional lain yaitu dengan mengikuti ARF (ASEAN Regional Forum) yang didirikan di bawah naungan IMO, anggota ARF tidak hanya berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Ini terdiri dari 27 negara anggota, yang termasuk 10 negara anggota ASEAN, 10 mitra dialog ASEAN, yang meliputi Australia, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat, satu pengamat ASEAN, Papua Nugini, dan juga Korea Utara, Mongolia Pakistan, Timor Leste, Bangladesh dan Sri Lanka.

ARF didirikan untuk mendorong keputusan konsensus terhadap kelembagaan minimum. Ini berfokus pada harmonisasi langkah-langkah dalam mencapai stabilitas regional. Instrumen ini, bagaimanapun, hanya deklarasi bahwa negara-negara ARF bersedia melakukan kerja sama lebih lanjut untuk mengatasi perompakan dan perampokan bersenjata di laut, tanpa mekanisme detail tentang bagaimana kerja sama itu akan berjalan. Itu juga tidak merinci tentang kewajiban apa pun dan dengan demikian meskipun disepakati untuk bekerja sama tetapi kerja sama tersebut masih dalam kerja sama berbasis sukarela.⁹² Berbeda dengan ARF yang tidak spesifik.

5.1.1.2 *Naval Military Joint Exercise*

Military exercise atau latihan militer merupakan penggunaan sumber daya militer dalam pelatihan untuk operasi militer, baik mengeksplorasi efek peperangan atau menguji strategi tanpa melakukan pertempuran yang sebenarnya.

⁹² Puspitawati, D, "Urgent Need for National Maritime Security Arrangement In Indonesia: Towards Global Maritime Fulcrum", *Indonesian Journal of International Law*, 14 No.3 (2017): 321-347.

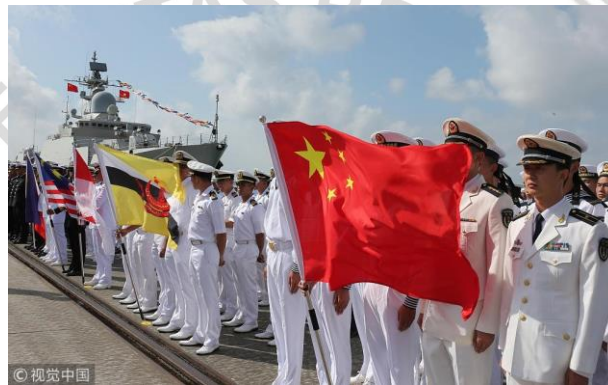
Military exercise juga bertujuan untuk memastikan kesiapan tempur pasukan yang ditugaskan atau ditempatkan sebelum dikirim dari pangkalan. Sedangkan *naval* adalah angkatan laut. Disamping itu, *joint exercise* dapat diartikan secara parsial sebagai gabungan dari beberapa angkatan bersenjata yang berbeda dari beberapa negara gabungan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa *naval military joint exercise* adalah latihan operasi militer gabungan antar beberapa angkatan laut dari beberapa negara dengan tujuan untuk menguji strategi, misalnya strategi pertahanan, tanpa melakukan pertempuran yang sebenarnya. Dalam pengimplikasian Indonesia sebagai *Power Projection Indoensia* pada saat era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah melakukan *naval military joint exercise* terkait isu *illegal fishing* dan 9 DL di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. *Naval military joint exercise* selama era pemerintahan Presiden Jokowi terdiri dari 3 upaya yaitu *joint patrol*, *joint exercise*, dan *joint mission*.

Pada *joint patrol* atau dikenal dengan patrol damai bersama dilakukan di kawasan Laut Tiongkok Selatan, dan dalam pelaksanaannya Indonesia tidak hanya melakukan satu kali *joint patrol* namun beberapa kali dan dengan beberapa negara yang berbeda, misalnya: 1) *joint patrol* yang dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok pada tahun 2016; 2) *joint patrol* antara ASEAN dengan Tiongkok, dimana Indonesia merupakan anggota dari ASEAN dilakukan di Zhanjiang, provinsi Guangdong pada tahun 2018 dan dikenal dengan Latihan Maritim ASEAN-Tiongkok-2018; 3) *joint patrol* antara Indonesia dengan Australia yang dilakukan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk memastikan keamanan perairan khususnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan bagian Timur dengan konsep *peace*

patrol; 4) *joint patrol* yang dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam pada tahun 2019 untuk menolak doktrin Deutere di kawasan Laut Tiongkok Selatan; 5) *joint patrol* yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia dan Filipina pada tahun 2017 dengan tujuan untuk menutup akses militan di kawasan Laut Sulu sebagai bentuk pertahanan setelah adanya masalah teroris yang sempat menyerang kawasan perairan Filipina yang juga berada dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan bagian Timur.⁹³

Gambar 5.1 Latihan Angkatan laut China dan 10 negara ASEAN Tahun 2018



Sumber: chinadaily

Joint patrol juga telah dilakukan Indonesia dengan Tiongkok yaitu dengan tujuan kedua negara dapat melakukan patrol damai bersama di kawasan Laut Tiongkok Selatan guna meredakan ketegangan serta mampu mengelola potensi konflik sehingga tidak perlu adanya pihak lain yang ikut dalam penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan.⁹⁴ Dalam menanggapi hal tersebut, Angkatan laut Tiongkok dan 10 negara ASEAN memulai latihan maritim bersama pertama mereka di Zhanjiang, provinsi Guangdong, pada hari Senin 22 Oktober 2018.

⁹³ Asni Ovier, “ Soal Joint Patrol di Laut China Selatan Pemerintah RI di Minta Hati-hati”, <https://www.beritasatu.com/nasional/316027/soal-joint-patrol-di-laut-china-selatan-pemerintah-ri-diminta-hatihatihati>, (2015), tanggal akses 21 Agustus 2019.

⁹⁴ Asni Ovier. 2015. Soal “Joint Patrol” di Laut Tiongkok Selatan, Pemerintah RI Diminta Hati-hati, tersedia di <https://www.beritasatu.com/nasional/316027/soal-joint-patrol-di-laut-china-selatan-pemerintah-ri-diminta-hatihatihati>. Diakses tanggal 22 Agustus 2019

Latihan ini akan mencakup penerapan Kode untuk Pertemuan yang Tidak Direncanakan di Laut, serta operasi pencarian dan penyelamatan serta komunikasi. Latihan Maritim ASEAN- Tiongkok -2018 bertujuan terutama untuk memajukan kerja sama pertahanan dan keamanan maritim antara Tiongkok dan ASEAN, serta penerapan Kode untuk Pertemuan yang Tidak Direncanakan di Laut,⁹⁵ kata Zhu Jianda, komandan Tiongkok dari komando gabungan berbasis pantai untuk latihan.

Selain melakukan *joint patrol* dengan Tiongkok, sebelumnya yaitu pada tahun 2016 Indonesia pernah melakukan *joint patrol* dengan Australia dengan alasan untuk memastikan perairan yang lebih aman. *Joint patrol* ini dilaksanakan di Laut Tiongkok Selatan bagian Timur. Meski Indonesia tidak secara resmi menjadi penuntut dalam perselisihan Laut Tiongkok Selatan, Jakarta adalah pihak yang berkepentingan karena sembilan garis putus-putus Tiongkok tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna yang kaya sumber daya. Pendekatan Indonesia terhadap masalah ini dapat digambarkan sebagai “keseimbangan halus atau *delicate equilibrium*”⁹⁶ di mana ia berupaya untuk melibatkan para aktor secara diplomatis dan menekankan keamanan lembaga-lembaga regional dan hukum sementara juga mengejar suatu serangkaian langkah-langkah keamanan, hukum dan ekonomi yang dirancang untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, menegaskan bahwa *join patrol* ini merupakan sebuah *peace patrol* dengan Australia. *Peace patrol* ini

⁹⁵ Li Wenfang, China, ASEAN begin joint naval drill.

⁹⁶ Prashanth Parameswaran, “The Diplomat: Are Indonesia and Australia Mulling South China Sea Joint Patrols”, (2016), <https://thediplomat.com/2016/10/indonesia-australia-joint-patrols-in-the-south-china-sea/>, diakses tanggal 22 Agustus 2019

akan membawa perdamaian karena bertujuan untuk mengamankan 'ikan' di masing-masing wilayah. Beijing menegaskan kedaulatannya atas hampir semua Laut Tiongkok Selatan yang kaya sumber daya, meskipun ada klaim saingan dari tetangga-tetangganya di Asia Tenggara - terutama Filipina, yang membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Permanen yang berpusat di Den Haag. Pengadilan memutuskan pada bulan Juli bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim China - vonis yang Beijing tolak dengan keras. Australia, yang merupakan sekutu Amerika Serikat, tidak memiliki klaim sendiri di wilayah tersebut, namun tetap bersikeras bahwa semua pengiriman yang melewati Laut Tiongkok Selatan memiliki hak untuk melewati laut yang dianggap sebagai perairan internasional.⁹⁷ Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan bahwa sebelumnya, angkatan laut Australia telah melakukan latihan bersama di Laut Tiongkok Selatan dengan India dan AS sebagai "bagian rutin dari apa yang dilakukan angkatan laut kita dan juga bagian dari keterlibatan kita di kawasan tersebut".

Joint patrol juga dilakukan Indonesia dengan Vietnam untuk menantang doktrin Duterte di Laut Tiongkok Selatan. Doktrin Duterte merupakan gagasan bahwa negara Asia-Pasifik yang berani menjinakkan ambisi Beijing untuk mengendalikan seluruh Laut Tiongkok Selatan akan menghadapi perang dengan Tiongkok. Pada awal tahun ini, Indonesia menarik "garis merah" di Laut Tiongkok Selatan untuk menetapkan hak menangkap ikan di daerah-daerah di mana Tiongkok mengklaim hak "tumpang tindih". Langkah Indonesia dilakukan adalah dengan menamai wilayah maritimnya yang berada di bagian barat daya

⁹⁷ Agence France-Presse, "South China Morning Post, Australia, Indonesia consider joint 'peace patrols' in the disputes South China Sea", (2016), <https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/2041964/australia-indonesia-consider-joint-peace-patrols-disputed>, diakses tanggal 23 Agustus 2019.

Laut Tiongkok Selatan sebagai “Laut Natuna Utara,” untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Sementara itu, Vietnam telah mengambil langkah sendiri untuk menjinakkan ambisi Beijing untuk mengendalikan Laut Tiongkok Selatan. Bulan lalu, Hanoi mendorong perjanjian untuk melarang banyak kegiatan Tiongkok yang sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan.⁹⁸ Seperti pembangunan pulau buatan, blokade dan persenjataan ofensif seperti penyebaran rudal; dan Zona Identifikasi Pertahanan Udara kode perilaku yang diinisiasi Tiongkok pada tahun 2013.

Terkait masalah teroris yang sempat menyerang daerah Filipina, atau kawasan Laut Tiongkok Selatan bagian Timur, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Filipina juga melakukan *joint navy patrol* atau singkatnya melakukan *joint patrol* bersama dalam rangka menutup akses militant di kawasan Laut Sulu. *Joint patrol* ini tidak dilakukan dibawah naungan ke-10 anggota ASEAN, dimana Indonesia-Malaysia-dan-Filipina juga tergabung di dalamnya. Dengan kata lain, joint patrol ini dilakukan dalam rangka menanggapi dan menindak lanjuti kasus ataupun isu terorisme yang terjadi di kawasan Laut Sulu. Oleh karena itu, Singapura merespon baik joint patrol ini dan menawarkan bantuan berupa pusat *sharing* informasi yang berada di Changi Naval Base.

Dalam hal ini, Tiongkok juga memberikan dukungannya, yaitu dengan mengikutsertakan kapal-kapalnya dalam joint patrol tersebut meski memang sebelumnya hubungan Tiongkok dengan negara-negara tetangga yang berada di

⁹⁸ Panos Mourdoukoutas, Forbes, “South China Sea: Indonesia and Vietnam Prove Duterte Wrong”, 28 Februari 2019 tersedia di <https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2019/02/28/south-china-sea-indonesia-and-vietnam-prove-duterte-wrong/#40def551e85>

kawasan Laut Tiongkok Selatan kurang baik.⁹⁹ Keikutsertaan Tiongkok dalam mengulurkan tangannya untuk menekan kasus terorisme di area Laut Sulu yang kemungkinan dapat merambah ke Laut Celebes ini merupakan bentuk bahwa pihak Tiongkok mau melakukan *joint peace patrols* untuk menjada perdamaian antar negara di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Selanjutnya *joint mission* atau misi bersama yang sebenarnya masih memiliki konsep yang sama dengan latihan gabungan telah dilakukan oleh Indonesia. *Joint mission* dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan ini, hanya dilakukan satu kali pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan kata lain, Indonesia telah berhasil melakukan *joint mission* dengan Tiongkok pada tahun 2016 dimana Indonesia mengirimkan pasukannya dengan kode nama Comodo-2016 untuk melakukan latihan tempur.

Ketegangan meningkat di Laut Tiongkok Selatan ketika Tiongkok terus mengklaim kembali tanah dan klaim kepemilikan atas sebagian besar koridor pelayaran penting. Beberapa negara Asia Tenggara memiliki klaim yang tumpang tindih di wilayah tersebut, termasuk Vietnam. Indonesia berusaha menahan kapal pukat Tiongkok yang dituduhnya menangkap ikan di zona ekonomi eksklusifnya di Laut Tiongkok Selatan, mendorong penjaga pantai Tiongkok untuk campur tangan. Kementerian mengatakan dalam pemberitahuan terpisah bahwa Menteri Pertahanan Chang Wanquan akan mengunjungi Vietnam pada hari Sabtu untuk berpartisipasi dalam perundingan tingkat tinggi. Armada Angkatan Laut oleh kapal fregat armada Laut Utara dan sekoci lepas pantai Pulau Weifang Changxing

⁹⁹ Associated Press, "South China Morning Post, Joint navy patrols between Indonesia, Philippines and Malaysia to cut off Sulu Sea corridor to militants", 4 Juni 2017, <https://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/2096834/joint-navy-patrols-between-indonesia-philippines-and-malaysia>

Island dari pelabuhan militer di pelabuhan dermaga Qingdao,¹⁰⁰ dibawa jauh dari laut dan pelatihan tempur ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam kode nama "Comodo-2016" dalam latihan bersama atau *joint mission*.

Kemudian *joint exercise* atau latihan bersama juga telah dilakukan Indonesia dengan 1) *joint exercise* antara ASEAN dan Tiongkok, hanya 6 negara ASEAN yang tergabung dalam latihan tersebut diantaranya Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam dan Laos, yang dilakukan di Qingdao untuk membangun komunitas maritime di kawasan Asia Tenggara; 2) *Joint Exercise* antara Indonesia dan Amerika Serikat sejak tahun 1995 dengan misi untuk mengamankan maritime diseluruh kawasan perairan Indo-Pasifik yang disebut dengan latihan Kesiapan dan Kerja Sama (*The Cooperation Afloat Readiness and Training/CARAT*).

Joint exercises yang baru saja dilakukan oleh Tiongkok bersama dengan enam negara ASEAN menunjukkan bahwa Tiongkok telah memulai babak baru dalam melakukan latihan bersama angkatan laut dengan mitra militernya dari enam negara yang tergabung dalam ASEAN di perairan lepas pantai timurnya.

Wakil Laksamana Shen Jinlong, komandan Angkatan Laut PLA, mengatakan 13 kapal perang dan empat helikopter akan ambil bagian dalam latihan di Qingdao, provinsi Shandong. Negara-negara yang ikut serta termasuk Thailand, Filipina,

Singapura dan Vietnam, serta Indonesia dan Laos yang kemudian bertindak sebagai pengamat berlangsungnya kegiatan tersebut. Latihan ini akan fokus pada formasi dan pergerakan kapal, pencarian dan penyelamatan, inspeksi dan penangkapan, dan prosedur medis di antara keterampilan lainnya. Selain itu,

¹⁰⁰ The Maritime Executive, "China to Join Naval Exercise off Indonesia", 2016, <https://www.maritime-executive.com/article/china-to-join-naval-exercises-off-indonesia>, diakses tanggal 5 September 2019

latihan ini juga diharapkan mampu untuk membangun komunitas maritim yaitu dengan meningkatkan kerja sama keamanan dan saling percaya dengan semua rekannya di Asia Tenggara.¹⁰¹ Latihan bersama terjadi ketika Beijing ‘dikunci’ dalam sejumlah sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan dengan beberapa negara tetangganya di Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam. Latihan bersama ini berlangsung selama enam hari dengan rekan-rekan Rusia di lepas pantai Qingdao.

Kegiatan-kegiatan ini adalah bagian dari upaya Beijing untuk menegaskan dominasi penuh di Laut Tiongkok Selatan dan mendorong AS keluar. Itu sebabnya Amerika meningkatkan patroli di perairan Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan, menegaskan kesediaannya untuk menjaga jalur air itu menjadi laut terbuka bagi semua kapal komersial dan militer. Dan itu telah memberikan semacam jaminan ketenangan untuk Indonesia dan Vietnam terhadap respons yang tidak terukur dari Tiongkok. Sementara itu, langkah Indonesia dan Vietnam telah membuktikan Duterte salah: melawan Tiongkok tidak mengarah pada perang.

Angkatan Laut AS, Korps Marinir dan Penjaga Pantai, dan korps angkatan laut dan laut Indonesia, mengadakan latihan tahunan yang disebut dengan Latihan Kesiapan dan Kerja Sama (*The Cooperation Afloat Readiness and Training/CARAT*), yang pertama kali diadakan pada tahun 1995, dimulai pada hari Kamis di pelabuhan Indonesia di Surabaya dan akan menampilkan ratusan personil dari kedua negara. Mereka akan melakukan pelatihan di darat dan di laut,

¹⁰¹ Minnie Chan, “South China Morning Post, China begins joint naval drills with six Southeast Asian nations”, 26 April 2019, tersedia di <https://www.scmp.com/news/china/military/article/3007804/china-begins-joint-naval-drills-six-southeast-asian-nations>, diakses tanggal 5 Agustus 2019

seperti latihan pencarian dan penyitaan, penyelaman dan penyelamatan, latihan meriam, latihan pembuangan senjata peledak dan pelatihan peperangan hutan. Komponen lainnya akan mencakup pertukaran pengetahuan dalam kesadaran domain maritim, obat-obatan, penerbangan, hukum dan pembuangan persenjataan peledak. CARAT merupakan latihan paling lama oleh Angkatan Laut AS di Asia Selatan dan Tenggara memiliki tujuan untuk memperkuat kemitraan antara angkatan laut regional dan meningkatkan kerja sama keamanan maritim di seluruh Indo-Pasifik.¹⁰² Meskipun Indonesia tidak memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan, tetapi telah tumbuh semakin waspada tentang kegiatan asing, terutama yang oleh Tiongkok, di zona ekonomi eksklusifnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Naval Military Joint Exercise* yang telah dilakukan Indonesia dalam menanggapi permasalahan yang muncul di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan Laut Natuna Utara Indonesia adalah Indonesia telah melaksanakan *joint mission* yang berupa latihan angkatan laut bersama. Indonesia berpartisipasi dalam latihan angkatan laut dengan mengirimkan armada lautnya dengan kode nama “Comodo-2016”.

Selain itu, Indonesia juga melakukan *joint patrol* dengan tujuan untuk menjaga keamanan kawasan Laut Tiongkok Selatan serta meredam ketegangan dan mengelola potensi konflik sehingga permasalahan yang ada di Laut Tiongkok Selatan tidak perlu melibatkan pihak lain dalam penyelesaiannya. Dalam *joint patrol* tersebut, angkatan militer baik Indonesia dan 9 negara ASEAN lain maupun angkatan militer dari Tiongkok bersama-sama melakukan patrol damai dan melakukan latihan maritime ASEAN-Tiongkok pada tahun 2018 sehingga

¹⁰² Christopher Bodeen, “Navy Times, CARAT and the stick: Latest South China Sea development”, 2019, <https://www.navytimes.com/news/your-navy/2019/08/06/carat-and-the-stick-latest-south-china-sea-developments/>, diakses tanggal 23 Agustus 2019

kemaman maritim di kawasan ASEAN dan Tiongkok dapat tercapai. Indonesia juga melakukan *joint patrol* dengan Australia dengan alasan untuk memastikan perairan yang lebih aman. *Joint patrol* ini dilaksanakan di Laut Tiongkok Selatan bagian Timur.

Selanjutnya, *Joint patrol* juga dilakukan Indonesia dengan Vietnam untuk menantang doktrin Duterte di Laut Tiongkok Selatan. Doktrin Duterte merupakan gagasan bahwa negara Asia-Pasifik yang berani menjinakkan ambisi Beijing untuk mengendalikan seluruh Laut Tiongkok Selatan akan menghadapi perang dengan Tiongkok. Dalam kegiatan tersebut, Indonesia dan Vietnam membuktikan bahwa doktrin Duterte tidak benar. Indonesia, Malaysia dan Filipina juga melakukan *joint patrol* untuk menjaga keamanan serta menutup jalur teroris di kawasan Laut Sulu. *Joint patrol* yang dilakukan oleh ketiga negara yang berada paling dekat dengan Laut Sulu tersebut mendapat dukungan dari Singapura dan Tiongkok.

Joint exercises yang dilakukan oleh Tiongkok bersama dengan enam negara ASEAN menunjukkan bahwa Tiongkok juga melakukan upayanya dalam menciptakan kedamaian di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Angkatan Laut AS, Korps Marinir dan Penjaga Pantai, dan korps angkatan laut dan laut Indonesia, mengadakan latihan tahunan atau *joint exercise* yang disebut dengan CARAT untuk meningkatkan strategi ketahanan maritim.

5.1.1.3 External Threats in SLOC

External Threat dapat diartikan sesuai arti literalnya atau ancaman yang muncul dari pihak lain. Dalam hal ini, *external threat* di Indonesia merupakan ancaman yang datang dari negara di sekitar Indonesia. Sedangkan SLOC atau *sea*

lanes of communication merupakan kawasan maritim suatu negara. dengan demikian, *external threat in SLOC* adalah ancaman-ancaman yang terjadi daerah maritim suatu negara karena pengaruh dari negara lain.

Ancaman pun terbagi menjadi dua yaitu ancaman dari negara (*regular threats*) dan ancaman dari non negara (*irregular threats*). Terdapat 3 ancaman yang berasal dari negara yang terjadi di Kawasan Laut Tiongkok Selatan diantaranya adalah: 1) pengklaiman Tiongkok akan kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan menerbitkan peta wilayah teritorial yang menunjukkan adanya 9 Garis Putus-Putus atau 9 *Dash Lines* (9 DL) di kawasan Laut Tiongkok Selatan, dimana 9 DL tersebut menindih ZEE Indonesia, kemudian Indonesia menyatakan penolakannya akan 9DL dengan melaporkannya ke PBB karena Tiongkok telah melanggar UNCLOS, dan Indonesia kembali menolaknya di Workshop kemaritiman yang dilaksanakan di Surabaya; 2) adanya *illegal fishing* yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan, disini Indonesia melakukan kerjasama trilateral INDOMALPHIN; 3) ancaman kedaulatan maritim dimana negara di sekitar Indonesia karena merasa kawasan Indonesia menindih ZEE dari masing-masing negara tetangga misalnya Singapura, Malaysia dan Filipina.

Sedangkan ancaman yang berasal dari aktor non negara (*irregular threats*) adalah adanya penyerangan perompak di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang dipicu dengan adanya kelompok pemberontak khususnya di Filipina sehingga Indonesia bersama negara tetangga yang memiliki kepentingan di kawasan Laut Tiongkok Selatan sepakat untuk melakukan kerjasama trilateral INDOMALPHIN.

Menindaklanjuti hal tersebut, Indonesia berusaha melindungi wilayah maritimnya, khususnya yang berada di kawasan pulau Natuna dengan ngusahakan

transmigrasi ke pulau Natuna, mengusahakan perusahaan energi untuk berinvestasi di kawasan gas alam Natuna, dan mendirikan pangkalan militer Angkatan Udara didekat pulau Natuna.¹⁰³ Kemudian, Tiongkok merespon dengan meminta Indonesia untuk bernegosiasi mengenai batas wilayah maritim yang saling tumpang tindih (*overlapping*) saat didakannya *workshop* di Surabaya.

Permasalahan yang serius tersebut berakar dari simpang-siurnya pembagian wilayah atau penentuan batas territorial terluar negara yang bersangkutan. Aturan UNCLOS sudah jelas disebutkan bahwa pengukuran wilayah ZEE diukur sepanjang tidak lebih dari 200 mil dari garis pangkal negara pantai, sedangkan kenyataannya terdapat beberapa negara yang saat menentukan garis batas ZEE-nya menindih ZEE milik negara lain karena memang jika diambil persis 200 mil, akan terjadi tumpang tindih garis terluar ZEE. Konflik tersebut pernah terjadi antara Singapura, Malaysia, Indonesia dan Filipina karena masing-masing negara berbatasan langsung. Sehingga diantara keempat negara tersebut diadakan kesepakatan mengenai batas territorial masing-masing ZEE sesuai dengan hukum laut yang berlaku.

Tidak hanya menindih batas ZEE Indonesia, *the U-shaped nine-dash-line* (9 DL – 9 Garis Putus) yang diklaim Tiongkok sebagai wilayah ZEE-nya juga menindih kawasan perairan Vietnam dan Filipina. Sebagai respon, pada tahun 2009 Vietnam melaporkan klaim sepihak Tiongkok ke CLTS dan menyatakan bahwa “klaim Tiongkok akan *the U-shaped nine-dash-line* (9 DL – 9 Garis Putus) pada peta terbarunya tidak memiliki izin secara legal, tanpa sisi sejarah dan wilayah *factual*.” Sedangkan Filipina menanggapi klaim Tiongkok tersebut

¹⁰³ Ian Storey, *Southeast Asia and the rise of China: The search for security*, Abingdon, Oxon and New York: Routledge, 2011. Hal-199

dengan melaporkan Tiongkok ke CLTS pada tahun 2011 dengan menyatakan penolakannya atas keberadaan *the U-shaped nine-dash-line* (9 DL – 9 Garis Putus) di eta Tiongkok dan menolak alasan dasar historis yang selalu diklaim Tiongkok pada saat mengenalkan serta mempertahankan *the U-shaped nine-dash-line* (9 DL – 9 Garis Putus) di petanya. Pemerintah Filipina juga menyatakan bahwa “klaim Tiongkok akan perairan di LTS, terutama pada kepulauan Kalayan serta perairan disekitarnya tidak memiliki dasar hukum terutama UNCLOS sehingga Filipina menyatakan haknya untuk mengklaim Kalayan sebagai wilayahnya sesuai dengan peraturan hukum UNCLOS” dimana wilayah perairan dapat menjadi klaim bagi negara kepulauan terdekatnya dan disini, berdasarkan letak dan garis pangkal pantainya, Filipina berada di posisi lebih dekat ke Kalayan daripada daratan Tiongkok.

Selain ancaman dari Tiongkok, Indonesia sebelumnya juga mendapat ancaman kedaulatan akan wilayah maritimnya dari negara-negara tersekatnya seperti Singapura, Malaysia dan Filipina. Setelah berlakunya UNCLOS 1982, Indonesia telah memiliki beberapa kesepakatan batas maritim dengan negara tetangga antara lain pada tahun 2003, Indonesia dengan Vietnam menyepakati batas LK dan telah meratifikasi kesepakatan tersebut dengan UU No. 18 tahun 2007. Dalam kurun waktu 2009 – 2014 terdapat 3 (tiga) kesepakatan batas maritim yaitu pada tahun 2009, Indonesia dan Singapura menandatangani Perjanjian Batas Laut Teritorial antara Indonesia dan Singapura di Segmen Barat Selat Singapura dan telah meratifikasi perjanjian tersebut dengan UU No. 4 tahun 2010. Pada tahun 2014 Indonesia dan Singapura kembali menyepakati batas laut wilayah di segmen timur Selat Singapura pada tanggal 3 September 2014,

perjanjian ini sedang dalam proses ratifikasi. Selain dengan Singapura pada tahun 2014, Indonesia menandatangani batas ZEE dengan Filipina pada tanggal 23 Mei 2014 dan sedang dalam proses ratifikasi.

Ancaman *irregular threat* muncul dari aktor non-negara, sehingga dapat diartikan sebagai ancaman tidak tetap. Ancaman tersebut dapat berbentuk seperti aktifitas-aktifitas seperti kasus pembajakan laut, terror akan perompak di wilayah perairan, maupun serangan-serangan yang sering terjadi terhadap kapal-kapal perdagangan. Sebagian dari kita pasti berpendapat bahwa perompakan atau *piracy* kemungkinan tersesar hanya terjadi di Negara Barat seperti Somalia. Namun kenyataannya, berdasarkan deklarasi PBB pada tahun 2014, kawasan perairan yang paling berbahaya terletak di kawasan Asia Tenggara. Setiap tahunnya, terdapat 120.000 kapal yang melakukan transit di Selat Malaka, yaitu selat yang terletak diantara Malaysia, Singapura dan Indonesia dan sekitar 70-80% seluruh minyak yang diimpor oleh Tiongkok dan Jepang juga harus melalui jalur Selat Malaka tersebut. Dengan kata lain, dengan sibuknya lalu lintas perairan di kawasan Asia Tenggara, memungkinkan untuk terjadinya aksi terror dan perompakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁰⁴

Berdasarkan data dari *International Maritime Bureau (IMB)*, terdapat aktifitas-aktifitas penyerangan terhadap kapal, baik yang bermuatan komoditas barang dagang dan minyak maupun kapal militer di kawasan Selat Malaka, yang mana melibatkan tiga negara di kawasan tersebut misalnya Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sedangkan negara yang paling sering mendapatkan penyerangan adalah Indonesia. Negara lain seperti Filipina dan Thailand sebenarnya juga

¹⁰⁴ Ibid.

mendapatkan penyerangan namun dalam skala yang lebih kecil tentunya. Wilayah perairan Asia Tenggara dengan intensitas aktifitas bajak laut yang tinggi. Sedangkan di Indonesia sejak tahun 2008 mengalami peningkatan hingga mencapai 106 aktifitas penyerangan dan mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 100 penyerangan, namun kembali meningkat menjadi 108 serangan di tahun berikutnya. Di wilayah Laut Tiongkok Selatan sendiri memuncak pada tahun 2010 dengan jumlah 31 serangan. Aktifitas penyerangan tersebut mulai menurun di tahun berikutnya.¹⁰⁵

Aktifitas penyerangan di wilayah Laut Tiongkok Selatan ini juga dipicu dengan hadirnya kelompok pemberontak khususnya di Filipina. Kelompok pemberontak tersebut misalnya adalah MNLF (*Moro National Liberation Front*), MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), dan *Abu Sayyaf Group* (ASG). Permasalahan ini meluas menjadi kasus pembajakan yang disertai penyanderaan di perairan Sulu. Akhirnya, hubungan yang telah dijalin oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina selama ini (INDOMALPHIN), menghasilkan sebuah kerjasama trilateral untuk menjaga keamanan maritim di perairan Sulu dari tindakan pembajakan. Kerjasama yang dilakukan ketiga negara bisa dikatakan sudah sangat baik dari segi gagasan ataupun konsep, akan tetapi belum bisa dikatakan cukup berhasil dikarenakan dalam kesepakatan yang dilakukan ketiga negara tersebut masih terus berlanjut permasalahan pembajakan yang berujung pada kasus penyanderaan.

Selain adanya aktifitas penyerangan bajak laut, di kawasan Laut Tiongkok Selatan juga sering terjadi *illegal fishing*. Untuk menanggulangi adanya *illegal*

¹⁰⁵ Ibid.

fishing tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertindak sebagai *front guard*.¹⁰⁶ Beberapa strategi yang telah diformulasikan oleh Menteri KKP Susi Pujiastuti untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berdasarkan tiga pilar, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. KKP menerapkan reformasi moratorium dan perikanan untuk mengembalikan eksploitasi ikan ke tingkat yang wajar karena berlangsung lama dan terbukti bahwa dampak kebijakan moratorium KKP telah berhasil mengurangi eksploitasi ikan sebesar 35%. Upaya untuk menegakkan pemberantasan IUU berada di bawah koordinasi “Satuan Tugas 155”.¹⁰⁷ Sepanjang 2016 Satuan Tugas 115 telah melakukan penangkapan terhadap 781 kapal penangkap ikan ilegal yang sebagian besar dari Vietnam. Karena Susi menjabat sebagai menteri, KKP telah menenggelamkan 236 kapal penangkap ikan.¹⁰⁸

5.1.2 *Non Combatan Evacuation Operation*

Non-Combatan Evacuation Operations merupakan identifikasi yang sangat berbeda dengan identifikasi *sea line of communication*. Menurut penjelasan Ladwig, “*Non-Combatan Evacuation Operations is the evacuation of Indian or friendly third country civilians from a foreign country when they are endangered by war civil unrest.*” Salah satu contoh kasusnya adalah ketika India melakukan evakuasi sekitar 2.280 penduduk India, Srilanka, dan Nepal di Lebanon pada tahun 2006. Dengan kata lain, identifikasi *Non-Combatan Evacuation Operations* merupakan strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk memproyeksikan

¹⁰⁶ Mohd. Agoes Afiya, Indonesia’s Global Maritime Fulcrum: Contribution in the Indo-Pacific Region, *Andalas Journal of International Studies*, 6, No 2 (2017): 143-159.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

kekuatannya terhadap suatu wilayah atau negara lainnya, dengan cara menggunakan alat militernya sengan tujuan pengevakuasan.¹⁰⁹

Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa dari *Non-Combatan Evacuation Operations* ini tidak menggunakan alat militer untuk mengancam maupun menyerang negara lain atau lawan secara langsung. Akan tetapi, identifikasi ini memiliki tujuan khusus yaitu pertama, untuk menunjukkan kepada lawan akan kekuatan militer sebuah negara yang melalukan *power projection*, karena dengan melakukan *Non-Combatan Evacuation Operations*, negara tersebut menggunakan asset militernya di luar kawasannya. Kedua adalah, untuk memperoleh akses masuk ke wilayah atau negara lain yang menjadi objek dari *power projection* negara yang bersangkutan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dapat menjalankan kekuatan militernya di wilayah lawan atau wilayah persengketaan. Ketiga adalah, untuk meningkatkan hubungan diplomasi jika *evacuation operation* ini dilakukan untuk membantu penduduk dari negara lain.

Konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan selama ini adalah konflik seputar *illegal fishing*, dan pembajakan serta terror yang dilakukan oleh nelayan asing, perompak dan teroris di kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan. Buktinya dari sepanjang 2016 Satuan Tugas 115 telah melakukan penangkapan terhadap 781 kapal penangkap ikan ilegal yang sebagian besar dari Vietnam. Karena Susi menjabat sebagai menteri, KKP telah menenggelamkan 236 kapal penangkap ikan.¹¹⁰ Untuk konflik *illegal fishing*, Indonesia menggunakan kekuatan militernya hanya untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang memancing di

¹⁰⁹. C. Ladwig, Walter. "India and Military Power Projection".

¹¹⁰ Ibid.

kawasan LTS, tidak menggunakan kekuatan militernya untuk menyerang, bahkan mengevakuasi korban-korban misalnya perompakan atau peneroran, karena selama ini belum pernah terjadi penyanderaan korban di kawasan LTS. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa strategi *Non-Combatan Evacuation Operations* tidak dapat dibuktikan dengan nyata implementasinya di kawasan LTS. Hal tersebut tidak dapat terjadi dengan beberapa alasan misalnya tidak semua konflik menimbulkan korban jiwa yang harus dan dapat dievakuasi oleh Indonesia.

Alasan berikutnya adalah tidak adanya kebijakan ataupun aktifitas Indonesia untuk selalu ikut campur dalam konflik-konflik tersebut dengan menjadi pihak ketiga yang melakukan evakuasi terhadap para korban. Sehingga kedua alasan tersebut dapat memberikan justifikasi bahwa Indonesia tidak menjalankan *Non-Combatan Evacuation Operations* di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

5.1.3 *Humanitarian Relief*

Ladwig menerangkan bahwa dalam strategi *humanitarian relief* lebih menekankan pada fungsi kekuatan militer suatu negara dalam memberikan bantuan pada suatu kawasan atau negara paska terjadinya bencana alam.

Humanitarian relief sekilas mirip dengan *non-combatan evacuation operations*, namun keduanya memiliki fungsi dan implementasi yang berbeda. Walaupun kedua strategi tersebut sama-sama menekankan pada bantuan melalui operasionalisasi militer, namun perbedaan dari keduanya terlihat pada jenis bantuan dan objeknya.

Jika *non-combatant evacuation operations* berfokus pada proses evakuasi terhadap penduduk yang berada pada kondisi yang berbahaya ditengah peperangan atau konflik, maka *humanitarian relief* lebih condong pada bentuk bantuan berupa bantuan kepada korban bencana alam. Sehingga, dengan memberikan bantuan paska bencana alam, juga dapat menjadi kesempatan bagi negara tersebut untuk memperluas *powers projection*-nya. Hal tersebut dapat terjadi dengan alasan karena dengan memberikan bantuan, negara tersebut menggunakan aset militernya dalam menyalurkan bantuan tersebut. Seperti halnya identifikasi sebelumnya, *Humanitarian relief* juga dapat meningkatkan hubungan diplomasi antar negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat aktif dalam memberikan bantuan terhadap negara yang menjadi korban bencana alam. Namun karena penelitian ini hanya berfokus pada kawasan konflik di Laut Tiongkok Selatan, selama ini karena bencana alam yang paling dahsyat adalah terjadinya gempa di Palu dan Dongala, Sulawesi. Sehingga, Indonesia sebagai negara korban bencana alam, lebih mendapatkan bantuan daripada memberikan bantuan ke negara lainnya. Namun pada bencana alam yang terjadi di negara lain, Indonesia selalu siap siaga untuk selalu memberikannya baik secara medis, kemanusiaan dan militer. Dengan demikian, klasifikasi *Humanitarian relief* yang dilakukan Indonesia dalam pengimplementasian strategi *Power Projection* *Indoensia* disini gagal untuk dijustifikasi keberadaannya karena tidak terdapat isu bencana alam yang terjadi di kawasan LTS khususnya pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo selain di Indonesia.

5.1.4 *Peacekeeping*

Peacekeeping atau penjaga kedamaian merupakan sebuah operasi militer yang didesain khusus untuk membentuk proses diplomasi dengan tujuan untuk mencapai kestabilan politik yang berjangka panjang. Dalam sebuah konflik atau perselisihan antar negara yang sedang terjadi, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam misi-misi *peacekeeping* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kontribusi Indonesia pada misi-misi *peacekeeping* PBB dimulai sejak tahun 1957, ketika Indonesia mengirimkan 559 personel infantry sebagai bagian dari *United Nations Emergency Force* (UNEF) di Sinai, Pengiriman tersebut diikuti dengan kontribusi 1.074 personel infantry (1960) dan 3.457 personel infantry (1962) sebagai bagian dari *United Nations Operation in the Congo* (ONUC) di Republik Kongo.¹¹¹

Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai misi-misi *peacekeeping* PBB (sesuai dengan data gabungan per 30 November 2018) adalah sejumlah 3.544 personel (termasuk 94 personel perempuan), dan menempatkan Indonesia di urutan ke-7 dari 124 Troop/Police Contributing Countries (T/PCC). Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 8 (delapan) misi-misi *peacekeeping* PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSMA (Republik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), UNMISS (Sudan Selatan) dan UNISFA (Abyei, Sudan).

Dengan potensi militer yang dimiliki Indonesia, sejauh ini di kawasan ASEAN sendiri belum terbentuk *regional force* dibawah ASEAN. Sebenarnya,

¹¹¹ Kemlu.go.id Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

isu pembentukan ASEAN *Regional Peacekeeping Operations* telah muncul sejak tahun 1994, namun sayangnya tidak dilanjutkan. Kemudian isu ini kembali muncul ketika Indonesia mengajukan kembali akan pembentukan *peacekeeping operation* di ASEAN sebagai bentuk pertahanan dan pencegahan terhadap konflik internal maupun *spillover* antar negara bertetangga. Akan tetapi, beberapa negara kembali menolak usulan Indonesia ini, misalnya Vietnam yang menolak dengan alasan akan merusak kedaulatan sebuah negara jika *peacekeeping operation* ini dibentuk.

Penolakan lain muncul dari Malaysia yang menganggap bahwa ASEAN bukanlah blok militer, sehingga *regional force* tidak akan berguna dalam meningkatkan perekonomian kawasan maupun mengatasi permasalahan bencana alam yang sering terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya Laut Tiongkok Selatan. Sedangkan Perdana Menteri Thailand berpendapat bahwa tidak ada konflik serius yang terjadi di kawasan ASEAN sehingga berpotensi memerlukan peran *regional force* untuk mengatasinya.

Pada akhirnya, setelah beberapa tahun berlalu, masing-masing negara yang berada di daerah sekitar Laut Tiongkok Selatan merubah sistem kebijakan di dalam negeri mereka dan kemudian mulai menerapkan *peacekeeping operation* di internal negara mereka maupun di luar kawasan. Perubahan keputusan ini terjadi dengan alasan bahwa beberapa negara di kawasan Laut Tiongkok Selatan telah bergabung dalam *peacekeeping operation* di luar kawasan. Hal tersebut berdampak positif dan memberikan keuntungan sendiri bagi negara terkait. Selain itu, dengan semakin banyaknya konflik internal maupun antar negara yang terjadi, baik bencana alam, teroris, maupun konflik perbatasan yang sangat memerlukan

peran dari *regional force* juga menjadi alasan berubahnya kebijakan negara-negara kawasan ASEAN yang berada di kawasan Laut Tiongkok Selatan untuk menerapkan *peacekeeping operation* di negaranya masing-masing.

Berdasarkan kondisi keamanan yang masih dibawah kendali, *Power Projection Indoensia* pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2016-2018) tidak menggunakan strategi *peacekeeping operation* di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Alasan yang medasarinya adalah, pertama tidak adanya *regional force* di ASEAN, kedua kondisi kawasan pada saat itu relative aman dan masih belum membutuhkan *peacekeeping operation* berdasarkan intensitas dan jenis konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, juga tidak ditemukan hubungan antara pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dengan sengketa atau keadaan di wilayah LTS.

5.2 Hard Military Power Projection

Klasifikasi *hard military power projection* ini akan menjelaskan strategi Indonesia dalam menggunakan persenjataan dan militernya untuk menanamkan pengaruh politik dan menjalankan kepentingannya di Kawasan Laut Tiongkok Selatan. Penggunaan persenjataan militer dalam strategi *power projection* ini tidak selalu berkaitan dengan perang terbuka (*coercive*) pertempuran antar pasukan dengan persenjataan militer antar negara. Hal ini disebabkan karena tujuan utama dari *Hard Military Power Projection* ini adalah bagaimana Indonesia memberikan pengaruhnya di negara-negara Kawasan Laut Tiongkok Selatan, dan persenjataan atau militer yang digunakan dapat juga untuk meredam konflik yang terjadi di kawasan.

Terdapat lima jenis aksi militer dari *hard military power projection*, yaitu *showing the flag, compellence and deterence, pinishment, armed intervention*, dan *conquest*. Kelima jenis aksi militer ini akan dijelaskan serta dibahas implementasinya dalam sub-bab ini, sehingga dapat diketahui pola strategi Indonesia dalam menggunakan *hard military power projection*.¹¹²

5.2.1 *Showing The Flag*

Showing The Flag, berdasarkan pengertian dari Ladwig, merupakan penyebaran kekuatan militer secara simbolis pada sebuah kawasan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kepentingan politik di kawasan tersebut atau memiliki keinginan untuk melibatkan aksi militernya.

Tujuan lain dari *Showing The flag* adalah sebagai sinyal bahwa wilayah yang dimasuki militernya merupakan wilayah strategis bagi negara tersebut atau merupakan wilayah yang diinginkan sehingga perlu dipertahankan atau diambil dengan peletakan militernya di kawasan tersebut. Secara tidak langsung, *Showing The Flag* adalah perlawanan yang bersifat defensif.¹¹³

Wilayah laut yang ada di dunia ini tidak hanya diartikan sebagai kesatuan perairan bebas yang tidak memiliki zana-zona tertentu, namun sebagai wilayah yang diatur oleh zonasinya sesuai dengan rezim hukum masing-masing agar

terciptanya peradaban dunia, oleh karena itu, dibuatlah peraturan atau kaidah

Hukum Laut Internasional untuk mengatur pembagian zonasi laut tersebut.

Aturan-aturan hukum tersebut terdapat di *United Nations Conventions on the Law of the Sea* yang selanjutnya disebut dengan UNCLOS 1982. Pembagian zonasi

¹¹² Walter C Ladwig

¹¹³Ibid. Hal-1167

yang telah disepakati secara internasional tersebut ditujukan agar semua kegiatan yang dilakukan di wilayah laut dapat diatur dengan semestinya dan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar sumber daya alam yang berada di wilayah laut dapat digunakan dan tetap terjaga untuk keberlangsungan hidup manusia. Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut dibagi menjadi beberapa zonasi sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Perdamaian Pedalaman
- b. Laut Teritorial
- c. Perairan Kepulauan
- d. Zona Tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif
- e. Laut Bebas
- f. Serta mengatur mengenai Landas Kontinen sebagai satu kesatuan dalam ruang wilayah laut. Zona-zona lau tersebut diukur dari garis pangkal yang ditetapkan oleh negara pantai

Wilayah perairan laut merupakan wilayah terpenting bagi negara yang memiliki akses terhadap lautnya baik wilayah territorial maupun zona ekonomi eksklusif. Dilain sisi, laut juga memiliki problematika bagi beberapa negara dikarenakan tidak jelasnya batas-batas antar negara maupun batas dengan wilayah laut bebas. Selain itu untuk bisa memudahkan dalam pengawasan dan hal-hal yang terkait, tidak sedikit negara-negara yang menamai laut di sekitar wilayahnya dengan interpretasi menurut negara tersebut. Hal ini berlaku pula pada pulau-pulau yang dimiliki oleh beberapa negara sekaligus, seperti halnya pulau Kalimantan. Penyebutan nama pulau Kalimantan berbeda-beda antara negara Indonesia dan Malaysia serta Brunei Darussalam. Menurut Malaysia, Brunei serta

¹¹⁴ UNCLOS 1982.

masyarakat Internasional, Pulau Kalimantan biasa disebut dengan Pulau Borneo.

Sedangkan pemerintah dan masyarakat Indonesia menyebut pulau tersebut dengan sebutan Kalimantan.

Dalam memperjelas batasan-batasan wilayah laut suatu negara yang bersinggungan dengan wilayah laut negara lain maupun wilayah laut bebas, suatu negara seringkali melakukan interpretasi nama sesuai keinginan pribadi terhadap suatu wilayah yang tunduk pada yuridiksi negaranya maupun terhadap wilayah yang berada di wilayah bebas. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2017, Pemerintahan Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo melakukan pembenahan peta baru wilayah Indonesia serta mempertegas batas wilayah laut Indonesia dengan memberi nama Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Langkah pemerintah Indonesia dibawah arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 untuk memperbaharui peta nasional merupakan hal positif dan berani untuk menjamin hak berdaulat, keamanan, dan kepastian hukum bagi negara Indonesia. Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga membuat wilayah Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat yang diakui di dunia internasional. Perubahan nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan salah satu langkah politik terbaik yang dilakukan Indonesia guna menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara yang melakukan klaim tanpa dasar yang sesuai dengan UNCLOS 1982.¹¹⁵ Peta baru ini juga digunakan sebagai peta nasional resmi yang juga diperuntukan bagi 21 Kementerian. Kebijakan ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keberanian

¹¹⁵ Rupert Wingfield-Hayes, 2015 'Melihat Pulau Buatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan Secara Dekat': http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151215_majalah_Tiongkok_lautselatan, diakses tanggal 20 Agustus 2019

dan kemenangan Filipina dalam menggugat Tiongkok mengenai sengketa LTS di Mahkamah Arbitrase Internasional. Gugatan Filipina merupakan langkah politik yang positif untuk mengingatkan Tiongkok agar tidak semena-mena sebagai negara besar yang berpengaruh di Asia. Keputusan pembaruan peta nasional ini dilaksanakan selepas telah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Singapura, dan Filipina mengenai batas-batas wilayah ZEE ketiga negara.

Kesepakatan inilah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia. Selain telah terjadinya kesepakatan antara ketiga negara tersebut, penggantian nama LTS menjadi Natuna Utara juga dipengaruhi oleh landasan historis, bisnis, dan geologis. Wilayah yang kini telah resmi diberinama sebagai Laut Natuna Utara merupakan wilayah laut yang memiliki potensi SDA energi yang mempunyai nilai ekonomi. Sejak masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, blok migas di wilayah tersebut sudah menggunakan nama Blok Migas Natuna Utara. Dilihat dari sisi historis pun bahwasanya nelayan-nelayan Indonesia yang berdomisili di daerah natuna juga menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara. Pengubahan itu juga mempertegas dan memperjelas wilayah NKRI agar navigasi yang melewati daerah tersebut mengerti bahwa wilayah tersebut merupakan ZEE milik Indonesia. Selain itu, apabila terjadi IUU Fishing di wilayah tersebut maka pemerintah Indonesia berhak melakukan tindakan secara langsung dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Selain itu, pengubahan tersebut juga menegaskan bahwa wilayah tersebut bukan lagi LTS sehingga dikemudian hari tidak ada lagi klaim-klaim sepihak dari pemerintah Tiongkok mengenai wilayah LTS.

Tindakan perubahan nama dan pendaftaran yang dilakukan oleh Indonesia ke IHO (*International Hydrographical Organization*) merupakan salah satu tindakan untuk memperjelas landasan hukum, hak berdaulat, dan keamanan Indonesia bagi wilayah Natuna Utara, sehingga tidak akan terjadi klaim sepihak oleh negara lain atas wilayah tersebut. Namun tindakan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut mendapat respon negatif dari Pemerintah Tiongkok. Melalui juru bicara Kementrerian Luar Negeri Pemerintah Tiongkok, Geng Shuang, mereka menolak dengan tegas tindakan toponimi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai arti dan kekuatan, karena secara Internasional, wilayah tersebut sudah disepakati secara jelas bernama Laut Tiongkok Selatan,¹¹⁶ sehingga nama baru yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia tidak berpengaruh secara Internasional.

Wilayah yang bernama Laut Tiongkok Selatan tidak serta merta bahwa wilayah laut itu merupakan hak milik penuh dari Tiongkok. Maka tindakan yang dilakukan Indonesia pada dasarnya tidak melanggar ketentuan nasional maupun Internasional sehingga tindakan tersebut legal dan sah menurut hukum yang berlaku. Untuk menjamin kepastian hukum dalam Hukum Internasional, maka Indonesia wajib mendaftarkan wilayah baru tersebut kepada IHO dan di depositkan di Markas Besar PBB, sehingga negara-negara lain dapat mengerti bahwasanya wilayah tersebut merupakan ZEE milik pemerintah Indonesia dan telah bernama Laut Natuna Utara.

¹¹⁶ Tom Allard dan Benardette Christina Munthe. 2017. Asserting Sovereignty, Indonesia Renames Part of South China Sea': <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-china-sea-idUSKBN19Z0YQ>, diakses tanggal 6 September 2019

Aksi pemerintah Indonesia dalam mengganti nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara tersebut dapat dianggap sebagai *hard power projection*, khususnya *Showing the Flag*, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat menanggapi konflik yang terjadi di kawasan perairan Natuna. Aksi Indonesia tersebut tidak melanggar hukum, karena dalam UNCLOS 1982 dengan jelas ditetapkan bahwa toponimi atau pemberian nama pada laut bebas adalah tindakan legal dan sah menurut Hukum Internasional. Sehingga, negara-negara lain di dunia wajib mentaati nama baru wilayah tersebut.¹¹⁷ Namun tindakan Indonesia yang berani menamai kawasan perairan disekitar kepulauan Natuna yang membentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga, Provinsi Riau sebagai Laut Natuna Utara ini jelas mendapatkan protes dari Tiongkok karena dengan memberikan nama baru, maka menurut UNCLOS garis ZEE Indonesia semakin jauh dari yang sebelumnya.¹¹⁸ Bahkan sebelumnya, Tiongkok juga telah mendirikan pangkalan militernya untuk lebih dekat dalam menjangkau daerah kaya ikan di kawasan Laut Tiongkok Selatan, khususnya di perairan Natuna yang memiliki sumber laut melimpah. Sehingga, untuk menanggapi protes tersebut, Indonesia juga membangun pangkalan militer di kawasan Laut Natuna Utara.

Pangkalan Militer di Laut Natuna Utara telah mendapat dukungan dari pangkalan udara Supadio di Kalimantan Barat yang lebih dikenal dengan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dan pangkalan AL Pontianak yang juga berfungsi sebagai pangkalan sinergitas dengan pangkalan militer udara di Natuna.

¹¹⁷ Alief Sambogo, Penamaan Laut Natuna Utara oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional, 2018, *Jurist-Diction*, 1(2): 381-196

¹¹⁸ Aisyah, A. W. F, 2017, Laut Natuna, Salah Satu Bukti Kekuatan Militer RI yang Semakin Membara, 2017, tersedia di <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/20/laut-natuna-salah-satu-bukti-kekuatan-militer-ri-yang-semakin-membara>

Pangkalan militer ini difasilitasi dengan alat tempur seperti armada kapal perang permukaan Sukhoi Su-35, Su-30, Su-27, F-16 dan T-50i; serta dilengkapi dengan KRI Kombatan, Ahmad Yani class, Diponegoro class, Bung Tomo class, Martadinata class dan kapal selam.¹¹⁹

Pangkalan militer ini didirikan di tiga pulau terluar Indonesia, yaitu Natuna, Bitung dan Selaru. Masing-masing pangkalan militer bertindak sebagai pengamanan garis terdepan Indonesia dimana Natuna dekat dengan Tiongkok dan Filipina, Bitung untuk menjaga keamanan di wilayah Morotai dan perairan sekitarnya; dan Selaru juga kami dirikan untuk menjaga keamanan dan perbatasan antara Indonesia dan Australia.¹²⁰ Pendirian pangkalan militer ini dengan tujuan selain untuk menjaga keamanan maritim Indonesia baik dari luar, misalnya dari luar maupun dalam negeri; pengembangan kekuatan militer; juga dapat difungsikan untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga mampu *showing the flag* dalam bentuk pembuatan pangkalan militer di dekat wilayah konflik.

Selanjutnya, pada bulan Desember 2018, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi oleh KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, meresmikan Satuan TNI Terintegrasi Natuna di Pelabuhan Faslabuh TNI Al, Selat Lampa, Natuna, dan Provinsi Kepulauan Riau. Peresmian ini merupakan titik awal langkan finalisasi yang diharapkannya, Indonesia harus merencanakan rencana strategis jangka menengah untuk membangun kekuatan TNI yang mampu memberikan daya tangkal (*deterrence effect*) terhadap segala potensi ancaman,

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Dimas Jarot Bayu, 2017, Antisipasi Konflik Laut China Selatan, 3 Pulau Jadi Pangkalan Militer dapat diakses melalui <https://katadata.co.id/berita/2017/12/18/antisipasi-konflik-laut-china-selatan-3-pulau-jadi-pangkalan-militer>, diakses tanggal 22 Agustus 2019

khususnya di daerah perbatasan.¹²¹ Memperkuat pertahanan di Natuna sesungguhnya bukan untuk melawan Tiongkok tetapi untuk menyatakan sikap secara militer bahwa Indonesia adalah pemilik teritori Natuna yang sah dan tidak dapat terbantahkan. Untuk itu, pemerintah Indonesia sangat gencar mendukung ketahanan dan kedaulatan batas teritori wilayah perairan laut Natuna baik secara Angkatan laut dan udara. Tahun 2018 adalah tahun permulaan hasil kerja keras militer kita saat ini dan setelah itu, tahun-tahun mendatang akan semakin kelihatan bentuk kekuatan TNI RI yang sesungguhnya.

5.2.2 *Compellence and Deterrence*

Identifikasi dalam klasifikasi *hard military power projection* yang kedua adalah *compellence and deterrence*. Identifikasi kedua ini menjelaskan bahwa suatu negara menggunakan kekuatan militernya untuk menanamkan pengaruhnya pada kebijakan negara atau kawasan tertentu. Sesuai yang dijelaskan oleh Ladwig, *compellence* dan *deterrence* adalah penggunaan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan militer melawan negara lain untuk mempengaruhi (*induce it into or dissuade*) kebijakan sebuah negara. Pada bentuk ini, *power projection* bertindak sebagai alat diplomasi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dan aktor-aktor lain di luar negara tersebut.¹²²

Bentuk *hard military power projection* yang kedua adalah *compellence and deterrence*. Dalam identifikasi kedua ini, suatu negara menggunakan kekuatan militernya untuk menanamkan pengaruhnya pada kebijakan negara atau kawasan

¹²¹ Tribun Medan.2018. Penampakan Pangkalan Militer di Natuna, Siap Jaga Wilayah NKRI dari Caplokkan Negara Asing: <https://medan.tribunnews.com/2018/12/21/penampakan-pangkalan-militer-di-natuna-siap-jaga-wilayah-nkri-dari-caplokkan-negara-asing>, diakses tanggal 3 September 2019

¹²²Op, Cit. Walter C. Ladwig

tertentu. Sesuai yang dijelaskan oleh Ladwig, bahwa *compellence* dan *deterrence* adalah penggunaan atau ancaman dengan menggunakan kekuatan militer melawan negara lain untuk mempengaruhi (*induce it into or dissuade*) kebijakan sebuah negara. Pada bentuk ini, *power projection* bertindak sebagai alat diplomasi untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dan aktor-aktor lain di luar negara tersebut.¹²³

Pengaruh dari ancaman militer yang diberikan, diharapkan dapat berubah sesuai dengan kepentingan negara yang member ancaman (negara subjek). Dapat diartikan, *compellence and deterrence* adalah sebuah alat diplomasi yang menggunakan kekuatan militer untuk mempengaruhi negara tertentu (negara objek). Strategi ini biasa digunakan oleh negara yang menilai dirinya memiliki kekuatan militer yang lebih besar daripada negara objek. Namun apabila negara objek tidak memberikan respon yang baik mengenai pengaruh yang diberikan atau malah melakukan perlawanan, maka strategi *compellence and deterrence* dianggap gagal.

Setelah peresmian dan penggunaan pangkalan militer tersebut, masih saja ditemukan nelayan *illegal* yang melakukan *illegal fishing* di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 2016, ditemukan 12 kapal nelayan Cina yang sedang mencari ikan secara *illegal*. Hal ini juga didukung dengan penangkapan kapal Han Tan Cou 19083 oleh KRI Imam Bonjol yang sebelumnya juga sedang melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia yaitu di Laut Natuna. Dari 12 kapal nelayan tersebut, 11 kapal lain berhasil melarikan diri dan hanya kapal Han Tou

¹²³*Op. Cit.* Walter C. Ladwig

Cou yang berhasil ditangkap dan kemudian digiring ke Pangkalan TNI AL Ranai di Natuna.¹²⁴

Penangkapan kapal Han Tan Cou oleh TNI Angkatan Laut Indonesia menuai protes dari Tiongkok. Protes tersebut langsung dijawab oleh Presiden Jokowi dengan langsung terbang ke Natuna dan menggelar rapat di kapal Imam Bonjol. Presiden Jokowi ingin menunjukkan ke dunia bahwa Natuna adalah sah milik Indonesia. Rapat yang digelar di atas kapal perang ini dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia dengan tegas ingin menyatakan dan memenangkan klaim atas pulau Natuna. Rapat ini didukung oleh kehadiran Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Bisnar Pandjaitan; menteri Luar Negeri Retno Marsudi; menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Sudirman Said; panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk merapatkan percepatan pembangunan di Natun serta ikut menyaksikan penenggelaman kapal yang tertangkap basah sedang menjarah ikan di Laut Tiongkok Selatan.¹²⁵ Hal ini sangat menggemparkan, Tak hanya isu *illegal fishing*, Tiongkok sempat mengklaim Natuna sebagai wilayah kedaulatannya yang membuat pemerintah Indonesia semakin geram. Kabar pengklaiman tersebut muncul pada tahun lalu, sehingga pada Bulan Desember 2018, Presiden Indonesia, mengunjungi Natuna dengan menggunakan kapal perang untuk menekankan bahwa Indonesia adalah pemilik sah pulau Natuna.

¹²⁴ Mada, K. R., 2016, Jokowi Naik Kapal Perang di Natuna, tersedia di <https://regional.kompas.com/read/2016/06/23/10130981/jokowi.naik.kapal.perang.di.natuna>, diakses tanggal 5 Oktober 2019

¹²⁵ Kusumadewi, 2016. Rapat Di Atas Kapal Perang di Natuna: Jokowi Gertak China: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623091859-20-140309/rapat-di-atas-kapal-perang-di-natuna-jokowi-gertak-china>, diakses tanggal 5 oktober 2019

Adanya tindakan presiden Joko Widodo yang menyelenggarakan rapat dan *selfie* di atas kapal perang KRI Imam Boonjol tersebut menunjukkan sikap Indonesia yang diwakili oleh presiden Joko Widodo bersifat *hard military projection*. Hal ini terjadi karena tindakan presiden Jokowi terlihat sangat serius dan seperti ingin melakukan aksi akan kekecewaannya ke Tiongkok yang nelayannya tetap melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia khususnya yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, tindakan Presiden Jokowi yang melakukan rapat di atas kapal serta *selfie* akan menimbulkan efek takut atau *deterrence* pada pihak lawan, dan tindakan tersebut berhasil membuat Tiongkok takut sehingga Tiongkok mengeluarkan *press rilis* untuk meminta maaf kepada Indonesia akan tindakannya.

Berdasarkan pengertian umum strategi *compellence and deterrence* di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia juga melakukan upayanya dalam mempertahankan wilayahnya. Untuk membenteng efek *deterrence* yang nyata, presiden Jokowi bersama beberapa menteri di bawahnya melakukan rapat mengenai pembangunan di Natuna. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sempat melakukan *Selfie* di atas kapal. Tindakan Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu *illegal fishing*, 9 DL, dan klaim Tiongkok akan Natuna. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut masuk kedalam proyeksi kekuatan militer Indonesia, khususnya *compellence* dan *deterrence*.

5.2.3 Punishment

Punishment atau hukuman merupakan salah satu strategi dalam *hard military power projection* yang bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik. Ladwig menjelaskan bahwa “*the punitive use of force against another state in response to its pursuit of a given policy.*” Kata lain, berdasarkan penjelasan Ladwig tersebut hukuman akan diberikan kepada pihak yang melanggar aturan yang telah disepakati bersama.

Perjanjian maupun pelanggaran yang mungkin terjadi dalam hal ini adalah perjanjian batas teritori; apabila salah satu pihak ada yang melanggar, maka negara terkait akan memberikan hukuman. Hukuman disini bersifat militer, dimana negara akan menggunakan kekuatannya untuk menghukum negara lain.¹²⁶

Strategi *punishment* ini tentunya berbeda implementasinya apabila dibandingkan dengan *compellence and deterrence*, maupun *showing the flag*.

Strategi ini memiliki fokus adanya kebijakan yang telah disepakati bersama, dimana selanjutnya ada satu pihak yang melanggar negara tersebut sehingga negara terkait akan menggunakan kekuatan militer untuk menyerang menghukum.

Sedangkan *compellence and deterrence* merupakan strategi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan yang sudah ada dengan menggunakan kekuatan militernya.

Implementasi *power projection* Indonesia dalam kebijakan *Power Projection Indonesia* dapat dilihat dari aksi Indonesia dalam memberikan *punishment* kepada kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia

¹²⁶ *Op. Cit.* Walter C. Ladwig

dan melakukan *illegal fishing*. Maraknya kejadian *illegal fishing* atau dikenal juga dengan *Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia, khususnya yang terjadi di kawasan Laut Tenggok Selatan (LTS) mulai ditanggapi dengan serius pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan alasan semakin maraknya kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di Indonesia semakin merugikan Indonesia. Kerugian tersebut berdampak pada ancaman yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang.

Sehingga, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Indonesia memerangi kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia. Kegiatan memerangi *illegal fishing* tersebut diwujudkan melalui pembakaran dan penembakan kapal-kapal laut asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal.¹²⁷

Kebijakan penembakan kapal ini merupakan strategi Jokowi dalam memberikan punishment terhadap negara lain karena telah melanggar batas ZEE Indonesia.

Efek penggetar juga sekaligus menjadi sinyal ancaman yang berfungsi sebagai strategi pencegah untuk meyakinkan target bahwa Indonesia secara serius menegakkan kedaulatan teritorialnya dengan melakukan pembakaran dan penembakan kapal asing sehingga diharapkan memberikan efek jera dalam kegiatan *illegal fishing*.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, didapati bahwa Vietnam sering melakukan *illegal fishing* di kawasan Indonesia dimana telah tercatat kurang lebih terdapat 360 kapal Vietnam yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia dalam

¹²⁷ Nugraha, M.H.R. & Sudirman, A. Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. Jurnal Wacana Politik, 2016, 1(2): 175-182.

kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2014-2016.¹²⁸ Menanggapi *illegal fishing* yang dilakukan nelayan Vietnam, Indonesia menenggelamkan kapal-kapal nelayan Vietnam yang masuk ke kawasan ZEE Indonesia dan melakukan *illegal fishing*. Aksi penenggelaman ini mendapat respon penolakan dari pemerintah Vietnam, dimana Ha Hai, seorang advokat dari Vietnam menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh menenggelamkan kapal tanpa melakukan sidang terlebih dahulu¹²⁹. Aksi penolakan Vietnam akan kebijakan Indonesia ini didukung oleh pemerintahan Thailand, dimana Aphisit Techanitisawad, melalui Asosiasi Perikanan Luar Negeri menyatakan bahwa tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia telah melanggar salah satu konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut¹³⁰, atau yang lebih dikenal dengan sebutan UNCLOS (*United Nation Convention of the Law of the Sea*).

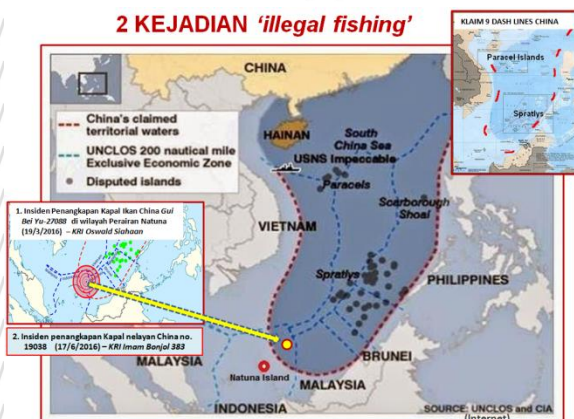
Meski mendapat penolakan dari Vietnam dan Thailand, banyak negara lain yang mengapresiasi tindakan tegas pemerintah Indonesia dalam menanggapi *illegal fishing* di wilayah perairannya. Apresiasi tersebut diberikan masyarakat internasional termasuk negara-negara yang mengikuti sidang umum INTERPOL di Bali.

¹²⁸BBC News. 2018. Tenggelamkan kapal: Indonesia 'tak boleh' lakukan 'tanpa sidang', kata Vietnam: <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>, diakses tanggal 5 Oktober 2019

¹²⁹Ibid.

¹³⁰Ibid.

Gambar 5.2 Penangkapan Kapal Ikan Tiongkok di Perairan Natuna Maret 2016



Sumber: Martha, 2017

Konflik Indonesia-Tiongkok mulai muncul ketika pada tahun 2016 lalu, Menteri Perikanan dan Kelautan melakukan penangkapan kapal ikan milik nelayan Tiongkok yang bernomor Guibei YU 27088 pada Mei 2016 dengan menggunakan KRI OSA-354 dan kapal nelayan Tiongkok bernomor Qiongdanzhou 19038 dengan menggunakan KRI Imam Bonjol 383 pada bulan Juni di tahun yang sama. Sebelumnya juga pernah terdapat kejadian yang serupa dimana pada tahun 2010, terdapat 2 kapal nelayan tanpa identitas yang melakukan *illegal fishing* di perairan Natuna kemudian ditangkap dengan menggunakan KRI Hiu-05 dan Hiu-04 namun selanjutnya Kapal Penjaga Pantai RRT (CG) memaksa pemerintah Indonesia untuk melepaskan kapal nelayan tersebut. Kejadian tersebut terulang kembali pada tahun Maret 2013 dan Juni 2016, namun masih tetap lolos dari *punishment* pemerintah Indonesia karena desakan CG yang memaksa pemerintah Indonesia untuk melepaskan kedua kapal nelayan tersebut. Dan barulah pada tahun 2016 Menteri Perikanan dan Kelautan Indonesia bisa

melakukab *punishment* dengan menangkap sekaligus menenggelamkan kapal illegal tersebut.¹³¹

Tindakan penangkapan ini dilakukan Indonesia karena dengan jelas nelayan Tiongkok melakukan *illegal fishing* di wilayah sekitar pulau Natuna dengan mengklaim bahwa eilayah perairan tersebut adalah milik Tiongkok dengan alasan historis bahwa wilayah perairan di kepulauan Natuna tersebut adalah wilayah pelayan Tiongkok. Hal tersebut diperjelas dengan pengklaiman secara sepihak akan wilayah perairan LTS dengan memperbaiki petanya dan menambahkan Sembilan *dash lines* (garis putus-putus) di wilayah laut bebas Laut Tiongkok Selatan. Tindakan Tiongkok dalam membuat dan mengklaim wilayah di dalam Sembilan *dash lines* adalah milik Tiongkok dianggap melanggar pasal 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi “*the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breath of the territorial sea is measured*”, yang artinya sembilan garis putus Tiongkok tersebut melanggar ketentuan batas maksimum ZEE yang telah disepakati di UNCLOS yaitu sepanjang 200 mil dari garis pangkal negara pantai. Kemudian tindakan Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal illegal tersebut dapat diartikan sebagai *power projection* Indonesia dalam mempertahankan wilayah perairannya dan masuk dalam kategori *punishment*. *Punishment* diberikan dengan tujuan agar nelayan dari negara lain tidak dapat melakukan tindakan *illegal fishing* lagi di ZEE Indonesia khususnya perairan Natuna terlepas dari alasan apapun.

¹³¹ Ibid.

5.2.4 *Armed Intervention*

Armed Intervention menurut Ladwig adalah “*the forcible movement of military units into another nation’s territory to influence the internal affairs of the target country, short of outright conquest.*” Intervensi yang dilakukan bertujuan

untuk mempengaruhi kepentingan internal suatu negara. Contoh kasus dari *Amed*

Intervention ini adalah *Operation Cactus* yang dilakukan India di Maladewa.

India mengirim pasukannya ke Maladewa untuk membebaskan Maladewa dan merebut kemerdekaannya dari Pakistan.¹³² Berdasarkan contoh ini, dapat ditarik

kesimpulan bahwa *Armed Intervention* tidak terus menerus membawa dampak yang buruk bagi suatu negara, namun dapat juga *Armed Intervention* membantu suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Armed Intervention juga tidak hanya bernilai kemanusiaan, namun juga mengandung muatan politik berdasarkan contoh ini, dapat bahwa *Armed Intervention* tidak selalu membawa dampak yang buruk bagi suatu negara, namun dapat juga *Armed Intervention* membantu suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. *Armed Intervention* juga tidak hanya bernilai kemanusiaan, tapi juga mengandung muatan politik. Berdasarkan contoh ini, India menunjukkan dukungannya terhadap Maladewa.

5.2.5 *Conquest*

Ladwig menjelaskan *Conquest* sebagai “*the offensive use of military assets to forcibly occupy non-contiguous controlled or claimed by another state.*” Dengan

demikian, dapat diartikan bahwa *conquest* adalah sebuah aksi militer yang

¹³² *Op. Cit.* Walter C. Ladwig

bertujuan untuk melakukan penyerangan ke suatu negara atau wilayah tertentu, dengan tujuan akhir berupa menduduki dan menguasai wilayah tersebut. Meskipun *conquest* menggunakan kekuatan militer sebagai upaya untuk penyerangan, *conquest* sangat berbeda dengan *armed intervention*. Hal ini disebabkan karena *conquest* bukanlah strategi yang bertujuan untuk revolusi melainkan sebagai upaya untuk memperoleh kekuasaan dan kepentingan nasional diri negara yang melakukan *power projection*. Selain itu, *conquest* juga dapat diartikan sebagai upaya untuk merebut kembali wilayah yang telah diambil oleh negara lain.¹³³

Kawasan Laut Tiongkok Selatan saat ini menjadi fokus proyeksi kekuasaan Indonesia untuk bekerjasama, memperkuat ekonomi, dan juga pertahanan negara. Hal ini membawa kesimpulan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo ini tidak dilakukan upaya *conquest* untuk mendapatkan wilayah di kawasan LTS. Hal ini disebabkan, pada dasarnya Indonesia mencari kawan, bukan lawan dalam implementasi strategi *power projection* berupa kebijakan *Power Projection Indonesia*.

Konflik-konflik yang ada di Kawasan LTS juga tidak dapat dikatakan dalam kategori *conquest* karena tidak adanya perebutan wilayah yang dilakukan Indonesia di Kawasan LTS. Maka dari itu, identifikasi ini tidak dapat digunakan dalam operasional *hard military power projection*, karena tidak ada kecenderungan kegiatan *conquest* atau penaklukan yang dilakukan Indonesia pada

¹³³ Op, Cit. Walter C. Ladwig



masa pemerintahan presiden Joko Widodo di suatu wilayah di Kawasan Laut
Tiongkok Selatan.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Identifikasi *Power Projection* Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan wilayah di Kawasan Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Joko Widodo apabila dilihat dengan menggunakan konsep *Power Projection* milik Walter Ladwig lebih banyak menggunakan *hard military power projection*.

Akan tetapi, kecenderungan strategi *power projection* Indonesia apabila dilihat melalui intensitasnya sesuai dengan konsep yang sama, Indonesia lebih condong menggunakan *soft military power projection*.

Hal diatas dibuktikan dengan Implementasi Indonesia yang lebih banyak dalam identifikasi *Securing Sea Lanes of Communication* (SLOC) yang ada di dalam *soft military power projection*, dimana Indonesia melakukan 1) *Sea Security Partnership* yang di dalamnya ada: (a) melakukan berbagai *workshop* untuk mengatasi permasalahan di LTS; (b) melakukan kerjasama bilateral dengan Amerika, ASEAN-US *Meeting in Anti Privacy and Conter-Terrorism*, ASEAN *Maritime Forum*, ASEAN-Japan *Maritime Port and Transport Security*, dan ASEAN-EU *Experts Meeting on Maritime Security*; dan (d) kerjasama *regional initiative* diantaranya adalah (a) kerjasama dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Singapura dan Timur Leste, serta Australia dan New Zealand; (b) bergabung dengan ARF yang berada di bawah naungan IMO; dan (2) *Naval Military Joint Exercise*, pada strategi ini Indonesia melakukan (a) *joint patrol* atau patroli gabungan yang pernah dilakukan adalah antara Indonesia-Tiongkok

(2016), ASEAN-Tiongkok (2016), Indonesia-Australia (2016), Indonesia-Malaysia-Filipina (2017), dan Indonesia-Vietnam (2019); (b) *Joint mission* yaitu misi bersama yaitu dilakukan Indonesia dengan Tiongkok (2016); dan (c) *joint exercise*, latihan gabungan ini pernah dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat (sejak 1995) yang disebut dengan CARAT, dan ASEAN-Tiongkok (2016).

Sedangkan pada *Hard Military Power Projection*, Indonesia melakukan tiga dari lima strategi yang ada dalam teori Ladwig, diantaranya adalah *Showing the Flag, Compellence and Deterrence* dan *Punishment*. Pada *Showing the Flag*, Indonesia melakukan *Military Deployment in Conflict Region* yaitu Indonesia mengubah nama Laut Tiongkok Selatan yang berada di kawasan Natuna menjadi Laut Tiongkok Selatan dan membangun pangkalan militer di kepulauan Natuna. Sedangkan pada *Compellence and Deterrence*, Indonesia melakukan *Used Military for Coercive Diplomacy to Influence the Decision Making* yaitu tindakan Presiden Joko Widodo yang melakukan rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol di Natuna setelah terjadinya pengeboman kapal nelayan Tiongkok yang melakukan *illegal fishing* di kawasan ZEE Indonesia. Lalu pada *Punishment*, Indonesia melakukan *Punishment to Another Country who Breaks the Rules inside the Territory* yaitu dengan melakukan pengeboman, penenggelaman dan penangkapan para nelayan ilegal melalui melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan ilegal tersebut ada yang dari Tiongkok (2016) dan Vietnam (3 tahun terakhir).

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis menemukan efektifitas dari penggunaan strategi *hard military power projection* lebih efektif daripada penggunaan strategi *soft military power projection*. Sehingga penelitian ini dinilai mampu menjadi bahan acuan untuk meneliti lebih lanjut, detail, dan terperinci mengenai efektifitas penggunaan strategi *power projection* milik Walter Ladwig, baik menggunakan studi kasus yang sama ataupun berbeda dengan tulisan ini.
2. Pemerintah semakin proaktif dalam mengkomunikasikan strategi *power projection* melalui *Power Projection Indonesia*, agar semua negara dapat mengetahui bahwa Indonesia mampu untuk menjadi *Power Projection Indonesia*.
3. Pemerintah lebih mengembangkannya dalam mencegah ancaman bahaya kebocoran minyak yang ada di Laut Sulawesi, karena diketahui bahwa pemerintah Indonesia hanya melakukan *joint patrol* untuk mengawasi ancaman tersebut.
4. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya, yang juga meneliti mengenai strategi pertahanan negara, dapat mengembangkan ilmu dalam bidang strategi pertahanan negara dengan mengadaptasi teori lain dan menambah fokus militer yang mengimplementasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

ASEAN, ASEAN *Economic Community Blueprint*, 2008,

<http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>

Aufiya, Mohd. Agoes. 2017. *Indonesia's Global Maritime Fulcrum:*

Contribution in the Indo-Pacific Region, Andalas Journal of International

Studies, 6(2): 143-159, 2017Bappenas. 2014. Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Rancangan Awal, RPJMN 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan

Bidang, Bab 6. Jakarta: Bappenas.

Beckman, R. 2015. *Maritime Boundary Dispute in the East and South China Seas.*

In CSIS, Forging A Common Maritime Future for ASEAN and Japan,

Jakarta: CSIS.

Booth, A. (ed.), 1992. *The Oil Boom and After: Indonesian Economic Policy and*

Performance in the Suharto Era. Singapore, Oxford University Press.

Chen, J. et.al. 2014. *New Perspectives on Indonesia: Understanding Australia's*

Closest Asian Neighbour. Perth: Perth USAsia Centre.

Connely, A. L.2016. *Indonesian in the South China Sea: Going it alone*

(Analysis). Sydney: Lowy Institute for International Policy.

International Hydrographical Organization, *The 4th Edition of S-23 Document,*

Chapter 6 of South China & Eastern Archipelagic Seas.

Jordan, William, Lewis M. Stern, Walter Lohman. 2012. *U.S.-Vietnam Defense*

Relations: Investing in Strategic Alignment. The Heritage Foundation

Leadership for America, No. 2707

Kolonel Karmin Suharna, S. M., *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan*

Dampaknya bagi Ketahanan Nasional, hlm. 36

Mackie, J. A. C. 1974. "Konfrontasi: Indonesia's Dispute againts Malaysia"

(Kuala Lumpur: Oxford University Pers), hlm. 165- 170. Dikutip dalam

Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Soeharto*. 1998.

Marsudi, R. 2015. *RI Foreign Minister: IORA Can be Designed to Become More*

Strategic. VIII, 14 April 2015

Miller, D. 2001. *The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present*.

Wisconsin, Motorbooks International.

Netherland Maritiem Land, 2015. *Indonesia Maritime Hotspot: Final Report*.

Maritime by Holland.

Pidato Soekarno yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1965, "Menemukan

Kembali Revolusi Kita", di kutip dalam "Dua Puluh Lima Tahun

Dapertemen Luar Negeri".

Puspitawati, D. 2017. *Hukum Laut Internasional*. Depok: Kencana.

Roberts, C. B., & Widyaningsih, I. 2015. "Indonesian Leadership in ASEAN:

Mediation, Agency and Extra-Regional Diplomacy," In C.B. Roberts,

A.D. Habir & L.C. Sebastian (Eds.), "Indonesia's Ascent: Power,

Leadership, and Regional Order," 264-286. London: Palgrave MacMillan.

Storey, I. 2011. *Southeast Asia and the rise of China: The search for security*,

Abingdon, Oxon and New York: Routledge.

Sulaiman, Yohanes, "Global Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?", *The Jakarta Post*, 4 April 2017.

Susilo, I. Basis (ed.), 2015. *Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia*. Surabaya: CSGS,

Till, G. 2009. *Seapower - A Guide for the Twenty-First Century*, Second Edition. London: Frank Cass Publishers.

Toer, Pramoedya Ananta. 2015. *Gadis Pantai*. Jakarta, Lentera Dipantara

Widjajanto, A. 2005. *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia*.

Jurnal

Al Syahrin, M. N. 2018. *Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia*, *Indonesian Perspective*, 3(1): 1-17, Januari-Juni 2018.

Aufiya, M. A. 2017. *Indonesia's Global Maritime Fulcrum: Contribution in the Indo-Pacific Region*, *Andalas Journal of International Studies*, 6(2): 143-159.

Babson, Oliver. 2002. *Diplomacy of Isolation; United States Unilateral Sanctions Policy and Vietnam 1975-1995*. WWS Case Study 4(02).

Blair, C Dennis. 2008. *Military Power Projection in Asia*. The National Bureau of Asian Research.

Connely, A. L. 2015. *Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges*. *Contemporary Southeast Asia*, 37(1): 1-28.

Emmers, R. 2014. *Indonesia's role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership*. *The Pacific Review*, 27 (4), 543-562.

Gindarsah, I., *Politics, Security and Defence in Indonesia: Interactions and Interdependencies*. National Security College Issue Brief, 4 Mei 2014., pp. 25-32

Grygel, Jakub J, 2006. *Great Powers and Geopolitics*. Amerika Serikat: The Johns Hopkins University Press.

Indriana Kartini, *Kebijakan Jalur Sutera Baru Cina dan Implikasinya Bagi Amerika Serikat*, Jurnal Kajian Wilayah, 6(2), 2015.

International Crisis Group. 2016. *Stirring up the South China Sea (IV): Oil in Troubled Waters*, Asia Report 275.

J.A. C. Mackie, *Konfrontasi; Indonesia's Dispute againts Malaysia* (Kuala Lumpur: Oxpord University Perss, 1974), hlm. 165- 170. Dikutip dalam Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Soeharto*. 1998. hal. 85

Ladwig, Walter C. 2009. *Delhi's Pacific ambition: Naval Power, "Look East". And India's emerhing Influence in Asia Pacific*". Forthcoming in Asian Security,5 (2).

Mandi, N.B.R. 217. *Development of Ferry Port as a Complement of "Tol Laut": Case Study on Ferry Port of Ketapang*. *International Refereed Journal of Engineering and Science*, 6(3), pp. 31-37

Markowitz, N. Jonathan and Fariss J. Christoper. 2013. *Going to Distance: The Price of Projecting Power*. Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs.

Mervyn Piessé, *The Indonesian Maritime Doctrine: Realising the Potential of the Ocean, Strategic Analysis Paper, Future Directions & Independent Strategic Analysis of Australia's Global Interests*, 22 Januari 2015.

Nanto Sriyanto, *Power Projection Indonesia, Tumbuhnya Hubungan Indonesia – Tiongkok Dan Kekuatan Negara Menengah Indonesia Di Wilayah Asia Timur*, 31 Mei 2018, *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(1), 2018

Nugraha, M.H.R. & Sudirman, A. *Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia*. *Jurnal Wacana Politik*, 2016, 1(2): 175-182

Peter Christian Hauswedell, *The Anti-Imperialist International United Front in Chinese and Indonesia Foreign Policy 1963-1965 : A Study of anti-Status Quo Politics*, (tesis PH. D, Cornell University, 1976),

Puspitawati, D. 2017. *Urgent Need for National Maritime Security Arrangement In Indonesia: Towards Global Maritime Fulcrum*, *Indonesian Journal of International Law*, 14(3): 321-347.

Quirk, Sean & Bradford, John. 2015. "The Global Maritime Fulcrum: A New U.S. Opportunity to Engage Indonesia", *Issues & Insights* 15, no. 9, Pacific Forum CSIS.

Reilly, Benjamin. 2013. *Australia as a Southern Hemisphere Power*. Australian Strategic Policy Institute.

Sambogo, A. 2018. *Penamaan Laut Natuna Utara oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional*, *Jurist-Diction*, 1(2): 381-196

Shondakh, B. K. 2015. "*Mantan Kasal: Kurang Paham Konsep Poros Maritim Pemerintah*", Jurnal Maritim, dalam <http://jurnalmaritim.com/2015/03/mantan-kasal-kurang-paham-konsep-poros-maritimpemerintah/>

Silabi Al-Attar, Firdaus Silabi, dkk. 2017. *Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer di Wilayah Sengketa Internasional* (Studi Kasus Laut Tiongkok Selatan). *Diponegoro Law Journal*. Vol 6, No. 2.

Simela Victor Muhamad, *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*, 6(21) /IP3DI/ November 2014

Sriyanto, N. 2018. *Poros Maritim Dunia, Tumbuhnya Hubungan Indonesia – Tiongkok Dan Kekuatan Negara Menengah Indonesia Di Wilayah Asia Timur*, 31 Mei 2018, Jurnal Kajian Wilayah, 9(1).

Tampi, Butje. 2017. *Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis)*. Jurnal Hukum Unsrat, 23(10): 1-16.

Tri Patmasari, Eko Artanto, dan Astrit Rimayanti, *Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga*, Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016: 03-21.

Wirasuta, D. S. 2013 *Keamanan Maritim Laut Tiongkok Selatan; Tantangan dan Harapan* (South China Sea Security; Challenges and Opportunities), Jurnal Pertahanan, 3(3).

Ziyad Falahi, *Memikirkan Kembali Arit Million Friends Zero Enemy dalam Era Paradox of Plenty*, Global and Strategies, 7(2): 227-240.

Skripsi dan Tesis

Astrid Sabrina Permatasari, *Regional Marine Pollution Exercise (MARPOLEX)*

Sebagai Upaya Menghadapi Potensi Pencemaran Laut Akibat Minyak,

Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Cuong, Nguyen Anh, Trinh Thi Nguyet, Pham Quoc Thanh. 2010. *Vietnam-*

United States Relations After Normalization. Vietnam National University

Falahi, Z. "Memikirkan Kembali Arti *Million Friends Zero Enemy* dalam Era

Paradox of Plenty", *Global and Strategies* 7, no. 2: 227-240

Hauswedell, PP. C. 1966. "*The Anti-Imperialist International United Front in*

Chinese and Indonesia Foreign Policy 1963-1965 : A Study of anti-

Status Quo Politics", (tesis PH. D, Cornell University, 1976): 157.

Uno, Excellano Ramadhan. 2017. *Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia-*

Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU-Fishing di Perbatasan Kedua

Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016, Skripsi. Universita

Diponegoro.

Permatasari, A. S. 2018. *Regional Marine Pollution Exercise (MARPOLEX)*

Sebagai Upaya Menghadapi Potensi Pencemaran Laut Akibat Minyak,

Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Uno, E. R. 2017. *Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam*

Memberantas Kegiatan IUU-Fishing di Perbatasan Kedua Negara

Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016, Skripsi, Universita Diponegoro.

Suharna, Kolonel Karmin, S. M., *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan*

Dampaknya bagi Ketahanan Nasional.

Jurnal Periodik

Cuong, Nguyen Anh, Trinh Thi Nguyet & Pham Quoc Thanh. 2010. "Vietnam-United States Relations After Normalization," Vietnam National University

Emmers, R. "Indonesia's role in ASEAN: A case of incomplete and sectorial leadership," *The Pacific Review* 27, no. 4: 543-562

ICC IMB. 2015. *Reports on Piracy and Armed Robbery at Sea against Ships 2014 Annual Reports.*

Jordan, William, Lewis M. Stern, Walter Lohman. 2002. "U.S.-Vietnam Defense Relations: Investing in Strategic Alignment," *The Heritage Foundation Leadership for America*, No. 2707.

Marsudi, R. 2015. *RI Foreign Minister: IORA Can be Designed to Become More Strategic.* VIII.

Muhamad, Simela Victor. 2014. *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*, 6(21) /I/P3DI/ November.

Netherland Maritiem Land, 2015. *Indonesia Maritime Hotspot: Final Report. Maritime by Holland.*

Patmasari, T., Artanto, E. & Rimayanti, A. 2016. *Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga*, Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016: 03-21 (diakses 20 Mei 2019)

Piessse, Mervyn. 2015. "The Indonesian Maritime Doctrine: Realising the Potential of the Ocean, Strategic Analysis Paper, Future Directions & Independent Strategic Analysis of Australia's Global Interests," Januari 22, 2015

Srenal. 2014. *Salinan naskah terjemahan pidato Presiden Republik Indonesia pada 9th East Asia Summit, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014.*

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015.

Undang Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 1985, Pengesahan United Nations Covention on the Law of the SEA

Surat Kabar Elektronik dan Internet

Agence Franse-Pesse. 2016. *South Chine Morning P0st, Australia, Indonesia consider joint 'peace patrols' in the disputes South China Sea.*
<https://www.scmp.com/news/asia/australasia/article/2041964/australia-indonesia-consider-joint-peace-patrols-disputed>, (diakses 23 Agustus 2019)

Allard, T. & Munthe, B. C. 2017. *Asserting Sovereignty, Indonesia Renames Part of South China Sea*, Reuters (online), 14 Juli 2017, hal 1, tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-map/asserting-sovereignty-indonesia-renames-part-of-south-china-sea-idUSKBN19Z0YQ>.

Al Syahrin, M. Najeri. 2017. *Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas*

Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia, Indonesian Perspective:

https://www.researchgate.net/publication/327477984_Kebijakan_Poros_Maritim_Jokowi_dan_Sinergitas_Strategi_Ekonomi_dan_K keamanan_Laut_Indonesia/link/5b91ba03299bf147391fabda/download 3(1): 1-17, (diakses

8 September 2019)

Ariyanti, F. 2016. *Ini Sebab RI Gagal Tangkap Kapal Pencuri Ikan Tiongkok di*

Natuna, tersedia di <http://bisnis.lip>.

ASEAN. 2008. *ASEAN Economic Community Blueprint*. tersedia di

<http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf>.

Asean China Center. Oktober 3, 2013,

http://www.aseanchinacenter.org/english/2013-10/03/c_133062675.htm

Associated Press. 2017. *South China Morning Post, Joint navy patrols between*

Indonesia, Philippines and Malaysia to cut off Sulu Sea corridor to

militants, 4 Juni 2017, tersedia di

<https://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/2096834/joint-navy-patrols-between-indonesia-philippines-and-malaysia>.

Batamnews. 2016. *Mengenal 9 Garis Putus-putus Tiongkok dan Klaim Laut*

Tiongkok Selatan. Di [https://www.batamnews.co.id/berita-14168-](https://www.batamnews.co.id/berita-14168-mengenal-9-garis-putusputus-tiongkok-dan-klaim-laut-Tiongkok-selatan.html)

[mengenal-9-garis-putusputus-tiongkok-dan-klaim-laut-Tiongkok-](https://www.batamnews.co.id/berita-14168-mengenal-9-garis-putusputus-tiongkok-dan-klaim-laut-Tiongkok-selatan.html)

[selatan.html](https://www.batamnews.co.id/berita-14168-mengenal-9-garis-putusputus-tiongkok-dan-klaim-laut-Tiongkok-selatan.html).

Bayu, Dimas Jarot 2017, *Antisipasi Konflik Laut China Selatan, 3 Pulau Jadi*

Pangkalan Militer dapat diakses melalui

[https://katadata.co.id/berita/2017/12/18/antisipasi-konflik-laut-china-](https://katadata.co.id/berita/2017/12/18/antisipasi-konflik-laut-china-selatan-3-pulau-jadi-pangkalan-militer)

[selatan-3-pulau-jadi-pangkalan-militer](https://katadata.co.id/berita/2017/12/18/antisipasi-konflik-laut-china-selatan-3-pulau-jadi-pangkalan-militer)

BBC Indonesia. 2018. *Tenggelamkan kapal: Indonesia 'tak boleh' lakukan 'tanpa sidang', kata Vietnam*, BBC, 12 Januari 2018, tersedia di,

<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>

_____. 2018. *Tenggelamkan kapal: Indonesia 'tak boleh' lakukan 'tanpa sidang', kata Vietnam*: <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42653898>.

_____. 2016. *Cina protes penembakan kapal nelayan, TNI AL: "Kami tidak brutal"*, 20 Juni 2016, tersedia di

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160620_indonesia_tnial_bantah_kapalcina.

_____. 2016. *Cina protes penangkapan delapan ABK di perairan Natuna*", *Dunia*, 31 Mei 2016, tersedia di

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160530_dunia_kapal_cina_natuna_protes.

_____. 2016. *Tiongkok protes penangkapan delapan ABK di perairan Natuna*", *Dunia*, , Mei 31, 2016, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160530_dunia_kapal_Tiongkok_natuna_protes.

_____. 2016. *"Kapal modern pencuri ikan, Viking, ditenggelamkan"*,

Berita Indonesia, 14 Maret 2016, tersedia di

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160314_indonesia_viking_sudah_ditenggelamkan.

_____ . 2016. *Berita Indonesia: Kapal modern pencuri ikan, Viking, ditenggelamkan.*, Maret 14, 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita-indonesia/2016/03/160314_indonesia_viking_sudah_ditenggelamkan.

_____ . 2011. *Sengketa kepemilikan Laut Tiongkok Selatan.* Di https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyc-onflict.

Berita Satu. 2016. *Tol Laut, Strategi Jokowi Wujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, 2016, tersedia di <http://www.bwritasatu.tv/news/tol-laut-strategi-jokowi-wujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/>

Bisnis.com. 2014. *Sejak 2014, 151 Kapal Penangkap Ikan Secara Ilegal Ditenggelamkan*, Agribisnis, 22 Februari 2016, tersedia di <http://industri.bisnis.com/read/20160222/99/521423/sejak-2014-151-kapal-penangkap-ikansecara-ilegal-ditenggelamkan>.

Bhatnagar, Tulikha. 2016. *BBC Indonesia: Mengapa Indonesia menambah kekuatan militer di Natuna?.* *BBC News.* Di http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/12/151230_dunia_indonesia_natuna.

Bodeen, Christopher. 2019. *Navy Times, CARAT and the stick: Latest South China Sea development:* <https://www.navytimes.com/news/your-navy/2019/08/06/carat-and-the-stick-latest-south-china-sea-developments/>

Chan, Minnie. 2019 *South China Morning Post, China begins joint naval drills with six Southeast Asian nations*, 26 April 2019, tersedia di <https://www.scmp.com/news/china/military/article/3007804/china-begins-joint-naval-drills-six-southeast-asian-nations>.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, 'Kemenko Kemaritiman Update Peta Laut RI', Kantor Kemenko Kemaritiman, 14 Juli 2017, tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-3560117/kemenko-maritim-update-peta-ri-laut-natuna-jadi-laut-natuna-utara>.

Emmers, R. The *US Rebalancing Strategy: Impact on the South China Sea*. National Security College, Australian National University tersedia di <http://nsc.anu.edu.au/documents/occasional-5-brief-8.pdf>.

Global Security. *Power Projection Platform*. Di <http://www.globalsecurity.org/military/facility/ppp.html>

Hanz Jimenez Salim, "Cerita Menteri Susi Nyaris 'Diculik' di Sidang Umum Interpol," Liputan 6, 9 November 2016, tersedia di <https://www.liputan6.com/news/read/2647601/cerita-menteri-susi-nyaris-diculik-di-sidang-umum-interpol>

Hardiana, I. & Trixie, B., *Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim (Online)*. Sekretariat Kabinet RI, 21 Oktober 2014, tersedia di <http://setkab.go.id/menju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/>

Hayes, R. W. 2015. *Melihat Pulau Buatan Tiongkokdi Laut TiongkokSelatan Secara Dekat*, BBC Internasional, tersedia di http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/12/151215_majalah_cina_lautselatan.

Herman, Steve. 2014. *Indonesia Declares War on Illegal Foreign Fishing Vessels*, *Voice of America*, 23 December 2014, tersedia di: <http://www.voanews.com/content/indonesia-declares-war-on-illegal-foreign-fishing-vessels/2570346.html>.

Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia,” Presidenri, 13 November 2015, tersedia di <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>

Indonesia.go.id. *Kebijakan Nasional. Indonesia Poros Maritim Dunia*, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>.

"Isu Keamanan Maritim Regional", *Tabloid Diplomasi*, Edisi 4 Tahun I, September 2010, dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/Suplemen%20September%202010.pdf>.

Jane's Defence Weekly Online. 2012. "*China Commissions First Aircraft Carrier*", 25 September 2012, tersedia di <http://www.janesdefence-weekly.com>.

Jati, Gentur Putro. 2014. "*Jokowi Sebar Ide Poros Maritim di KTT ASEAN*," CNN, 13 November 2014, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141113122827-92-11279/jokowi-sebar-ide-poros-maritim-di-ktt-asean> (diakses 20 Mei 2019)

Junttila, K. & Weatherby, C. 2016. *Indonesia's Global Maritime Nexus: Implications for Illegal Fishing*. 19 September, tersedia di <https://ww.stimson.org/content/indonesias-weather-forcat-hazy-with-a-chance-of-clear-skies>.

Kahar, Joenil. 2004. *Penyelesaian Batas Naritim NKRI*” dalam *Pikiran Rakyat* Cyber Media, 3 Januari 2004.

Kawilarang, R. R. A. 2008. "G30S dan Masa Suram Hubungan Ri-RRC," *VIVAnews*, Oktober 9, 2008, <https://www.viva.co.id/arsip/1912-g30s-dan-masa-suram-hubungan-ri-rrc>.

Kemp, J. 2014. *Joint Petroleum Development in the South China Sea*, tersedia di <http://www.reuters.com/article/2014/08/28/southchinasea-oil-kempidUSL5N0QX4C220140828>.

Kemlu. 2017. *Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*.

Kemlu. 2016. *Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) Sepakati Langkah Strategis Penguatan Kerja Sama, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, tersedia di <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/IORA-sepakati-langkah-strategis-penguatan-kerja-sama.aspx> (diakses 20 Mei 2019)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). 2019. "Indian Ocean Rim Association," April 9, 2019, https://kemlu.go.id/portal/id/read/167/halaman_list_lainnya/indian-ocean-rim-association.

Kemlu.go.id Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Kemp, J. 2014. *Joint Petroleum Development in the South China Sea*. <http://www.reuters.com/article/2014/08/28/southchinasea-oil-kempidUSL5N0QX4C220140828>.

Kompas.com. 2015. *KSAU: Lanud Pulau Natuna Dicitakan Jadi Pearl Harbor Indonesia*, Nasional, 20 November 2015, tersedia di <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/20/15195941/KSAU.Lanud.Pulau.Natuna.Dicitakan.Jadi.Pearl.Harbor.Indonesia>.

Koto, Rahmat Maulana. 2017. *Laut Natuna Utara Bukan Nama Baru untuk Laut Tiongkok Selatan*. Di <https://www.risamedia.com/warta/geografi/karena-laut-Tiongkok-selatan-sejatinya-tidak-berganti-nama-menjadi-laut-natuna-utara/>

Kusumadewi, Anggi. 2016. *Perairan Natuna, 'Medan Tempur' Indonesia-Tiongkok*. CNN Indonesia. Di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620170157-20-139564/perairan-natuna-medan-tempur-indonesia-Tiongkok>.

Kusumadewi, 2016. *Rapat Di Atas Kapal Perang di Natuna: Jokowi Gertak China*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623091859-20-140309/rapat-di-atas-kapal-perang-di-natuna-jokowi-gertak-china>.

Ladwig, Walter C. 2008. *India and Military Power Projection*. Tersedia di www.walterladwig.com/Articles/India%20Power%20Projection.pdf

Langford, Gary D. 2004. *Power Projection Platforms: An Essential Element of Future National Security Strategy*. Di <https://www.hsdl.org/?view&did=451008> (diakses 7 Januari 2019)

Liston P Siregar, "Gerakan kemerdekaan Papua Barat galang dukungan," BBC, 4 Mei 2016, tersedia di http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160503_dunia_papua_london

Mada, K. R. 2016. *Jokowi Naik Kapal Perang di Natuna*, tersedia di <https://regional.kompas.com/read/2016/06/23/10130981/jokowi.naik.kapal-perang.di.natuna>, (diakses 5 Oktober 2019)

Merdeka.com 2014. *Dunia: Ratusan nelayan mereka ditangkap patroli RI, Malaysia panik*, Dunia, 21 November 2014, tersedia di

<https://www.merdeka.com/dunia/ratusan-nelayan-mereka-ditangkap-patrol-ri-malaysia-panik.html> (diakses 20 mei 2019)

Mourdokoukoutas, Panos. 2019. *Forbes, South China Sea: Indonesia and Vietnam Prove Duterte Wrong*, 28 Februari 2019,

<https://www.forbes.com/sites/panosmourdokoukoutas/2019/02/28/south-china-sea-indonesia-and-vietnam-prove-duterte-wrong/#40def5551e85>
(diakses 30 Oktober 2019)

Ovier, Asni. 2015. Soal "Joint Patrol" di Laut Cina Selatan, Pemerintah RI Diminta Hati-hati, 21 Oktober 2015, tersedia di

<https://www.beritasatu.com/nasional/316027/soal-joint-patrol-di-laut-china-selatan-pemerintah-ri-diminta-hatihati>

Parameswaran, Prashanth. 2016. *The Diplomat: Are Indonesia and Australia Mulling South China Sea Joint Patrols?:*

<https://thediplomat.com/2016/10/indonesia-australia-joint-patrols-in-the-south-china-sea/>.

Perkasa, Anugerah. *Laut Natuna Jadi Sumber Migas Asia*. Di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623134311-20-140387/laut-natuna-jadi-sumber-migas-asia>.

Pidato Soekarno yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1965, "Menemukan Kembali Revolusi Kita", di kutip dalam "Dua Puluh Lima Tahun Dapertemen Luar Negeri",

PMD, *Peran Indonesia di Internasional*, Jurnal Maritim, dalam

<http://jurnalmaritim.com/2014/12/poros-maritim-dunia-dan-peran-indonesia-di-internasional>, 26 Desember 2014

PRC. 2014. *Set Aside Dispute and Pursue Joint Development*, 2014, dari Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China': http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18023.shtm, diakses tanggal 7 Oktober 2019

Prameswaran, P. 2015. *The New US-Indonesia Strategic Partnership after Jokowi's Visit: Problems and Prospects*. Brookings Institute, tersedia di <http://www.brookings.edu/opinions/the-new-u-u-indonesia-strategic-partnership-after-jokowis-visit-problems-and-prospects/> (diakses 6 Oktober 2019)

Pratama, Fajar. 2018. "Tekad Kemenhub Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia," 18 Januari 2018, tersedia di, <https://news.detik.com/berita/d-3820892/tekad-kemenhub-jadikan-indonesia-poros-maritim-dunia>

Presiden RI. 2017. *Indonesia Poros Maritim Dunia, Presiden RI*, tersedia di <http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/20171018-Kemenko-Maritim-3th-Jokowi-JK-cetak.pdf> (diakses 30 Mei 2019)

PRC. 2014. *Set Aside Dispute and Pursue Joint Development*, dari Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China' tersedia di http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18023.htm

Putera, Andri Donnal. 2018. Kompas: "Susi : Menenggelamkan Kapal Bukan Hobi Saya, Tapi Amanat UndangUndang," 9 Januari 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/09/201451126/susi-menenggelamkan-kapal-bukan-hobi-saya-tapi-amanat-undang-undang> (diakses 2 Mei 2018)

Putra, E. P. 2015. “*Saling Klaim Laut Cina Selatan Menlu Cina peringatkan Filipina*”, <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/11/11/nxmttx334-saling-klaim-laut-Tiongkok-selatan-menlu-Tiongkok-peringatkan-Filipina> (diakses 21 Mei 2019)

Ramli, R. 2017. “*Poros Maritim Jokowi Bukan Mimpi, Sudah Terasa Dampak Positifnya*”, *Republika*, <http://politik.rmol.co/read/2017/08/27/30460/Rizal-Ramli:-Poros-Maritim-Jokowi-Bukan-Mimpi,-Sudah-Terasa-Dampak-Positifnya> (diakses tanggal 22 Mei 2019)

Republika, Rizal Ramli: *Poros Maritim Jokowi Bukan Mimpi, Sudah Terasa Dampak Positifnya*, 2017, tersedia di <http://politik.rmol.co/read/2017/08/27/30460/Rizal-Ramli:-Poros-Maritim-Jokowi-Bukan-Mimpi,-Sudah-Terasa-Dampak-Positifnya>

RMOL. 2015. “*Ini Lima Pilar Poros Maritim Indonesia*”, 19 November 2015. Tersedia di <http://www.rmol.co/read/2015/12/19/228772/Ini-Lima-Pilar-PorosMaritim-Indonesia->

Roberts, C.B., & Widyaningsih, I. *Indonesian Leadership in ASEAN: Mediation, Agency and Extra-Regional Diplomacy*. In C.B. Roberts, A.D. Habir & L.C. Sebastian (Eds.), *Indonesia's Ascent: Power, Leadership, and Regional Order*, 2015, (pp. 264-286). London: Palgrave MacMillan

Salim, H., J. 2016. “*Cerita Menteri Susi Nyaris 'Diculik' di Sidang Umum Interpol*,” *Liputan 6*, 9 November 2016, <https://www.liputan6.com/news/read/2647601/cerita-menteri-solusi-Mei-nyaris-diculik-di-sidang-umum-interpol>.

Sandee, Henry, 2011. "Promoting Regional Development in Indonesia through Better Connectivity", The World Bank News and Broadcast, <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2011/03/13/promoting-regional-development-indonesia-through-better-connectivity>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2017. "Tegaskan Batas Wilayah NKRI, Pemerintah Terbitkan Peta Mutakhir". Di <http://setkab.go.id/tegaskan-batas-wilayah-nkri-pemerintah-terbitkan-peta-mutakhir/>.

Sinaga, A. *Natuna belong to Indonesia*, Straits Times, 22 Juli 1995.

Siregar, L. P. 2016. "Gerakan kemerdekaan Papua Barat galang dukungan," BBC, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160503_dunia_papua_london.

Soeriaatmadja, Wahyudi, 2016. *Indonesian President Joko Widodo's Trip to South China Sea Islands a Message to Beijing, Says Minister*, The Straits Times, 23 Juni 2016, tersedia di <http://www.straitstimes.com/asia/asia/indonesianpresident-sails-to-southchina-sea-islands-in-message-to-beijing>

Suastha, Riva Dessthania. 2017. *Diprotos Tiongkok, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB*. Di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170720172204-106-229-239/diprotos-Tiongkok-ri-daftarkan-nama-laut-natuna-utara-ke-pbb>.

Sulaiman, Yohanes. 2017. *Global Maritime Nexus, Toward a Grand Strategy of Indonesia?* The Jakarta Post, 4 April 2017

Supriyanto, Ristian Atriandi. 2016. *Developing Indonesia's Maritime Strategy under President Jokowi*", Special Forum, 22 Februari 2016, teredia di



<http://www.theasanforum.org/developing-indonesias-maritime-strategy->

[underpresident-jokowi-1.](#)

Suryowati, Estu. *Pengaruh Tiongkok terhadap Perekonomian RI Lebih Besar*

Ketimbang AS. Di <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/15/>

[162639526/pengaruh.Tiongkok.terhadap.perekonomian.ri.lebih.besar.keti](#)

[mbang.as.](#)

The Jakarta Post, *Archipelago Belt Aims to Connect Nation*, 30 Mei 2014,

tersedia <http://www.thejakartapost.com/news/2014/05/30/archipelagobelt->

[aims-connect-nation.html.](#)

The Maritime Executive. 2016. *China to Join Naval Exercise off Indonesia*,

tersedia di <https://www.maritime-executive.com/article/china-to-join->

[naval-exercises-off-indonesia](#)

Tribunnews.com, 2014. *"Hikmahanto tentang Makna Doktrin Jokowi"*, Hukum,

14 November 2014. Tersedia di <http://www.tribunnews.com/>

[nasional/2014/11/14/hikmahanto-tentang-makna-doktrin-jokowi](#)

Tribun Medan. 2018. *Penampakan Pangkalan Militer di Natuna, Siap Jaga*

Wilayah NKRI dari Caplokkan Negara Asing: .

Trio Hamdani, *"Jokowi Jalankan Program Tol Laut, Apa Hasilnya?"*, Detik, 20

Desember 2017, tersedia di <https://finance.detik.com/berita-ekonomi->

[bisnis/d-3778419/jokowi-jalankan-program-tol-laut-apa-hasilnya.](#)

US Energy Information Administration, *'South China Sea Energy Resources'*,

2013, Tersedia di <https://www.eia.gov/beta/international/regions->

[topics.cfm?RegionTopicID=SCS](#)

Wahyudi, Soeriaatmadja. 2016. "Indonesian President Joko Widodo's Trip to South China Sea Islands a Message to Beijing, Says Minister," *The Straits Times*, Juni 23, 2016, <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesianpresident-sails-to-southchina-sea-islands-in-message-to-beijing>.

Wenfang, Li. 2018. *China, ASEAN begin joint naval drill*, tersedia di <http://www.chinadaily.com.cn/a/201810/23/WS5bce80d7a310eff303283f68.html>.

